

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
Volume 12 No 2 Juni 2013
ISSN 1412 - 6451

Dafar Isi

Editorial

1. *Link and Match* Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial 117 - 124
Social Welfare Services Research and Development's Link and Match
(Mumu Suherlan)
2. Strategi Survival Gelandangan di Kota Manado 125 - 138
Homeless Survival Strategy in Manado Municipality
(Tateki Yoga Tursilarini)
3. Strategi Keluarga Miskin dalam Mengatasi Kemiskinan 139 - 153
Poor Family Strategy to Overcome Poverty
(Tyas Eko Raharjo F.)
4. Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang 154 - 170
Home Renovation for Poor Citizen in Padang Municipality
(Achmadi Jayaputra)
5. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti dalam Mengentaskan Korban 171 - 182
Penyalahgunaan Napza di Provinsi Bali
*The Implementation of Non-Institutional Social Rehabilitation on Raising
Drug Abuse Victims in Bali Province*
(Sri Kuntari)
6. Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam 183 - 196
Studi Kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura
*Aid Distribution for Natural Disaster Victims
A Case Study on Natural Disaster Victims Rehabilitation in Jayapura Municipality*
(Akhmad Purnama dan Murdiyanto)
7. Peran Nurani Astra dalam Penanganan Korban Bencana Alam 197 - 206
The Role of Nurani Astra on Natural Disaster Victims
Siti Aminatun
8. Adaptasi Masyarakat terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air di Pulau Pramuka, 207 - 214
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
*Community Adaptation on The Limitations of Water Resources in Pramuka Island,
Seribu Islands, DKI Jakarta*
(Ahmad Cahyadi, Wahyu Hidayat, dan Wulandari)

Editorial

Hasil penelitian dan pengembangan sebuah lembaga (Kementerian Sosial) idealnya memiliki nilai tambah bagi eksistensi pengembangan kinerja kementerian, Mumu Suherlan, membuka JPKS volume 12 No 2 Juni 2013 dengan *Link and Match* Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Strategi Survival Gelandangan di Kota Manado, selanjutnya dikemukakan oleh Tateki Yoga Tursilarini, masih strategi dalam edisi ini Tyas Eko Raharjo F. membahas tentang Strategi Keluarga Miskin dalam Mengatasi Kemiskinan. Masih masalah kemiskinan, Achmadi Jaya Putra mendeskripsikan tentang Bantuan Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang, diikuti oleh Sri Kuntari dengan tulisan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti dalam Mengentaskan Korban Penyalahgunaan Napsa di Provinsi Bali. Akhmad Purnama dan Murdiyanto membahas Penyaluran Bantuan Korban Bencana alam, diikuti Peran Nurani Astra dalam Penanganan Korban Bencana Alam oleh Siti Aminatun, dan diakhiri Ahmad Cahyadi dkk dengan Adaptasi Masyarakat terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Dari Redaksi

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial

ISSN 1412 - 6451

Vol 12 No 2 Juni 2013

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa ijin dan biaya
Keywords are extracted from articles. Abstract may be reproduced without permission and cost

Mumu Suherlan (B2P3KSYogyakarta)

***Link and Match* Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Social Welfare Services Research and Development's Link and Match
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 117 - 124**

The Ministry of Social Affairs as the main actor on social welfare services should provide appropriate social policies to overcome the current social problems. Research and development is a bridge to reach social welfare services effectiveness and efficiency. The linkage of research and development products and their applications by operational programs of social services should be established as good as possible in order to build proportional qualified interactive suitability, it's called as link and match between research and development products with the absorbance ability of operational unit. B2P3KS as a research and development organization of social welfare services models maker should refers problems and strategic issues to policy level that faced by operational units. Moreover, research and development also should referes problems and strategic issues to empirical level. Through link and match concept, research and development products are expected to able to solve and overcome social problems and increase social welfare.

Keywords: Social Welfare Services-Link and Match-Research and Development

Kementerian Sosial RI sebagai pelaksana utama pelayanan kesejahteraan sosial harus menyediakan kebijakan sosial yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan untuk mencapai pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara hasil penelitian dan pengembangan dengan aplikasinya haruslah dibangun sedemikian rupa untuk membentuk kesesuaian interaktif yang tepat dan berkualitas, inilah yang kemudian disebut dengan *link and match* antara hasil penelitian dengan daya serap unit operasional. B2P3KS sebagai lembaga penelitian dan pengembangan penyusun model pelayanan kesejahteraan sosial harus merujuk masalah dan isu strategis pada level kebijakan yang dihadapi unit operasional serta pada level empirik. Melalui konsep *link and match*, hasil penelitian dan pengembangan diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Link and match*-Penelitian dan Pengembangan-Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Tateki Yoga Tursilarini (B2P3KS Yogyakarta)
Strategi Survival Gelandangan di Kota Manado
Homeless Survival Strategy in Manado Municipality
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 125 - 138

The existence of homeless in municipal society is unwanted, they are identical with group which is difficult to be arrange, has their own value, and having rather negative attitude. The research is to describe factors they become and several strategies they can survive living in the city. Data resources are gathered from homeless, related institution committing in homeless such as social agencies (municipality and province), police office, Pelita Kasih Non-government Organization, and Commision for Children Protection. Data are gathered through interview, focus group discussion, observation, and ducumentary analysis techniques. Data gathered are analyzed through qualitative and quantitative techniques. The factors they become homeless are caused by selves internal conditions, such as physical, visional, and leprousy handicap. The external factors are family conflict, economic presure, educational and skill limited. The homeless hold several strategies, sort of luring compasionate, feeling enough to eat, set their own value and norm, change their place every time, create their own job, snap the chance if it is possible, follow government program, and solidarity among them. It is recommended that social agency and related institutions under local government, as policy makers, should put forward: the homeless social needs based on their own, looking homeless wholly as humankind from physical, psichological, and social aspect to develop municipality as a whole community. For the people around the homeless are expected to give chance and room for the homeless existence.

Keywords: Survivalization-Homeless-Municipality

Keberadaan gelandangan di lingkungan masyarakat perkotaan tidak dikehendaki, mereka identik dengan kaum yang tidak dapat diatur, memiliki aturan sendiri, berperilaku cenderung negatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab menjadi gelandangan dan beberapa strategi gelandangan agar tetap bertahan hidup di kota. Sumber data diperoleh dari gelandangan, instansi terkait dalam penanganan gelandangan seperti Dinas Sosial (Propinsi dan Kota), Kepolisian, LSM Pelita Kasih, Komisi Perlindungan Anak. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumen. Data terkumpul dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor penyebab menjadi gelandangan karena faktor intern yang berasal dari diri pribadi, cacat fisik, tunanetra, penyakit kusta/lepra. Faktor ekstern karena konflik keluarga, tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, tidak ada pilihan pekerjaan, diterlantarkan oleh keluarga. Gelandangan berusaha menerapkan beberapa strategi bertahan hidup di kota, seperti menarik rasa iba; hanya memenuhi kebutuhan untuk makan; membuat aturan atau norma sendiri; tempat tinggal berpindah pindah; menciptakan pekerjaan sendiri; merebut rezeki jika kuat; terpaksa ikut program pemerintah; setia kawan antar gelandangan. Direkomendasikan bagi Dinas Sosial dan Instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, sebagai *policy maker* dalam pembangunan perkotaan untuk tetap mengedepankan pada: Kebutuhan para gelandangan bukan karena kebijakan yang diambil dari keinginan *policy maker*; Memandang gelandangan secara holistik, segala bentuk penanganan yang diberikan harus memandang manusia secara utuh mencakup fisik, psikis dan sosial; Bagi

masyarakat diharapkan dapat memberikan peluang dan menyediakan ruang hidup bagi para gelandangan dalam menjalani kehidupan di kota.

Kata Kunci, survival, gelandangan, perkotaan

Tyas Eko Raharjo F. (B2P3KS Yogyakarta)
Strategi Keluarga Miskin dalam Mengatasi Kemiskinan
Poor Family Strategy to Overcome Poverty
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 139 - 153

This research is a study on the method of poor family home industry workers to fulfill their families needs. Informants in this research are home industry workers. Data are gathered through interview, observation, and documental analysis. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The research findings are that the poor family strategy is a method to fulfill the needs of physical, psychological, and social. The physical need is fulfilled by saving and using local material, and social resources such as working hand-in-hand (gotong royong). Psychological need is fulfilled by going for recreation, meeting together with families, and finding additional work to be acknowledged by people around them, and expressing their ideas in neighbor meeting. Social need is fulfilled by participating in communal activities, such as arisan, family welfare activity, and working hand-in-hand (gotong royong). Can be concluded that with simple strategy poor families are able to overcome their poverty themselves. It is recommended that the Ministry of Social Affairs should prompt local related institutions to guide poor families to benefit potential resources around their existence.

Keywords: Overcoming Strategy-Poor Families-Home Industry

Penelitian ini merupakan studi mengenai cara keluarga miskin pekerja industri rumah tangga (*home industry*) dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga miskin pekerja industri rumah tangga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga miskin pekerja *home industry* mampu mengatasi kemiskinan dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga dengan strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, psikis, maupun sosial. Dalam memenuhi kebutuhan fisik terutama kepemilikan rumah, informan menggunakan strategi menabung dan pemanfaatan bahan bangunan lokal serta kearifan sosial yang ada di lingkungan (gotong royong). Dalam pemenuhan kebutuhan psikis, informan dapat melakukan dengan cara rekreasi secara sederhana dengan berkumpul anggota keluarga, memperoleh pekerjaan tambahan untuk dapat diakui masyarakat dan menyampaikan pendapat dalam acara pertemuan warga. Dalam strategi pemenuhan kebutuhan sosial, informan melakukan dengan cara ikutserta dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan yakni kegiatan arisan PKK dan gotong royong. Disimpulkan, bahwa dengan strategi yang sederhana keluarga miskin mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri. Direkomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial mendorong instansi terkait yang berada di daerah dengan sungguh-sungguh untuk

mendampingi keluarga miskin agar mampu memanfaatkan sumber potensi yang ada di sekitar mereka.

Kata kunci: Strategi Pemecahan-Keluarga Miskin–Home Industry

Achmadi Jayaputra (Puslitbang Kesos Jakarta Timur)
Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang
Home Renovation for Poor Citizen in Padang Municipality
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 154 - 170

The Ministry of Social Affairs holds a Social Rehabilitation Program for the citizens having unadequate home condition for living. The program aimed at the poors by providing assistance in the form of funds Rp 10.000.000,- per family to rehabilitate their homes. The goal of the program is that the poors can improve their own homes in order to meet the health requirements. The implementation of the program activities is to go through the process set out by the guidelines to be followed in some stages. Research locations is chosen purposively in Lubuk Buayo District, Padang. At this location, assistance has been provided to 50 families. Data sources are obtained from the informations of several informants encountered. The research result shows that there are some poor people who can perform these activities in accordance to the stages guided, while some are not able to complete the renovation of the houses. Therefore, the model suggested that home assistance reparation should be provided and based on the situation and condition of the poors participating in the program.

Key words: Home Rehabilitation Assistance-Poor Citizens-Padang Municipality

Kementerian Sosial RI mempunyai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang ditujukan kepada warga miskin dengan memberi bantuan berupa dana berjumlah Rp 10.000.000,- per kepala keluarga (KK). Tujuannya; agar warga miskin dapat memperbaiki rumahnya sendiri supaya memenuhi syarat kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses yang diatur dalam suatu pedoman yang harus diikuti secara bertahap. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Kecamatan Lubuk Buayo, Kota Padang. Di lokasi ini bantuan telah diberikan kepada 50 KK. Sumber data diperoleh dari keterangan dari beberapa informan yang ditemui. Hasil penelitian menunjukkan, ada sebagian warga miskin yang dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai tahapannya. Sementara ada juga yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya. Oleh karena itu disarankan, model pemberian bantuan sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemampuan warga miskin.

Kata Kunci: Bantuan Rehabilitasi Rumah- Warga Miskin-Kota Padang

Sri Kuntari (B2P3KS Yogyakarta)

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti dalam Mengentaskan Korban Penyalahgunaan Napza di Provinsi Bali

The Implementation of Non-Institutional Social Rehabilitation on Raising Drug Abuse Victims in Bali Province

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 171 - 182

Various types of drugs flow through illegally to Indonesia, so that it can be categorized the state is in dangerous condition. Indonesian position has been seen around the world as a state that used to be a place of consumers, then becomes a place of transit and drugs producer, proved by frequent findings of big scale drug producers in several place. The fact is supported by drug abuse data received by Supreme Court that the cases have increased 40 percent only in one year. The increase of drug abusers signs there is a need of an institution to rehabilitate ex drug victims. The government takes a role to help drugs victims through non-institutional social rehabilitation program. The goal of this research is to get a description on its program and to know the handicap and supporting factors of the program on lifting the victims from drugs addiction in Bali Province. This research is done descriptively, the informant (as data resources) are ex-clients and Bali Social Agence apparatus working for drugs victims rehabilitation program. Data are analyzed through quantitative technique. The research finds that the rehabilitation is implemented as non-institution regulation, and in the process of rehabilitation the victims are given social, mental, skills guidance and health check-up. The success of rehabilitation can be seen from the working togetherness between related agencies and non-governments organizations, and its continuity in guiding ex-victim in Joint Business Group (Kube). The handicap is found in the lack of ex-victims working spirit, and their lives styles are difficult to be motivated to chance. There by, to increase clients enthusiasm to follow the rehabilitation activities, the kinds of skill given should be updated as market needs, so that kube can be developed and ex-clients will not relaps, it needs continuos monitoring.

Keywords: Social Rehabilitation-Drugs Abuses-Non-institution

Berbagai jenis napza mengalir deras ke Indonesia, sehingga negara dapat dikategorikan dalam kondisi bahaya napza. Posisi Indonesia menjadi sorotan dunia karena yang semula menjadi konsumen, kemudian menjadi tempat transit dan produsen napza, terlihat di berbagai tempat ada pabrik napza dalam skala besar. Kenyataan ini semakin diperkuat oleh data perkara penyalahgunaan napza yang diterima Mahkamah Agung meningkat 40 persen hanya dalam satu tahun. Peningkatan jumlah penyalahgunaan napza mengisyaratkan adanya kebutuhan institusi untuk melakukan proses rehabilitasi bagi penyalahguna napza. Pemerintah mengambil peran membantu pecandu napza dengan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di luar panti. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dalam mengentaskan korban penyalahgunaan napza, lokasi penelitian di Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, informan adalah mantan klien dan aparat Dinas Sosial Provinsi Bali yang menangani rehabilitasi korban penyalahgunaan napza luar panti. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan rehabilitasi sudah sesuai dengan pedoman rehabilitasi sosial secara luar

panti, dalam proses rehabilitasi dilakukan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan pemeriksaan kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dapat terlihat dari adanya dukungan dan kerjasama antarsektor dan LSM peduli napza, dan keberlangsungan kegiatan Kube mantan klien. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya etos kerja dan sikap mental yang sulit diberi motivasi untuk berubah. Oleh karena itu, agar klien antusias dalam mengikuti kegiatan, jenis keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, agar Kube dapat berkembang dan mantan klien tidak *relaps*, sehingga perlu dilakukan monitoring secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial-Napza-Luar Panti

Akhmad Purnama dan Murdiyanto (B2P3KS Yogyakarta)
Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam
Studi Kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura
Aid Distribution for Natural Disaster Victims
A Case Study on Natural Disaster Victims Rehabilitation in Jayapura Municipality
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 183 - 196

Appropriate natural disaster victims aid distribution is an effort to reduce more victims, the problem of aid distribution are so many refugees camps and coordination among command posts. In an effort to know aid distribution, especially in Jayapura Municipality, this research is done. The research question is how aid distribution for natural disaster victims implemented and what are the supporting and handicap factor in this distribution? The answer is the goal of the research. The research location is ditermined purposively based on its most natural disaster happening frequency, sort of earthquake, flood, landslide, and tsunami. Information resources (informant) taken from distribution aparatus, victims, and people who know directly on natural disaster. Informants are choosen purposively with the4 cosideration that those know well about disaster in their place and having formal and informal competency in the case. Date are gathered through interview, observation, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analysed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the implementation of natural disaster aid distribution is done swiftly, because of many supports from natural disaster prevention, social, health, military district, police district, ready disaster youth, and volonteers in under district, district, municipality, and province level that are implemented well and solidly. The handicap factors are the unadequate of land and water transportation devices that make the distribution arriving late. Aid distribution mostly fulfilled, such as health services, home and environmental rehabilitation, working and bussines rehabilitation. One that is unfulfield yet is the living resources of fishermen, such as boat for fishing as dailly lives resouces. It is recommended that transportation devices should be completed both for land and water needs, so that rehabilitation program can be fully realized for the victims that mostly fishermen to activate their work to fulfilled their daily lives needs.

Keywords: Aid Distribution-Natural Disaster-Victims

Penyaluran bantuan korban bencana alam yang tepat merupakan usaha untuk mengurangi korban yang lebih banyak, permasalahan penyaluran bantuan di antaranya

adalah banyaknya titik pengungsi dan masih kurangnya koordinasi antarposko. Dalam upaya untuk mengetahui penyaluran bantuan korban bencana alam, khususnya di Kota Jayapura, perlu dilakukan penelitian ini. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran bantuan korban bencana alam dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam? Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu berdasarkan tingkat keseringan terjadinya bencana alam, baik gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun tsunami. Sumber informasi diambilkan dari orang (informan) yang mengetahui dan menjadi pelaku langsung distribusi bantuan, serta dari korban langsung bencana alam. Pemilihan informan ditentukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui kejadian bencana alam dan memiliki kompetensi, baik secara formal maupun informal dalam penanganan bencana alam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui panduan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan korban bencana alam dapat berjalan dengan lancar, berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah terjalin cukup solid, baik pihak BPBD provinsi maupun kota, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, kodim, kepolisian, Tagana, distrik, kelurahan, maupun sukarelawan. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan bantuan kebutuhan korban bencana alam adalah terbatasnya alat transportasi (darat dan air), sehingga seringkali pemberian bantuan mengalami keterlambatan sampai di daerah korban bencana. Penyaluran bantuan korban bencana alam sebagian besar sudah dapat terpenuhi, seperti kebutuhan hidup korban (tanggap darurat), pelayanan kesehatan, rehabilitasi tempat tinggal, rehabilitasi lingkungan, dan rehabilitasi kerja dan usaha, walaupun ada sebagian kecil yang belum dapat terealisasi karena keterbatasan dana bantuan, seperti kapal penangkap ikan yang biasanya dipakai sebagai sarana memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Disarankan agar ketersediaan transportasi dapat tercukupi, sehingga bantuan dapat cepat sampai korban bencana. Di samping itu, penyaluran bantuan korban yang berupa rehabilitasi kerja dan usaha secepatnya dapat terealisasi, mengingat bahwa peralatan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali matapencaharian mereka sebagai nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci: Penyaluran Bantuan-Bencana Alam-Korban

Siti Aminatun (B2P3KS Yogyakarta)

Peran Nurani Astra dalam Penanganan Korban Bencana Alam

The Role of *Nurani Astra* on Natural Disaster Victims

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 197 - 206

Astra International Limited social responsibility is corporation commitment through putting aside some of its profit for people-in-need social welfare professionally. This study is to describe on several efforts that have been done by Nurani Astra to give social service for natural disaster victims. The approach of the study is descriptive. Data are gathered through interviews and documentary analysis. The study finds that Astra International Limited, through Nurani Astra Program, has done a lot for corporate social responsibility (CSR) through fund distribution. The program reaches directly natural disaster victims through emergency funding, food, and beverage needed by the victims. CSR through

Nurani Astra is continued in reconstruction and rehabilitation phases at the effected areas. The program is stated as a vision of Astra International Limited, as a will and philosophy, that the existence of Atra International limited is not just profit oriented but also giving benefit and added value for the nation through economy, social, an environment contribution. Based on the study is recommended that social corporate responsibility should be developed and spreaded out for the people in need, especially CSR from the financially capable.

Keywords: CSR-Disaster Victims-Social Commitment

Tanggung jawab sosial PT Astra International Tbk merupakan bentuk kepedulian perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang tepat dan professional. Pengkajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang berbagai upaya penanganan korban bencana alam yang dilaksanakan oleh Nurani Astra. Pengkajian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada PT Astra International Tbk serta dengan memanfaatkan dokumen terkait. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk melalui program Nurani Astra peduli bencana telah banyak berbuat dengan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Program Nurani Astra peduli bencana menjangkau langsung korban bencana alam mulai dari sumbangan tahap darurat begitu terjadi bencana dengan menyalurkan bantuan makanan minuman yang berhubungan erat dengan kebutuhan korban. Kegiatan peduli bencana melalui program Nurani Astra berlanjut pada tahap proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tahap ini dilakukan dengan menjangkau langsung ke daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam. Melalui program Nurani Astra peduli bencana perusahaan telah menetapkan visi mengenai tanggung jawab sosial dan hal ini sudah menjadi tekad dan filosofi perusahaan bahwa keberadaan Astra tidak hanya profit namun juga berkeinginan memberi manfaat dan bisa memberi nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa melalui kontribusi positif pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut di atas direkomendasikan bahwa *Corporate Social Responsibility* dari dunia usaha melalui kepedulian sosial yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan perlu terus digalang dan dipupuk sebagai bentuk kontribusi secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat dari pihak yang berkemampuan secara financial.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan - Korban Bencana - Kepedulian Sosial

Ahmad Cahyadi, Wahyu Hidayat, dan Wulandari (Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) Adaptasi Masyarakat terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta

Community Adaptation on The Limitations of Water Resources in Pramuka Island, Seribu Islands, DKI Jakarta

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 Juni 2013, hal 207 - 214

The Development of small islands is often constrained by the limitations of water resources. This condition is caused by a wide catchment is limited, and the influence of sea water on the groundwater which causes the amount of groundwater is limited. This

paper aims to determine the form of adaptation to limited water resources in Pramuka Island, Seribu Islands regency, DKI Jakarta. The results showed that the shape adaptation to limited water resources such as rain water harvesting, bring bottled water from outside the island, as well as using technology osmosi reverse to get clean water. The community adaptation is threatened not sustainable because the poor condition of the groundwater in Pramuka Island. Therefore, it is necessary to the management of water resources by maximizing the infiltration of rain water, solid dan water waste management, as well as set the maximum extraction of groundwater.

Keywords: Community Adaptation, Water Resources Limitations, Pramuka Island

Pembangunan pulau kecil seringkali terkendala dengan kondisi keterbatasan sumberdaya air. Kondisi ini disebabkan oleh luas tangkapan air yang terbatas, serta pengaruh air laut pada air tanah yang menyebabkan jumlah air tanah terbatas. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumberdaya air di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumberdaya air berupa pemanfaatan air hujan, mendatangkan air kemasan dari luar pulau, serta menggunakan teknologi *reverse osmosi* untuk mendapatkan air bersih. Bentuk adaptasi ini terancam tidak berkelanjutan mengingat semakin buruknya kondisi air tanah di Pulau Pramuka. Oleh karena itu, maka diperlukan pengelolaan sumberdaya air dengan memaksimalkan resapan air hujan, pengelolaan sampah dan limbah, serta mengatur jumlah maksimum ekstraksi air tanah.

Kata Kunci: Adaptasi, Keterbatasan Sumberdaya Air, Pulau Pramuka

Link and Match Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Social Welfare Services Research and Development's Link and Match

Mumu Suherlan

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta,
Kementerian Sosial RI. Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Nitipuran, Yogyakarta. Email: mumusuherlan@gmail.com.
Diterima 3 Mei 2013, disetujui 17 Juni 2013.

Abstract

The Ministry of Social Affairs as the main actor on social welfare services should provide appropriate social policies to overcome the current social problems. Research and development is a bridge to reach social welfare services effectiveness and efficiency. The linkage of research and development products and their applications by operational programs of social services should be established as good as possible in order to build proportional qualified interactive suitability, it's called as link and match between research and development products with the absorbance ability of operational unit. B2P3KS as a research and development organization of social welfare services models maker should refers problems and strategic issues to policy level that faced by operational units. Moreover, research and development also should refers problems and strategic issues to empirical level. Through link and match concept, research and development products are expected to able to solve and overcome social problems and increase social welfare.

Keywords: *Social Welfare Services-Link and Match-Research and Development*

Abstrak

Kementerian Sosial RI sebagai pelaksana utama pelayanan kesejahteraan sosial harus menyediakan kebijakan sosial yang tepat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian dan pengembangan merupakan jembatan untuk mencapai pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara hasil penelitian dan pengembangan dengan aplikasinya haruslah dibangun sedemikian rupa untuk membentuk kesesuaian interaktif yang tepat dan berkualitas, inilah yang kemudian disebut dengan *link and match* antara hasil penelitian dengan daya serap unit operasional. B2P3KS sebagai lembaga penelitian dan pengembangan penyusun model pelayanan kesejahteraan sosial harus merujuk masalah dan isu strategis pada level kebijakan yang dihadapi unit operasional serta pada level empirik. Melalui konsep *link and match*, hasil penelitian dan pengembangan diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Link and match-Penelitian dan Pengembangan-Pelayanan Kesejahteraan Sosial*

A. Pembangunan Sosial

Prioritas pembangunan dirumuskan melalui proses panjang pemikiran perumusan kebijakan yang tentu mempertimbangkan kearifan masyarakat. Suatu kebijakan yang dibuat oleh organisasi adalah satu cara untuk mengurai permasalahan yang ada dan tentunya dibutuhkan data yang rasional, matang dan akurat. Pengambilan kebijakan melalui bukti berbasis penelitian kini makin diminati. Selain lebih memberikan gambaran faktual mengenai permasalahan yang terjadi, juga lebih memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka.

Namun banyak hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan kebijakan berbasis penelitian, yaitu cara memastikan hasil penelitian dapat diakses oleh para pelaku kebijakan dan digunakan secara lebih efektif karena tidak mudah menjembatani pemikiran pengambil kebijakan dengan peneliti. Kedua elemen ini dipengaruhi dan dilatarbelakangi banyak hal yang berbeda, misalnya nilai, struktur kekuasaan, dan struktur kelembagaan. Oleh karena itu, mengurangi kesenjangan antara penelitian dan kebijakan menuntut tak hanya cara efektif pemanfaatan penelitian tetapi juga cara perumusan kebijakan.

Masalah sosial tidak lagi sederhana. Masyarakat yang dinamis dan selalu berubah membuat masalah sosial juga berkembang. Kemiskinan, pengangguran, kecacatan, *trafficking*, *cyber-crime* hingga masalah budaya seperti perceraian, kriminalitas remaja, dan ketidakdisiplinan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan penelitian yang tidak akurat dan tidak lengkap. Pelibatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan dalam segala bidang merupakan hal yang mutlak dilakukan apabila bangsa kita memiliki keinginan kuat untuk mengubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik dan kondusif, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Meskipun upaya peningkatan kualitas penelitian makin santer terdengar, tetapi realitas dorongan dan upaya meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dinilai masih berproses

secara lamban, baik secara fungsional maupun institusional.

Pemerintah sudah sepantasnya mendorong terciptanya kondisi yang kondusif bagi munculnya penelitian yang berkualitas, terlebih di era keterbukaan berbagai jenis kebijakan pemerintah memang seharusnya mempunyai pijakan kuat yang idealnya berbasiskan hasil penelitian, dengan demikian pengambilan keputusan didasari bukti dan analisis penelitian. Demikian halnya penyelenggaraan kebijakan dan strategi dituntut untuk dapat menampung aspirasi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan sosial, kehidupan yang demokratis dengan nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjamin perlindungannya.

Kementerian Sosial RI sebagai pelaksana utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial, harus memberikan kebijakan sosial yang mampu mengatasi permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian dan pengembangan (litbang) merupakan jembatan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan kesejahteraan sosial. Keberhasilan penanganan permasalahan sosial banyak ditentukan oleh seberapa besar peran dan kontribusi penelitian dan pengembangan dalam berbagai bentuk. Formulasi hasil penelitian dapat berupa konseptualisasi model dan juga aplikasi model penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Pertautan hasil litbang dengan aplikasinya melalui program operasional harus terjalin sedemikian rupa sehingga membentuk kesesuaian interaktif yang proporsional dan berkualitas, yang kemudian disebut sebagai konstruksi *link and match* antara hasil litbang dan daya serap unit operasional.

B. Kebijakan Sosial sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan sosial didefinisikan secara berbeda oleh beberapa tokoh seperti Marshall, Rein, Hutman, dan Hill. Marshall mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan

warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial. Menurut Rein, kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.

Magil mendefinisikan kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik yang meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk tujuan sosial. Spicker menyatakan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan, baik dalam arti luas yang menyangkut kualitas hidup manusia maupun dalam arti sempit yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat. Bessant, Watts, Dalton dan Smith mengungkapkan bahwa kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program tunjangan sosial lain.

Dari semua definisi tersebut, kebijakan sosial merujuk pada tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tunjangan-tunjangan sosial. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan pengembangan (developmental), sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warga. Secara garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial dan sistem perpajakan. Berdasarkan kategori tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum atau peraturan yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial.

Peran pemerintah diuji melalui kebijakan sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat yang terdiri atas beberapa dimensi dasar kebijakan sosial, yaitu redistribusi kekayaan, kebebasan, perlindungan risiko,

keselamatan publik, dan pelayanan sosial. Berbagai dimensi tersebut yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Dalam konstelasi kebijakan dan praktik, diperlukan *link and match* antara landasan konstitusi, kebijakan sosial pada tingkat makro, program atau praktik aktual pada tingkat mikro.

C. Link and Match dalam Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Peran penelitian dan pengembangan (litbang) sangat menentukan bagi terciptanya sebuah kebijakan yang *responsive* terhadap kebutuhan peningkatan kesejahteraan sosial. Litbang juga dapat memperkecil terjadinya paradigma aksi reaksi, yaitu para pengambil kebijakan merumuskan, membuat, dan menetapkan kebijakan, tetapi tanpa terlebih dulu melakukan pengkajian sehingga mungkin saja tidak memperhitungkan sebab timbulnya masalah tersebut serta efek turunan yang mungkin akan timbul.

Lembaga litbang, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, telah menyusun rencana tindak (*scenario planning*) terhadap masalah yang ada bahkan memberikan prediksi dan solusi pemecahannya. Namun skenario ini terkadang tidak dipakai, dalam arti kegiatan penelitian hanya berhenti sampai penelitian tetapi tidak dilanjutkan dengan pengembangan kebijakan yang disusun. Sebaliknya, kebijakan yang disusun sering tidak didasari hasil penelitian, terkesan disusun berdasar kejadian sesaat (*by accident*) bukan merupakan sebuah kajian yang matang dan didasari perencanaan dan litbang yang baik (*by design*).

Oleh karena itu, di beberapa organisasi, peran penelitian selalu disandingkan dengan pengembangan. Penelitian dan pengembangan dalam garis besarnya mempunyai dua arti penting yaitu penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*inovation*). Kemajuan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat tidak terlepas dari peranan penelitian dan pengembangan. Kedua kata ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait. Sebuah penelitian dalam pemecahan

secara ilmiah harus melakukan pengembangan dan perbaikan, sebaliknya, pengembangan haruslah didasari pemikiran ilmiah.

Dalam memecahkan dan mengatasi permasalahan sosial dan isu strategis yang berkembang di masyarakat, diperlukan kebijakan sosial. Proses penyusunan kebijakan sosial haruslah melalui penelitian sosial yang menemukan (*discovery*) permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga mencari solusi (*solue*). Untuk mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dan terselesainya masalah sosial di Indonesia melalui perumusan kebijakan dan program serta model penanganan masalah sosial, Kementerian Sosial RI melaksanakan dua jenis penelitian:

1. Penelitian Kebijakan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dalam lingkup kebijakan sosial, dengan melakukan perumusan naskah kebijakan sosial dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Penelitian Terapan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan sosial melalui pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dalam lingkup pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial, dengan melakukan perumusan naskah hasil uji coba model dalam lingkup pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sosial, Kementerian Sosial RI memiliki tiga lembaga penelitian dengan diferensiasi kegiatan penelitian:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, berfokus pada penelitian kebijakan makro yang meliputi sistem perundangan dan sistem perpajakan yang kemudian menghasilkan formulasi kebijakan penanganan permasalahan sosial;
2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, berfokus pada perumusan dan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial (UKS, Program, dan Intervensi) dalam tataran

mikro, dan akhirnya menghasilkan model pelayanan kesejahteraan sosial;

3. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, berfokus pada pengembangan konseptual/ *framework* (teori dan praktik pekerjaan sosial) yang menghasilkan kerangka kerja praktik pekerjaan sosial.

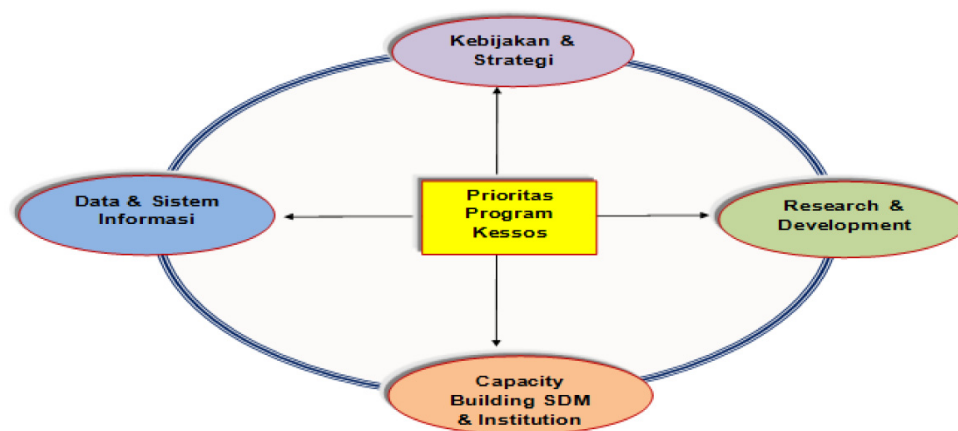
Ketiga lembaga ini bersinergi dalam rangka mengungkap berbagai fenomena dan memberi analisis terhadap berbagai pertanyaan terkait penanganan masalah sosial. Ketiganya bersinergi dalam rangka memberi dasar pijakan yang jelas bagi terciptanya model penanganan masalah sosial yang *up to date*. Proses perumusan kebijakan sosial dalam rangka penanganan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial mengharuskan adanya kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas teknis, pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan perguruan tinggi untuk optimalisasi hasil yang dicapai. Sinergitas juga dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan data dan sumber daya yang diperlukan dalam proses penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial.

Konstruksi *link and match* antara kegiatan penelitian dan pengembangan dengan kegiatan operasional dalam rangka penanganan PMKS secara optimal ini ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (Badiklitkessos) dengan dicanangkannya sebagai salah satu kebijakan atau strategi dalam menciptakan sinergi antara kegiatan penelitian (yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badiklitkessos) dengan kegiatan unit operasional di lingkungan Kementerian Sosial RI. Implikasi dari penerapan kebijakan *link and match* ini adalah bahwa riset yang dilakukan oleh Badiklitkessos hendaknya relevan dengan kebutuhan unit operasional sehingga hasilnya dapat diterapkan secara optimal. Sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan Badiklitkessos hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan. Dengan kalimat lain, kebijakan yang dicanangkan oleh unit operasional hendaknya berbasis hasil riset. Secara internal kebijakan *link and match* ini diterapkan terhadap 13 Satker yang ada di bawah Badiklit Kesos dan secara eksternal kebijakan ini disosialisasikan terhadap semua unit operasional di Kementerian Sosial RI.

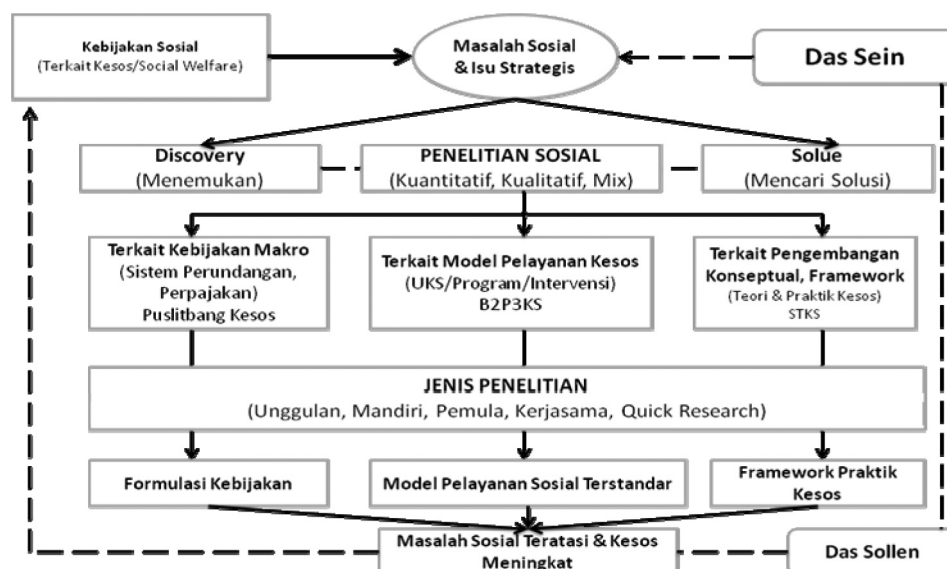
Strategi umum *link and match* yang dilontarkan Menteri Sosial dan ditindaklanjuti Badiklitkessos ditunjukkan pada Gambar 1, sedangkan proses *link and match* dalam lingkup tugas penelitian dan pengembangan di Badiklitkessos dalam rangka penanganan permasalahan sosial ditunjukkan pada Gambar 2.

D. *Link and Match* dalam Eksistensi B2P3KS sebagai Perumus Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta merupakan salah satu lembaga penelitian di lingkungan Kementerian Sosial RI yang ada di daerah. Keberadaan B2P3KS sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam menjamin kepentingan masyarakat



Gambar 1.
Strategi Membangun Link and Match (Hikmat, 2012)



Gambar 2.
Proses Link and Match dalam Lingkup Tugas Penelitian dan Pengembangan Badiklitkessos, Kementerian Sosial RI

melalui penyediaan pelayanan publik yang tidak dapat disediakan oleh organisasi swasta secara profesional, akuntabel, dan transparan. Sebagai suatu lembaga penelitian terapan yang menghasilkan model-model pelayanan kesejahteraan sosial dan rekomendasi kebijakan pada Menteri Sosial RI dan unit teknis di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, B2P3KS mendasarkan diri pada prinsip formulasi kebijakan dalam pelaksanaan berbagai tugas, yakni terarah pada pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan oleh unit teknis untuk menangani permasalahan PMKS dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Perhatian utama dalam lembaga penelitian perumus kebijakan publik terletak pada identifikasi berbagai permasalahan serta pengembangan berbagai alternatif upaya pemecahan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kerangka teori, analisis, serta nilai yang dianut oleh *policy maker* dan cara pandang *stakeholders* terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas. Perumusan kebijakan publik menekankan pada aktor yang terlibat, pola interaksi di antara aktor-aktor yang terlibat, dan sumber daya yang dimiliki aktor-aktor tersebut.

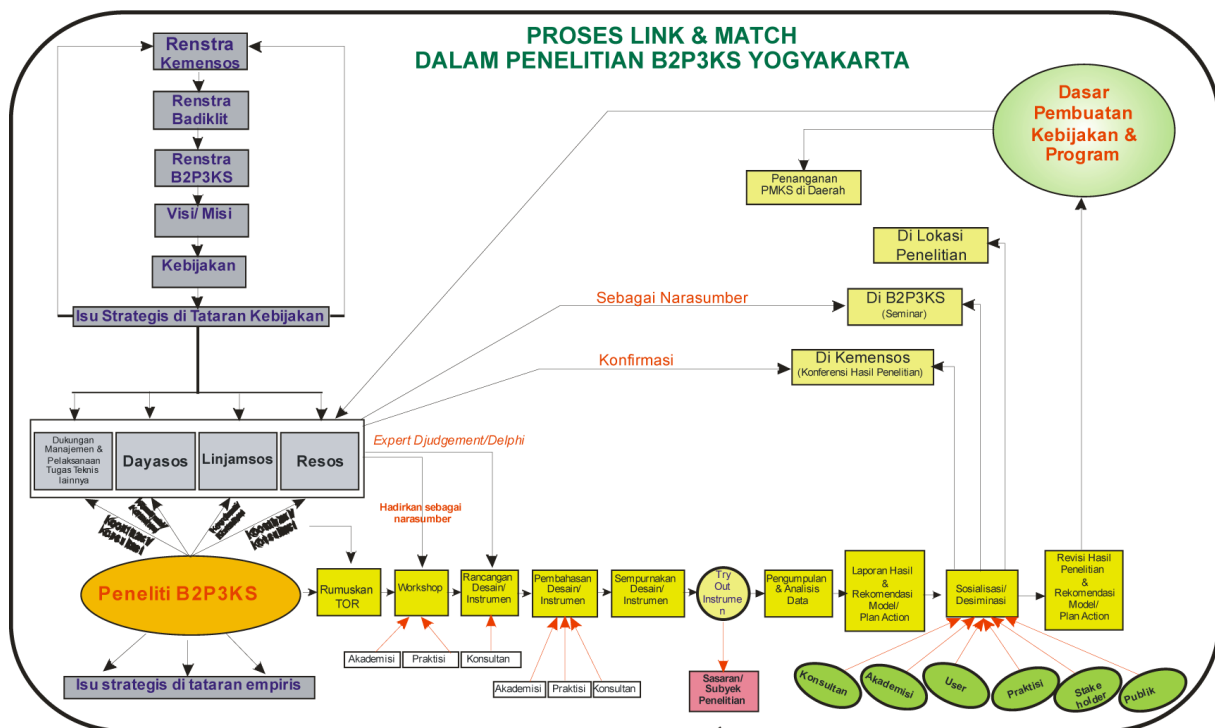
Terkait dengan dibutuhkannya model-model pelayanan kesejahteraan sosial terstandar dalam rangka penanganan PMKS yang semakin berkembang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, dapat dipenuhi apabila B2P3KS dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial RI no 57/HUK/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja B2P3KS yang menyebutkan, bahwa tugas pokok B2P3KS adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial. Sedangkan fungsi spesifik B2P3KS adalah melakukan standarisasi dan sosialisasi sistem pelayanan kesejahteraan sosial. Sistem pelayanan kesejahteraan sosial sendiri pada hakikatnya terdiri dari enam komponen : (1) Prosedur pelayanan kesejahteraan sosial, (2) Sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, (3) Waktu pelayanan kesejahteraan sosial, (4) Biaya pelayanan kesejahteraan sosial, (5) Kompetensi petugas pelayanan

kesejahteraan sosial, dan (6) Produk pelayanan kesejahteraan sosial.

Atas dasar acuan hukum tersebut, B2P3KS bertugas untuk melaksanakan *research & development* yang hasilnya menjadi dasar bagi upaya penyusunan dan pengembangan kebijakan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan kalimat lain, berbagai informasi yang sangat diperlukan para penyusun kebijakan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dihasilkan melalui *research and development* dengan karakteristik yang spesifik. Terkait proses *link and match* dalam penelitian B2P3KS dapat ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 2 menjelaskan, bahwa penelitian yang dilaksanakan oleh B2P3KS mengacu pada permasalahan dan isu-isu strategis di level kebijakan yang dihadapi oleh (atau menjadi kebutuhan) unit operasional, yaitu Dirjen Dayasos, Dirjen Linjamsos, Dirjen Dayasos dan dukungan manajemen lainnya. Di samping itu, penelitian yang dilaksanakan juga mengacu pada masalah atau isu strategis yang berkembang di tataran empiris. Dari hasil *need assessment* kebutuhan penelitian di unit teknis dan kajian empiris yang dilakukan, peneliti merumuskan *term of reference (TOR)* penelitian. Pada tahap selanjutnya dilakukan *workshop* dengan menghadirkan *expert* dari unit operasional sebagai narasumber, konsultan dari perguruan tinggi dan praktisi dari lapangan (calon lokasi penelitian). *Workshop* yang dilakukan memberikan masukan yang cukup komprehensif bagi para peneliti, baik secara konseptual maupun secara praktis tentang masalah/isu yang diangkat dan kemudian dituangkan dalam desain dan instrumen penelitian.

Khusus untuk penelitian unggulan, metode yang diterapkan adalah *research and development (R&D)* dan bersifat *multiyears*. Dengan metode ini, maka dalam penyusunan instrumen penelitian dilakukan *expert judgement* dengan teknik *Delphi* atau *focus group discussion*. Dalam rangka memperoleh instrumen yang *valid* dan *reliable* sebagai alat pengumpul data, dilakukan *try out instrument*. Atas dasar hasil *try out* dapat ditetapkan instrumen baku yang akan digunakan dalam pengumpulan



Gambar 3
Aplikasi Link and Match dalam Penelitian B2P3KS

data. Selanjutnya setelah pengumpulan data, dilakukan pengolahan dan analisis data, kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan hasil penelitian.

Sebagai klarifikasi dengan unit teknis dan berbagai pihak terkait, hasil penelitian dipaparkan dalam konferensi hasil penelitian di Jakarta dengan difasilitasi oleh Badiklit Kesos. Hasil penelitian juga diseminarkan di B2P3KS dengan menghadirkan unit teknis sebagai salah satu pembahas di samping konsultan dan praktisi. Hasil penelitian berupa *prototype model* pelayanan kesejahteraan sosial kemudian disosialisasikan di daerah untuk memperoleh masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan. Hasil penelitian pada tahun pertama ini menjadi bahan untuk melakukan ujicoba model, baik dalam lingkup terbatas maupun dalam lingkup luas, yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

E. Gagasan Akhir

Munculnya konsep *link and match*, menunjukkan adanya perubahan dan pergeseran, *rising demand* (tuntutan yang berkembang) dari masyarakat terhadap jumlah, mutu, jenis, dan kualifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan. Perubahan, pergeseran, dan pertambahan tuntutan merupakan akibat langsung dari perkembangan dan pemekaran pengalaman manusia, khususnya dalam era teknologi informasi modern. Kebutuhan hidup, permasalahan, dan dinamika masyarakat yang makin berkembang menyebabkan kebutuhan akan pelayanan kesejahteraan sosial juga berubah dan berkembang. *Link and match* juga dibutuhkan sebagai upaya menjembatani kebutuhan program layanan unit teknis pelaksana pelayanan dengan penyedia program layanan kesejahteraan sosial. Sinergitas di dalam lembaga penelitian dan pengembangan itu sendiri juga dibutuhkan terutama dalam rangka perencanaan kebutuhan model pelayanan kesejahteraan sosial yang factual dan actual

serta penyediaan sumber daya manusia dalam mewujudkan hasil penelitian yang tepat sasaran dan bermanfaat.

Pentingnya kegiatan penelitian dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial membuat B2P3KS memerhatikan pengembangan aspek keilmuan, isu strategis, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan juga kelembagaan. Oleh karena itu, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) B2P3KS Yogyakarta menjadi hal yang penting dilakukan, mengingat lembaga ini mempunyai tugas yang spesifik dan strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Di samping itu, perubahan SOTK akan terus bergulir sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, dinamika politik, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang keseluruhannya menuntut ke arah yang lebih baik.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Amin M. 1996. *Perspektif "Link and Match" Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Agama Islam (Rekonstruksi atas Tinjauan Metodologi Pembudayaan Nilai-nilai Keagamaan)*. JPI. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UII.
- Anonim, Keputusan Menteri Sosial RI No. 57/HUK/2003 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* di Yogyakarta.
- Anonim, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 76/HUK/KEP/XII/1984 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)* di Yogyakarta.
- Anonim, Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/Huk tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
- Anonim, Peraturan Pemerintah RI nomor 102 tahun 2000 tentang *Standardisasi Nasional*
- Anonim, Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I* Kementerian Negara;
- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967).
- Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Anonim, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Otonomi Daerah* (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
- Dunn, William, N. (1981). *Public Policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Etzioni, Amitai. (1985). *Organisasi-Organisasi Modern*, penerjemah Suryatim, Jakarta: UI Press.
- Gall, M.D, Gall, J.P, & Borg, WR. (1983). *Educational Research*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Habibullah. 2010. *Definisi Kebijakan Sosial*. kebijakansosial.wordpress.com/2010/01/29/definisi-kebijakan-sosial/. Diakses tanggal 18 April 2013
- Hikmat, Harry. (2012). Arah Kebijakan dan Program Diklat dan Litbang, Disampaikan pada Musrenbangkesos Tahun 2013 Tanggal 10-13 Juli 2012, Jakarta
- Interplan (*The International Group for Studies in National Planning*). (1969). *Appraising Administrative Capability for Development*, New York: United Nations.
- Kurt Lewin. (1951). *Field Theory in Social Science*.
- Lasswell, Harold, (1971). *A Pre-View of Policy Sciences*, New York: American Elsevier Publishing, Company.
- Majalah Astek, edisi bulan Mei 1991.
- Nehru, Jawaharlal. (2009). *India Perspectives*, Koran Kompas tanggal 25 Februari 2009
- Quade, E.S. (1975). *Analysis for Public Decisions*, New York: American Elsevier Publishing, Company.
- Rossi, Peter H. And Freeman, Howard E (1985). *Evaluation A Systematic Approach*, Third Edition, Beverly Hills, California 90212: Sage Publications, Inc.
- Wahono, (1996). *Peningkatan Kualitas Tenaga Peneliti*, Bahan Ceramah pada Rapat Konsultasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, April 1996, Jakarta: LIPI.

Strategi Survival Gelandangan di Kota Manado *Homeless Survival Strategy in Manado Municipality*

Tateki Yoga Tursilarini

Peneliti Madya B2P3KS Yogyakarta. Kantor: Jl. Kesejahteraan Sosial No 1, Yogyakarta.

Telpon (0274) 337265, Faximile (0274) 373530. E-mail: tursilarini@gmail.com.

Diterima 18 Maret 2013, disetujui 12 April 2013.

Abstract

The existence of homeless in municipal society is unwanted, they are identical with group which is difficult to be arrange, has their own value, and having rather negative attitude. The research is to describe factors they become ..and several strategies they can survive living in the city. Data resources are gathered from homeless, related institution committing in homeless such as social agencies (municipality and province), police office, Pelita Kasih Non-government Organization, and Commision for Children Protection. Data are gathered through interview, focus group discussion, observation, and documentary analysis techniques. Data gathered are analyzed through qualitative and quantitative techniques. The factors they become homeless are caused by selves internal conditions, such as physical, visional, and leprousy handicap. The external factors are family conflict, economic presure, educational and skill limited. The homeless hold several strategies, sort of luring compasionate, feeling enough to eat, set their own value and norm, change their place every time, create their own job, snap the chance if it is possible, follow government program, and solidarity among them. It is recommended that social agency and related institutions under local government, as policy makers, should put forward: the homeless social needs based on their own, looking homeless wholly as humankind from physical, psichological, and social aspect to develop municipality as a whole community. For the people around the homeless are expected to give chance and room for the homeless existence.

Keywords: Survivalization-Homeless-Municipality

Abstrak

Keberadaan gelandangan di lingkungan masyarakat perkotaan tidak dikehendaki, mereka identik dengan kaum yang tidak dapat diatur, memiliki aturan sendiri, berperilaku cenderung negatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab menjadi gelandangan dan beberapa strategi gelandangan agar tetap bertahan hidup di kota. Sumber data diperoleh dari gelandangan, instansi terkait dalam penanganan gelandangan seperti Dinas Sosial (Propinsi dan Kota), Kepolisian, LSM Pelita Kasih, Komisi Perlindungan Anak. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumen. Data terkumpul dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Faktor-faktor penyebab menjadi gelandangan karena faktor intern yang berasal dari diri pribadi, cacat fisik, tunanetra, penyakit kusta/lepra. Faktor ekstern karena konflik keluarga, tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, tidak ada pilihan pekerjaan, diterlantarkan oleh keluarga. Gelandangan berusaha menerapkan beberapa strategi bertahan hidup di kota, seperti menarik rasa iba; hanya memenuhi kebutuhan untuk makan; membuat aturan atau norma sendiri; tempat tinggal berpindah pindah; menciptakan pekerjaan sendiri; merebut rezeki jika kuat; terpaksa ikut program pemerintah; setia kawan antar gelandangan. Direkomendasikan bagi Dinas Sosial dan Instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, sebagai *policy maker* dalam pembangunan perkotaan untuk tetap mengedepankan pada: Kebutuhan para gelandangan bukan karena kebijakan yang diambil dari keinginan *policy maker*; Memandang gelandangan secara holistik, segala bentuk penanganan yang diberikan harus memandang manusia secara utuh mencakup fisik, psikis dan sosial; Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan peluang dan menyediakan ruang hidup bagi para gelandangan dalam menjalani kehidupan di kota.

Kata Kunci: survival, gelandangan, perkotaan

A. Gelandangan di Tengah-Tengah Masyarakat Kota

Dalam kurun waktu dua sampai tiga dekade terakhir ini, fenomena gelandangan di kota Manado sebagai kota paling ujung di Pulau Sulawesi, semakin meresahkan masyarakat. Terbukti di kota tersebut mulai menunjukkan peningkatan kuantitas gelandangan dan secara kualitas ada kecenderungan bentuk/modus operandi sama seperti di kota-kota besar di Pulau Jawa, diantaranya ada indikasi keterlibatan orang-orang tidak bertanggungjawab mengorganisir keberadaan mereka. Keberadaan mereka dapat dijumpai di daerah pusat kota, lampu merah, di jalan Sam Ratulangi, di sepanjang Boulevard banyak ditemui gelandangan sebagai pengemis berkeliranan sehingga keberadaan mereka mulai mengganggu aktivitas warga kota Manado.

Media massa di Manado seperti Manado Post, Lintas Berita Kota dan Antara memberitakan permasalahan gelandangan dan pengemis karena mulai mengganggu kenyamanan warga masyarakat kota Manado. Sejumlah berita dan artikel yang dimuat di beberapa media cetak di Manado, antara lain "Dinsos Kota Manado merazia puluhan Gepeng yang berkeliranan di pusat kota" ; "Dinsos Kota Manado mulai melakukan penertiban terhadap 77 gelandangan yang berkeliranan di pusat kota"; "Jelang Sail Bunaken Dinsos Manado melatih Tuna Netra bermain musik"; "Dinsos-Pol PP tertibkan Gepeng" ; dan "Gepeng di Manado akan Terus Ditertibkan".

Berbagai berita tersebut mengisyaratkan masalah gelandangan yang mulai muncul akhir-akhir ini, harus segera mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari semua elemen masyarakat. Pemerintah Daerah mulai merespon permasalahan tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) di kota-kota besar yang mengatur tentang penanganan gelandangan, diantaranya pemerintah kota Jakarta, Manado, Medan, Makasar dan sebagainya. Akan tetapi penanganan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi masalah gelandangan, karena masalah urbanisasi tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota saja akan tetapi harus melibatkan Pemerintah

Daerah khususnya daerah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan atau daerah-daerah tidak subur serta jumlah warganya menjadi kaum migran yang terbanyak.

Kota disatu sisi masih membutuhkan tenaga-tenaga kasar seperti buruh, tukang becak, pemulung, dan pekerja di sektor informal (pengasong) guna mendukung perkembangan pembangunan kota. Namun di sisi lain tidak semua pendatang memiliki nasib yang baik di kota, dalam kenyataannya banyak yang tidak bisa *survive* hidup di kota bahkan hidup menggelandang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Pada akhirnya membangun pemukiman liar di mana-mana sehingga memicu timbulnya masalah sosial baru yang akan menjadi beban Pemerintah Kota (Pemkot).

Masalah gelandangan merupakan salah satu sumber munculnya masalah sosial lainnya, seperti pelacuran, kejahatan, pengemis, anak-anak jalanan, pemukiman liar, lingkungan yang tidak aman dan bentuk penyimpangan sosial lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Vembriarto (1984), masalah sosial adalah kondisi atau proses dalam masyarakat yang dilihat dari satu sudut tidak diinginkan namun masih mungkin dilakukan pemecahan masalahnya. Keterkaitan ini semakin jelas jika menggunakan sudut pandang masyarakat normatif, masyarakat normatif memandang mereka sebagai komunitas yang tidak mempunyai harga diri, menempati kelas sosial terendah, merusak keindahan lingkungan dan mengganggu ketenangan atau ketentraman di tempat-tempat umum.

Menurut Onghokam (1988), gelandangan berasal dari kata gelandang memiliki arti "*yang selalu mengembara*", "*yang berkelana*" (*lelana*), maka gelandangan dapat dilukiskan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan layak serta makan disembarang tempat. Deskripsi yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh antropolog, Suparlan (1988) gelandangan tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal tetap, masyarakat menempatkan mereka dalam "*stereotype*" tak menetap, kotor dan tidak jujur. Selanjutnya Sadli (1988), secara lebih lengkap mendefinisikan gelandangan sebagai kelompok masyarakat yang hidup dalam kondisi "*serba tidak*", karena

biasanya mereka tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP); tidak mempunyai tempat tinggal tetap; tidak mempunyai penghasilan tetap; tidak dapat merencanakan hari depan baik untuk anak-anaknya maupun dirinya; tidak terjangkau oleh pelayanan sosial yang ada; tidak mengetahui apa yang akan dimakan; mereka tidak berpendidikan formal; tidak dapat memberi bimbingan kepada anak-anak dan lain sebagainya (Sadli, 1988:125).

Kehidupan gelandangan merupakan salah satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan masyarakat kota pada umumnya. Gelandangan cenderung ditempatkan dalam posisi kurang diuntungkan atau dipandang sebagai suatu kehidupan yang bercitra negatif. Mengutip pendapat Wirosardjono dalam Ali dkk, (1990), bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi, dan budaya paling buruk dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan strata demikian maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan minum serta tidur di sembarang tempat. Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali dkk, (1990), ada tiga gambaran umum gelandangan: (1) sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya; (2) orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai; (3) orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterampilan. Dalam perspektif psikologi, faktor dominan yang mempengaruhi seseorang menggelandang adalah sikap mental individu dalam melakukan penyesuaian diri pada berbagai situasi. Seperti yang dinyatakan Kartono (1985), gangguan emosional dan kekalutan mental banyak muncul pada masa transisi dimana terjadi perubahan tatanan budaya, misalnya dari era agraris menuju era industrialisasi. Hal ini menunjukkan, bahwa untuk menjadi gelandangan bukan semata-mata masalah ekonomi.

Suatu kehidupan yang dipandang oleh masyarakat dan pemerintah sebagai kelompok yang mengotori atau mengganggu keindahan, kenyamanan dan keamanan lingkungan perkotaan. Meskipun berbagai citra negatif terhadap keberadaan gelandangan di wilayah

perkotaan telah dilontarkan, namun pada kenyataannya jumlah gelandangan relatif tidak berkurang. Kondisi ini menunjukkan selama pemerintah dan masyarakat belum memberikan “ruang” bagi semua golongan masyarakat tentunya fenomena gelandangan masih tetap hadir dan menghiasi kehidupan kota. Dan tentunya menyebabkan bertambahnya jumlah gelandangan dan juga semakin kompleksnya permasalahan sosial pada masyarakat perkotaan. Masalah gelandangan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang sangat kompleks dan tidak hanya menyangkut masalah sosial ekonomi, tetapi menyangkut masalah psikologik, sosial budaya yang dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan masyarakat, gangguan ketertiban dan keamanan serta gangguan terhadap lingkungan masyarakat khususnya di kota-kota besar.

Satu hal yang harus diperhatikan, bahwa keberadaan gelandangan bukan hanya terkait dengan masalah keamanan, ketertiban, keindahan kota melainkan lebih dari itu, gelandangan adalah masalah sistemik-keadilan, pemerataan, hak asasi manusia dan persoalan kemanusiaan lainnya. Fenomena gelandangan tidak cukup hanya dijelaskan sebagai dampak dari pembangunan, modernisasi maupun akibat dari industrialisasi. Bahwa proses transformasi sosial yang terjadi pada komunitas gelandangan bukan hanya disebabkan dan berdampak pada dimensi politik, sosial, ekonomi saja melainkan juga pada aspek spiritualitas, keberagaman dan bangunan *world view* masyarakat Irwan Abdullah dalam Maghfur Ahmad (2008). Dengan demikian bisa dipahami bahwa gejala gelandangan mempunyai kelekatan dengan permasalahan-permasalahan lain baik ekstern maupun intern seperti ekonomi, psikologi, sosial, budaya, lingkungan dan pendidikan Supriyadi dalam Maghfur Ahmad (1998).

Dengan segala keterbatasan baik peluang, kesempatan, pengakuan akan keberadaan komunitas gelandangan di kota, dalam teori struktur-fungsionalis bahwa gelandangan sebagai kelompok kelas bawah dalam struktur masyarakat, mereka berupaya untuk mengungkapkan jati dirinya atau keberadaannya dengan menggeluti pekerjaan secara mandiri

misal sektor informal sebagai bentuk resistensi terhadap pembangunan yang lebih berpihak pada sektor formal. Gelandangan merupakan wajah masyarakat yang tidak berdaya, tidak memiliki ketrampilan, berpendidikan rendah, tidak memiliki modal, tidak mampu bersaing di sektor formal, oleh karena itu mereka bekerja di sektor informal atau *serabutan*, bekerja apa saja pada sektor yang tidak membutuhkan pengetahuan, kemampuan, dan modal. Misalnya sebagai pemulung, pengamen, pengemis, pengasong, tukang semir sepatu, semua ini dilakukan untuk kelangsungan hidup gelandangan di tengah-tengah kehidupan masyarakat perkotaan.

Sementara itu cukup ironis, karena sampai saat ini komunitas gelandangan dipandang selalu bercitra negatif seperti mengganggu keindahan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban kota. Padahal pemerintah Indonesia sebagai negara yang akan mensejahterakan warga negara yang secara tegas diatur dalam UUD 1945 dan UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya akan kesejahteraan bagi semua warga negara. Berdasarkan permasalahan tersebut, sangat menarik untuk diangkat menjadi suatu penelitian untuk mengungkap faktor yang mempengaruhi munculnya gelandangan di Kota Manado dan strategi gelandangan menghadapi persaingan hidup ditengah tekanan-tekanan dari dalam dirinya maupun lingkungan sekitarnya menjadikan fokus dalam penelitian ini. Tujuan penelitian mendeskripsikan faktor-faktor penyebab menjadi gelandangan dan beberapa strategi gelandangan agar tetap bertahan hidup di kota.

B. Penggunaan Metode Pendekatan

Penentuan lokasi penelitian dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan Manado sebagai kota agraris/perkebunan, perikanan menjadi kota perdagangan dan pariwisata. Dampak pembangunan kota akan melahirkan berbagai permasalahan sosial yang kompleks, salah satu diantaranya maraknya gelandangan sebagai pengemis di pusat-pusat kota Manado, dan ditengarai diorganisir oleh oknum tertentu.

Dan juga berbagai masalah sosial lainnya yang mulai meresahkan masyarakat kota Manado.

Penjajagan lokasi dengan mengidentifikasi tempat-tempat yang dijadikan hunian gelandangan. Setelah tempat-tempat teridentifikasi, peneliti mulai mengadakan observasi lapangan di lokasi dan tempat mangkal gelandangan sebagai pengemis, pengamen, pemulung, pengasong, yaitu di daerah-daerah berikut. 1. Daerah sepanjang Boelevard, daerah ini merupakan pusat pertokoan sebagai daerah baru karena adanya pemekaran wilayah sepanjang pinggir pantai. Sebagai daerah pusat pertokoan atau perekonomian menjadi tempat bagi masyarakat Manado untuk berbelanja atau bersantai. Disepanjang jalan, lampu merah, dan rumah makan, dapat dijumpai gelandangan, pengemis dan pengamen; 2. Lokasi lain yang berada di sekitar pantai Malalayang, posisinya berjarak beberapa kilometer dengan pusat pertokoan. Daerah tersebut khususnya hari libur akhir pekan atau libur panjang selalu dikunjungi para wisatawan domestik maupun internasional dengan tujuan berlibur atau melihat keindahan alam dasar laut di Bunaken. Keramaian daerah tersebut menarik minat bagi gelandangan, pengemis, pengamen anak jalanan dengan rambut ala *punk rock* untuk meminta sedekah bagi siapa saja yang mereka temui. Keberadaan mereka menurut informasi masyarakat sekitarnya, mulai terlihat dan jumlahnya semakin banyak sekitar dua tahun terakhir ini, masyarakat mulai terganggu meskipun belum sampai mengarah ke tindakan kriminal misal kekerasan, perampasan akan tetapi menjadikan daerah di sepanjang pantai tersebut kurang nyaman, aman dan indah; 3. Tempat lain menjadi pangkalan gelandangan, anak jalanan, pengemis, pencopet, wanita pekerja seks dapat ditemui di Terminal dan Pasar Karombasan. Lokasi tersebut berdekatan dengan pasar tradisional dan disampingnya terdapat terminal antar kota/kabupaten. Kehidupan di terminal identik dengan kehidupan malam, kehidupan yang keras karena semua orang menggantungkan hidupnya di lingkungan tersebut, dari mulai pekerjaan yang halal sampai dengan pekerjaan yang bersinggungan dengan tindak kriminal, misalnya pemerasan,

pencopetan, pekerja seks, narkoba bahkan yang cukup mengkhawatirkan penularan HIV/AIDS ada di lingkungan kehidupan mereka; 4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tuminting, sebagai tempat komunitas gelandangan yang bekerja sebagai pemulung. Lokasi TPA Tuminting berada di pinggir kota sebagai tempat pembuangan akhir sampah-sampah dari kota, sekilas di daerah tersebut tidak begitu terlihat keberadaan para gelandangan. Hal ini karena begitu luasnya TPA sebagai tempat pembuangan sampah, akan tetapi apabila peneliti mengamati sampai turun kebawah (lokasi mirip jurang), dapat ditemui bedeng-bedeng yang terbuat dari kardus, anyaman bambu dan lingkungan yang berbau menyengat dan kotor sehingga dapat dikatakan tidak layak sebagai tempat tinggal.

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari: Gelandangan sebanyak 50 orang; Informan formal dari Instansi terkait yang terlibat langsung dalam penanganan seperti Dinas Sosial Propinsi, Kota, Kepolisian; Informan informal, dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelita Kasih, Komisi Perlindungan Anak (KPA), dan tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kepedulian dan memahami masalah gelandangan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan studi dokumentasi serta observasi. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini. Data yang terkumpul diklasifikasi, dianalisa, dan dideskripsikan secara kualitatif dan bila diperlukan dilengkapi secara kuantitatif. Selain itu juga dilakukan klasifikasi data untuk mencari variasi dan menganalisis dengan menghubungkan antar gejala.

C. Komunitas Gelandangan di Kota

Gelandangan dilihat dari daerah asal, usia, pendidikan, dan faktor penyebab menggelandang. Daerah asal gelandangan sebagian besar dari Kota/Kabupaten sekitar Manado dan hanya 4 persen berasal dari luar pulau Sulawesi, yaitu dari Jawa dan Maluku. Sebesar 16 persen merupakan orang asli Manado, dan 60 persen berasal dari kota lain di

Sulawesi Utara, sedangkan sisanya 20 persen berasal dari propinsi lain di pulau Sulawesi, yaitu dari Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Gelandangan yang berasal dari kota di luar Manado, diantaranya merupakan gelandangan musiman atau sementara karena mereka tidak bertempat tinggal di Kota akan tetapi hanya pada saat-saat tertentu menjadi gelandangan pengemis yang beroperasi di sekitar pantai dan warung makan atau restoran di pusat Kota. Dari pengakuan salah seorang pengemis anak, dalam melakukan kegiatan meminta-minta ada yang mengkoordinir, mereka datang pagi hari terdiri dari beberapa orang di turunkan di suatu tempat dengan berbekal makanan kecil berupa kacang, keripik singkong dan bentuk makanan kecil lainnya untuk dijual kepada orang-orang. Akan tetapi tujuannya bukan menjual makanan tetapi meminta sedekah. Pada sore hari mereka berkumpul dan diangkut dengan kendaraan dibawa pulang ke desanya, dan itu berlanjut dalam setiap hari.

Perilaku menggelandang tidak didominasi oleh kelompok usia tertentu. Gelandangan di kota Manado terdiri dari beberapa tingkat usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia. Gelandangan di Kota Manado, sebesar 82 persen adalah gelandangan laki-laki dan 28 persen di antaranya adalah mereka yang berumur antara 21-30 tahun. Kelompok umur 50 tahun ke atas merupakan kelompok umur yang paling kecil jumlahnya, yaitu 8 persen. Kelompok umur < 20 tahun ada sembilan orang; 31-40 tahun ada tujuh orang; dan 41-50 tahun. Kondisi ini menunjukkan 92 persen gelandangan di kota Manado adalah mereka yang termasuk dalam kelompok usia produktif, kelompok usia yang secara fisik, psikis dan sosial masih mampu atau masih memungkinkan untuk beraktifitas atau bekerja.

Selama ini *stereotype* yang melekat pada gelandangan memiliki pendidikan dan ketrampilan rendah. Stereotipe tersebut terbukti dalam penelitian ini, secara terperinci dapat dijelaskan hanya 4 persen gelandangan di kota Manado yang pernah duduk di bangku SLTP. Sedangkan 76 persen sisanya adalah mereka yang tidak lulus SD, dan bahkan 20 persen di

antaranya sama sekali tidak pernah bersekolah. Dengan kondisi tingkat pendidikan gelandangan sebagaimana dijelaskan, maka harus diakui bahwa dalam penanganan gelandangan melalui pemberian bimbingan sosial dan bimbingan ketrampilan, akan menghadapi banyak kendala. Dengan kondisi tersebut tentunya merupakan tantangan bagi aparat pelaksana penanganan, karena harus betul-betul memiliki profesionalisme yang tinggi untuk membina orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

D. Faktor Penyebab Munculnya Gelandangan

Faktor penyebab munculnya gelandangan, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor intern dan ekstern. Demikian juga hasil penelitian Artidjo Alkostar (1984:120-121) bahwa munculnya kaum gelandangan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik maupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama, dan letak geografis.

Hasil studi lapangan menunjukkan munculnya gelandangan di kota Manado disebabkan oleh faktor intern yang berasal dari diri pribadi, cacat fisik bawaan sejak lahir, tuna netra, penyakit kusta/lepra. Faktor ekstern yang bisa menjadi penyebab seseorang memilih hidup menggelandang, dapat berupa karena konflik keluarga, tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, serta tidak ada pilihan pekerjaan yang lain, kekecewaan melihat orangtua yang sering bertengkar, diterlantarkan oleh keluarga.

Sebagai contoh, seperti yang diceritakan HN (15 tahun), seorang perempuan berasal dari Kabupaten Minahasa. Dua tahun yang lalu setelah dimarahi orangtua karena tidak mau menyelesaikan sekolah setingkat Sekolah Dasar, HN pergi dari rumah dengan satu tujuan pergi ke kota Manado. HN merasa tertekan karena orang tua sering bertengkar, pekerjaan bapak sebagai tukang parkir dan ibu buruh di pasar. Pertengkaran itu hampir setiap hari

terjadi, HN pergi dari rumah tanpa membawa apapun, dengan satu tujuan ingin mendapatkan kebebasan. Dengan kepergiannya HN merasa bisa terlepas dari tekanan keluarganya, bebas menentukan jalan hidupnya. Setelah sampai di terminal Karombasan kota Manado, sudah larut malam tidak ada saudara maupun tempat yang dituju. Pada saat kebingungan dan tidak tahu harus kemana, ada seorang pemuda yang mendekati dan bersedia mau membantu mencari tempat tinggal sementara. Tanpa sedikitpun menaruh curiga HN bersedia diajak ke suatu tempat, dengan penuh kepercayaan terhadap pemuda tersebut, pada saat itulah kegadisannya direnggut oleh pemuda. HN tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis dan menyesali peristiwa semua itu, pada akhirnya HN hidup serumah tanpa ikatan perkawinan, hidup menggelandang, tinggal di bedeng-bedeng sekitar Pasar Karombasan.

Gambaran umum gelandangan menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali dkk, (1990) merupakan sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakat, orang yang disingkirkan dari khalayak ramai, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Pandangan tersebut terbukti dalam temuan penelitian, bahwa menjadi gelandangan disebabkan oleh kondisi serba "tidak" yang melekat pada diri gelandangan. Faktor penyebab menjadi gelandangan sebagian besar karena faktor extern, dapat dilihat, sebanyak 20 persen gelandangan di kota Manado menyatakan menjadi gelandangan karena tidak mempunyai pilihan lain. Selain itu dapat diketahui bahwa 28 persen gelandangan menjadi gelandangan karena tidak memiliki modal kerja. Adapun yang mengaku tidak memiliki keterampilan kerja jumlahnya ada 32 persen. Sedangkan karena faktor intern terdapat 12 persen gelandangan di kota Manado tidak mampu melakukan pekerjaan lain karena menderita suatu penyakit atau cacat. Sedangkan 8 persen sisanya merasa lebih nyaman menjadi gelandangan dengan alasan bisa hidup bebas tidak diawasi atau dimarahi orangtua dan hidup bebas tanpa harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat.

Mata pencaharian yang dilakukan gelandangan di Kota Manado bervariasi, antara lain sebagai pengemis, pemulung, dan pengamen jalanan. Mata pencaharian sebagian besar sebagai pemulung, sebesar 42 persen, mereka bermukim dan bekerja di sekitar pembuangan akhir (TPA) Tuminting Kota Manado. Gelandangan yang berhasil ditemui dapat dikelompokkan menjadi gelandangan pemulung, pengemis, pengasong, pengamen jalanan. Menurut pengakuan mereka memilih kehidupan sebagai pemulung, salah satu faktor disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga. Menurut pengakuan N (26 tahun) yang beraktivitas sebagai pemulung di TPA Tuminting, berasal dari Talaud, pulau yang berada di perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, ia pergi ke Manado dengan tekad untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. N hanya berpendidikan tamat SD dan pada awalnya ia bermaksud menyusul kakaknya yang menjadi buruh bangunan di Kota Manado. Setelah sampai di Kota Manado dengan maksud mencari alamat kakak ternyata sudah berpindah tempat. N kebingungan karena bekal yang dibawa tidak mencukupi untuk kembali ke kampung halamannya. Pada saat masih dalam kondisi kebingungan N berkenalan dengan seorang perempuan. Setelah menceritakan kondisi yang sebenarnya, perempuan tersebut mengajak bekerja sebagai pemulung di sekitar TPA Tuminting. Karena tidak ada pilihan lain, N mau melakukan kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bekas seperti kaca, seng, besi, plastik, kertas kardus, dan barang-barang laku jual yang lain. Setelah barang tersebut terkumpul dipilah-pilah dan sesuai dengan jenis barang untuk selanjutnya dijual pada penadah barang yang sudah menjadi langgan.

Gelandangan sebagai pengemis, yang berhasil diwawancarai sebesar 26 persen. Gelandangan kelompok ini memanfaatkan anak kecil dengan menggandeng seorang tuna netra. Cara mereka mengemis sebagai penjual makanan kecil seperti kacang, ceriping pisang, dan emping ketela dengan harga Rp. 1.000,-. Pada saat menjajakan hanya membawa dua atau tiga bungkus makanan. Seseorang yang

ditawari makanan ternyata tidak membeli, dan lebih memilih memberi uang sekedarnya. Selama pengamatan dari berbagai tempat dengan penjual yang berbeda, menunjukkan kesamaan dari pelaku, barang yang dijual serta cara menjajakan makanan. Barang yang dijual hanya sebagai alat untuk meminta-minta pada orang lain. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar dalam kegiatannya dicurigai mereka dikoordinir oleh seseorang karena bentuk kegiatan mengemis dengan cara tersebut dapat dijumpai di jalan Sam Ratulangi, Boelevard, restoran atau warung makan, dan di sepanjang pantai Malalayang. Untuk menghindari larangan dan karena takut mendapat sanksi yang berat, maka mereka melakukan aktivitas itu untuk meminta-minta dengan berpura-pura menjajakan makanan kecil.

Gelandangan sebagai pengasong 18 persen, gelandangan kelompok ini masih berusia kanak-kanak dan beroperasi sebagai pengasong di terminal Pasar Karombasan, Kota Manado. Menurut informasi yang diperoleh dari pengurus Yayasan Pelita Kasih anak tersebut merupakan anak binaannya. Yayasan Pelita Kasih pada saat penelitian ini telah menampung dan membina anak-anak sekitar 30 anak gelandangan. Menurut informan, anak-anak ini menggelandang di jalanan karena berbagai sebab, diantaranya karena *broken home*, salah asuh, anak buangan hasil hubungan gelap, dan memang anak dari pasangan gelandangan. Beberapa faktor tersebut seperti yang diceritakan oleh M (15 tahun) yang terpaksa menggelandang karena orang tua bercerai, dan saat ini ayah dan ibu sudah menikah lagi.

Gelandangan anak-anak yang berkeliaran di sekitar terminal Pasar Karombasan Manado tersebut pada saat ini bernaung pada Yayasan Pelita Kasih. Hasil wawancara yang didukung pengamatan diperoleh informasi, bahwa gelandangan anak-anak ini sebagai pengasong dengan menjual berbagai makanan ringan dan Koran, serta beberapa diantara mereka menjual jasa sebagai pengangkut barang dagangan para pedagang di pasar tersebut, sebagaimana M yang membantu seorang ibu penjual gorengan.

Gelandangan yang beraktivitas sebagai pengamen jalanan, mereka melakukan pekerjaan tersebut di sekitar pantai Malalayang. Karena disanalah tempat orang-orang untuk bersantai, makan, minum sambil menikmati pantai baik siang maupun malam hari, sehingga para pengamen memanfaatkan waktu dan beraktivitas untuk mencari uang di sepanjang pantai. Dari pengakuan pengamen yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka mengaku bekerja apa saja asal dapat menghasilkan uang, meskipun pekerjaan tersebut menyimpang dari norma-norma masyarakat yaitu melakukan tindakan asusila sebagai WTS di terminal Karombasan.

Lebih jauh mereka menceritakan karena kondisi yang menyebabkan melakukan pilihan itu. Mereka sadar bahwa pekerjaan tersebut bertentangan dengan hati nuraninya, dan tidak didukung oleh masyarakat karena apa yang dilakukannya sangat jauh dari norma agama yang selama ini masih diyakininya. Berdasarkan pengakuan hanya itu pekerjaan yang bisa dilakukan, meskipun tetap berharap suatu saat nanti dapat melakukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak bertentangan dengan agama maupun norma masyarakat.

Kehidupan sebagai gelandangan bukan merupakan pilihan atau cita-cita mereka, semua ini karena keadaan yang menyebabkan mereka masuk dalam kehidupan sebagai gelandangan. Suatu kehidupan yang tidak terbayangkan dan terpikirkan akan mereka jalani. Dari persepsi mereka tentang kehidupan dan perilaku kaum gelandangan, seperti yang diceritakan oleh beberapa informal yang berhasil diwawancarai. Menurut AA (32 tahun) seorang laki-laki yang bekerja sebagai pemulung di TPA Tuminting, telah menekuni sebagai pemulung selama 12 tahun. *"Kehidupan di sekitar sampah dan mengais-ais, mengkorek-korek sampah, sesuatu yang tidak terpikirkan sama sekali untuk melakukannya. Semua orang tidak mungkin memilih kehidupan ini, hal yang menimpa saya lebih karena keadaan yang menyebabkan saya tinggal dan berada dalam lingkungan seperti ini".* Pengalaman hidup dan permasalahan hidup yang dialami menjadikan AA, dalam komunitas

gelandangan, suatu kehidupan yang jauh dari pemikiran dan cita-citanya, *"suatu kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat normal, sebelumnya merupakan kehidupan yang pernah saya jalani, kehidupan yang normal dan layak"*.

G (27 tahun) seorang mantan pecandu narkoba menceritakan memilih hidup bebas, tanpa terikat norma masyarakat. Pilihan tersebut dikarenakan ada sebagian masyarakat tidak mau menerima, menyebabkan rasa terbuang, tersingkirkan. Rasa kecewa yang teramat sangat memilih kehidupan yang berbeda, suatu kehidupan yang bisa menerima tanpa aturan-aturan yang sangat mengikat *"kebebasan". Kebebasan tanpa terikat oleh apapun dengan aturan-aturan yang sangat mengikat menjadi salah satu alasan mereka, selain banyak sekali tekanan hidup yang dialami sehingga saya terlempar dan masuk dalam kehidupan sekarang ini"*.

E. Strategi Survival Gelandangan untuk Bertahan Hidup

Alkostar (1984) menyatakan bahwa komunitas gelandangan adalah komunitas yang telah terpinggirkan karena kegagalan mereka dalam melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan yang normatif. Kenyataan ini membuat mereka sulit untuk bisa bangkit meningkatkan kualitas diri melalui usaha diri sendiri. Keterbatasan kemampuan, keterbatasan relasi, keterbatasan afeksi/spiritual, dan keterbatasan modal, membuat mereka terus berada dalam lingkaran kegagalan berusaha. Kehidupan gelandangan dalam menghadapi berbagai tekanan baik internal maupun eksternal, menjadikan mereka harus memiliki strategi untuk tetap bertahan dan melakukan kehidupannya sebagai gelandangan. Beberapa strategi gelandangan dalam menghadapi berbagai tekanan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.

Berbagai strategi gelandangan agar dapat tetap survive dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat perkotaan, meliputi beberapa strategi diantaranya: Pertama, strategi menarik rasa iba, agar tetap survive gelandangan sebagai pengemis dalam menjalankan aktivitas

di jalanan, mereka menggunakan berbagai cara atau trik. Strategi ini sangat penting agar mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Gelandangan sebagai pengemis dilakukan oleh seorang anak kecil dengan menggandeng orang dewasa tuna netra yang berpura-pura menjajakan makanan kecil seperti kacang, ceriping pisang, dan emping ketela dengan harga Rp. 1.000,-. Pada saat menawarkan mereka hanya membawa beberapa bungkus makanan. Seseorang yang ditawarkan makanan ternyata tidak membeli, dan lebih memilih memberi uang sekedarnya.

Taktik atau cara yang lain yaitu para remaja /ABG sebagai pengamen ala *punk rock*. Istilah anak punk dengan berkostum kaos hitam, celana hitam, jeans ketat, bersepatu boot, ikat pinggang rantai, jaket kulit dengan potongan model rambut ala Indian dan dicat beraneka warna. Menurut kajian sejarah gelandangan versi punk merupakan sub budaya yang lahir di London. Punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Karakteristik punk yang paling signifikan adalah usaha dan cara mereka menyindir perilaku penguasa, politisi, pejabat dan orang kaya dengan caranya unik, melalui lagu-lagu dengan musik dan lirik yang sederhana namun terkadang kasar, menonjol dengan *beat* yang cepat dan menghentak (Maghfur Saan, 12 Oktober 2010).

Kedua, pendapatan untuk makan saja, diperoleh hasil sebagian besar 66,67persen hidup untuk sekedar bertahan hidup. Pandangan hidup atau motto mereka adalah “bekerja untuk makan hari ini, besok adalah soal besok”, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan saja. Kebiasaan menabung bukan merupakan kebiasaan karena menabung hanya bagi yang memiliki pendapatan berlebih, sedangkan mereka bukan termasuk dalam masyarakat yang dapat hidup bermewah-mewah. Menurut informasi untuk memenuhi kebutuhan makan saja mereka menyatakan masih kesulitan, apalagi menyisihkan pendapatan yang tidak menentu untuk ditabung.

Pendapatan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makan.

Secara umum, mereka mencoba bertahan hidup dengan menekan semua kebutuhan sekunder. Misalnya kebutuhan pakaian, tidak menjadikan suatu kebutuhan penting karena pada umumnya pakaian yang dikenakan terkesan seadanya, lusuh, kotor, dan berbau bahkan ada yang jarang berganti pakaian. Seperti yang diceritakan oleh salah seorang informan NN (36 tahun), yang sudah puluhan tahun menjadi gelandangan dan pengemis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tuminting, *“Kami sudah terbiasa hidup seperti ini, yang utama kami kerja dan dapat penghasilan hanya untuk makan dan minum, sedangkan pendidikan, pakaian, rumah merupakan hal yang jauh dari jangkauan kebutuhan kami”*.

Ketiga, aturan atau norma yang berbeda dengan masyarakat. Dari pengakuan mereka, hampir semua kaum gelandangan memiliki beberapasemboyan diantaranya adalah “kebebasan mutlak adalah kebahagiaan”, semboyan ini tercermin dalam perilaku aktivitas seksual, tidur setiap saat tidak terpancang waktu, jam kerja, makan dan minum, dan kebiasaan “kumpul kebo”. Sebagian besar 90 persen, berpandangan kehidupan beragama bukan menjadi prioritas, karena kehidupan beragama bukan dunia milik mereka, dengan alasan enggan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang mereka yakini. Kaum gelandangan berpandangan bila mengikuti aturan atau norma masyarakat belum tentu diterima karena sudah memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat umumnya.

Berbagai alasan lain diungkapkan, karena tidak memiliki peralatan sholat, baju yang dikenakan kotor dan perilaku selama ini tidak mencerminkan kehidupan manusia yang beragama. Menurut Alkostar (1980) tentang perilaku gelandangan meskipun secara fisik kaum gelandangan berada di antar hiruk pikuk kehidupan kota, akan tetapi secara sosial budaya mereka relatif terpisah (*teralienasi*) dari masyarakat pada umumnya.

Sedangkan 10 persen, berpendapat kadang-kadang masih melakukan kegiatan ibadah sesuai agama yang mereka anut, khususnya pada saat mengalami masalah atau kesulitan dalam hidup. Mereka menyatakan satu-satunya tempat untuk berkeluh kesah dan mengadu

hanya pada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu ada baik ketika hidup susah maupun senang.

Keempat, tempat tinggal berpindah-pindah. Tempat tinggal yang mereka pilih dan merasa nyaman adalah tempat tinggal yang mereka tempati sekarang. Sebagian besar menyatakan, arti tempat tinggal yang dapat memberikan kenyamanan, tempat yang menjadikan mereka bisa beristirahat untuk melepaskan kepenatan, serta sebagai tempat yang sesuai dengan lingkungan komunitas sosialnya. Karena mereka "diterima", dengan segala kekurangan dan kelebihanannya.

"Rumah" atau tempat tinggal merupakan tempat yang dianggap aman dan nyaman, aman dari gangguan ketertiban yang sewaktu-waktu mengintai, nyaman karena dapat dengan leluasa berada dalam lingkungan atau dunia yang selama ini mereka jalani. Tidak merasa terasing dengan lingkungan yang menjadi tempat tinggal sementara, meskipun dalam kondisi yang tidak layak atau wajar untuk ukuran masyarakat pada umumnya. Misalnya tinggal di emperan toko, di bawah jembatan, di bedeng-bedeng sekitar pasar dan terminal, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). "Rumah", merupakan tempat untuk beristirahat, tempat untuk berlindung dari panasnya matahari, dinginnya malam. Jadi konsep rumah bagi mereka menjadi tempat untuk berlindung sementara, bukan tempat yang permanen.

Keberadaannya selalu dikaitkan dengan keindahan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban tata kota, sehingga komunitas gelandangan selalu harus waspada dan berhati-hati dimanapun mereka berada. Oleh karena itu selalu berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap karena sesuai dengan keamanan serta kenyamanan. Pada saat merasa tidak nyaman dan aman akan berpindah dan mencoba mencari tempat yang membuatnya dengan leluasa beraktivitas dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan 20 persen gelandangan yang bekerja sebagai pemulung memiliki tempat tinggal permanen meskipun bisa dikatakan tidak layak huni yang berada di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Kelima, menciptakan pekerjaan sendiri. Dengan segala keterbatasan gelandangan

berjuang untuk sekedar bertahan hidup melakukan pekerjaan apa saja misalnya menjadi pemulung, pencopet, pencuri, pekerja seksual, pengamen, dan pengemis. Ketidakberdayaan komunitas gelandangan tersebut menyebabkan mereka berupaya untuk tetap *survive*. Hal ini diwujudkan dengan bekerja semampunya, apapun akan dilakukan baik di sektor informal ataupun pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang, bahkan ada yang melakukan pekerjaan mengarah pada tindakan kriminal. Beberapa aktivitas yang mereka lakukan selama ini meskipun ada yang mengarah pada perilaku kriminal, semua itu semata-mata karena belum ada pilihan lain.

Keterbatasan dan ketidakberdayaan yang melekat pada gelandangan yaitu pendidikan, keterampilan, kesempatan atau peluang yang sangat terbatas mengakibatkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati kue pembangunan, mereka terasing di lingkungan masyarakatnya. Kaum gelandangan relatif sulit menjalin hubungan atau kerja sama dengan orang lain, karena hampir segala usaha untuk menjalin hubungan dengan orang lain seringkali tidak berhasil. Pada umumnya masyarakat masih memberi label negatif yaitu rasa curiga, tidak percaya, dan beberapa pandangan negatif lainnya. Steriotipe yang melekat pada komunitas gelandangan membatasi ruang gerak para gelandangan di dalam melakukan aktivitas kehidupannya, seperti dalam relasi sosial, pekerjaan, dan pergaulan antar kaum gelandangan maupun dengan masyarakat sekitarnya.

Keenam, merebut rezeki bila kuat mengalah karena tidak mampu. Pada saat mereka menghadapi tekanan yang berasal dari internal maupun eksternal yaitu dari sesama gelandangan maupun petugas Tantib, sebagian besar 90 persen memilih untuk mengalah dengan melakukan tindakan untuk berpindah lokasi lain ataupun menuruti kemauan petugas Tantib. Hidup sebagai gelandangan tidak banyak pilihan, mereka menyadari tidak ada gunanya mengharapkan pengertian, perhatian dan banyak menuntut pada orang lain. Selama ini mereka membatasi diri dari lingkungan pergaulan masyarakat, bahkan merasa tidak senang

bila dikenal orang karena akan mengganggu *privacynya*. Sebesar 10 persen gelandangan berdasarkan jam kerja, pengalaman, dan kemampuan yang lebih banyak maka merasa berhak untuk memiliki kekuasaan lebih besar dalam mendapatkan hasil. Hal ini berlaku baik gelandangan yang bekerja sebagai pengemis, pemulung, pengamen dan yang lainnya.

Persaingan antar mereka sangat tinggi, hampir semua gelandangan yang berhasil ditemui menyatakan demikian, menurut pengakuannya apapun akan dilakukan tidak memandang teman, karena beranggapan kehidupan sangat keras sehingga perebutan lahan kerja merupakan hal yang biasa. Khususnya untuk kehidupan gelandangan yang melakukan aktivitas bersinggungan dengan masalah hukum, seperti yang dituturkan gelandangan yang beraktivitas sebagai “pemalak” (baca meminta dengan paksa). Persaingan diantara mereka menganut siapa yang kuat dan mampu akan mendapatkan hasil lebih banyak, sedangkan sebaliknya yang tidak memilikinya memperoleh hasil sedikit.

Selama ini norma-norma yang mengatur siapa yang kuat menang, berlaku bagi komunitas gelandangan sedangkan bagi para gelandangan yang merasa tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan akan mengalah atau memberi kesempatan bagi gelandangan lain yang memiliki kemampuan dan kekuasaan. Gelandangan yang merasa kuat dan memiliki kekuasaan, akan melakukan apapun yang mereka inginkan bahkan merebut rezeki orang lainpun atau sesama gelandangan bukan hal yang tabu atau dilarang.

Bagi para gelandangan yang tidak memiliki kriteria tersebut, dengan sendirinya terseleksi oleh lingkungan para gelandangan, selama ini yang dilakukan dengan menghindar atau menjauh dari tempat atau wilayah kekuasaan tersebut. Mereka mencari tempat atau lingkungan baru yang dapat menerima sesuai dengan keinginannya untuk mendapatkan rezeki seperti yang diharapkan. Lebih baik mengalah apabila merasa lemah dalam segala hal daripada melawan tanpa memiliki kemampuan dan kekuatan.

Demikian juga dalam menghadapi tekanan yang berasal dari masyarakat kota, petugas

keamanan dan ketertiban kota, mereka memilih untuk mengalah serta tunduk atau kalau bisa berusaha untuk menghindar apabila terkena operasi ketertiban. Sebagian besar gelandangan menyatakan untuk menghadapi berbagai tekanan tersebut lebih baik tidak melawan, menurut apa yang diperintahkan aparat Tantib. Bagi mereka perjalanan hidup masih panjang, kalau melawan akan muncul masalah baru yang belum tentu dapat menyelesaikan, sehingga berusaha untuk tidak menambah masalah karena hidup mereka sudah penuh masalah.

Berbagai strategi hidup yang mereka terapkan paling tidak untuk menyelesaikan ataupun menghindari masalah-masalah yang tentunya akan membuat hidupnya semakin menderita. Dengan memiliki strategi dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan mereka memiliki keyakinan dapat terus melanjutkan dan melakukan sesuatu untuk hidupnya. Hidup adalah berjuang untuk keberlangsungan diri sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Ketujuh, terpaksa ikut program pemerintah (Dinsos) karena terjaring razia. 64 persen gelandangan mengatakan, pernah mengalami garukan atau penertiban karena tidak bisa mengelak dan ikut terjaring sehingga dengan terpaksa mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Manado. Mereka mengaku merasa terpaksa mengikuti pembinaan itu, meskipun secara finansial terpenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Selama mengikuti pembinaan merasa terikat dengan aturan-aturan yang diterapkan di Panti tersebut, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini tidak dapat dilakukan dengan leluasa seperti pada saat belum mengikuti pembinaan di dalam Panti.

Dari pengakuannya, setelah mengikuti pembinaan di Panti, merasa ada tambahan pengetahuan dan ketrampilan yang nantinya dapat digunakan kelak setelah keluar dari panti. Akan tetapi pada saat ini, bila disuruh untuk memilih, mereka mengatakan masih belum siap untuk keluar dari kehidupan menggelandang, karena untuk keluar dari kehidupan tersebut membutuhkan dorongan atau motivasi yang kuat serta ada kehidupan lain yang menjanjikan untuk kehidupan lebih baik lagi. Sementara

sekarang ini, apabila bisa memilih menyatakan dengan terpaksa mengikuti kegiatan tersebut karena tidak ada pilihan lain.

Sebesar 36 persen gelandangan menyatakan belum pernah ikut kegiatan panti karena selama ini mereka belum pernah terjaring operasi penertiban. Pada saat ada operasi penertiban, mereka dapat menghindar atau bersembunyi sehingga tidak tertangkap. Para gelandangan terhindar dari kegiatan pembinaan di dalam panti yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dilaksanakannya operasi penertiban bertujuan kota menjadi tertata rapi, aman dan nyaman bagi warga masyarakat yang tinggal di kota.

Kedelapan, setia kawan antar komunitas gelandangan. Rasa solidaritas diantara kaum gelandangan sangat tinggi, bila menghadapi tekanan dari luar komunitas gelandangan. Apabila mengalami kesulitan atau kesusahan antar komunitas tersebut saling tolong menolong, melindungi satu dengan yang lainnya bahkan dengan berbohong untuk melindungi teman bukan suatu yang salah. Sebagian besar gelandangan akan melindungi teman-temannya yang dicurigai telah melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet oleh aparat kepolisian maupun masyarakat kota pada umumnya. Dalam menghadapi masalah itu diantara mereka akan diam atau tidak memberikan informasi kepada orang lain meskipun tahu yang melakukan tindakan itu adalah temannya. Mereka pura-pura atau berlagak tidak tahu tentang peristiwa itu. Sikap gelandangan tersebut merupakan bentuk strategi mereka dalam melindungi teman-teman agar tidak ditangkap oleh petugas keamanan. Beberapa gelandangan lainnya berpendapat, menjaga hubungan baik dengan sesama orang-orang hidup di jalanan akan lebih penting dari pada membantu aparat keamanan untuk menangkap pelaku kriminal.

Solidaritas senasib dan sepenanggungan antar gelandangan sangat tinggi, jiwa tolong menolong bahkan dengan berbohong untuk melindungi sesama teman akan dilakukan khususnya menyangkut jiwa yang terancam. Baik ancaman dari ketertiban dan keamanan kota, serta masyarakat pada umumnya yang belum bisa menerima keberadaan mereka sebagai komunitas yang ada di lingkungan

masyarakat kota. Ikatan kesetiakawanan sesama gelandangan sangat kuat apabila menyangkut eksistensi mereka sebagai kelompok masyarakat minoritas. Kehidupan komunitas gelandangan tersebut merupakan suatu realita yang selama ini mereka lakukan diantara para gelandangan yang mengadu nasib di Kota.

Hal ini tercermin di dalam kehidupan antar gelandangan, baik yang menyangkut tentang relasi sosial antar gelandangan, aktivitas sehari-hari dalam bekerja untuk mencari nafkah dan hubungan diantara sesama gelandangan. Sebesar 4 persen gelandangan mengaku pernah ada masalah dengan sesama gelandangan, untuk membalas sakit hatinya, pernah pada saat razia karena lebih dahulu mengetahui dan tidak memberitahukan pada teman-temannya sehingga ada beberapa temannya terjaring operasi tersebut.

F. Rangkuman

1. Kesimpulan

Faktor intern penyebab menjadi gelandangan berasal dari diri pribadi manusia, karena cacat fisik, tuna netra, penyakit kusta/lepra. Faktor ekstern menjadi penyebab seseorang memilih hidup menggelandang, karena konflik keluarga, tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan ketrampilan, tidak ada pilihan pekerjaan yang lain, kekecewaan melihat orangtua yang sering bertengkar, diterlantarkan oleh keluarga. Gelandangan merupakan suatu komunitas yang terpinggirkan karena secara normatif gagal melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat umumnya. Realita ini menjadikan para gelandangan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui usaha diri sendiri. Berbagai macam keterbatasan meliputi keterbatasan kemampuan, relasi sosial, modal, akses dan sebagainya membuat hidup mereka akan terus berada dalam lingkaran kegagalan berusaha.

Agar tetap survive dan dapat bertahan hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat perkotaan, serta untuk menghadapi berbagai tekanan baik internal maupun eksternal, menjadikan mereka harus memiliki strategi untuk tetap bertahan dan melakukan kehidupannya

sebagai gelandangan. Beberapa strategi gelandangan agar tetap bertahan hidup di kota mereka melakukan sejumlah strategi diantaranya; strategi menarik rasa iba; pendapatan untuk makan saja; punya aturan sendiri; tempat tinggal berpindah-pindah; pekerjaan bersifat mandiri; merebut rezeki bila mampu; terpaksa ikut program pemerintah (Dinsos); setia kawan antar komunitas gelandangan. Berbagai bentuk strategi untuk bertahan hidup dan dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut telah dilakukan oleh semua gelandangan dalam kehidupan sehari-hari, baik gelandangan sebagai pemulung, pengemis, pengasong, pengamen. Wujud perilaku gelandangan tersebut merupakan suatu bentuk pertahanan diri dalam situasi serba tidak memungkinkan, terbatas, tersingkirkan, terabaikan, tanpa menuntut pengertian dari orang lain. Semua itu hanya untuk tetap dapat bertahan ditengah-tengah kehidupan di perkotaan yang sangat keras.

2. Rekomendasi

Bagi Instansi atau Lembaga terkait dan masyarakat perkotaan perlu memahami bahwa perilaku gelandangan yang memiliki norma tersendiri bukan disebabkan karena kesalahan dari para gelandangan itu sendiri, akan tetapi disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaannya. Para gelandangan merupakan salah satu warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kehidupan wajar seperti masyarakat lainnya.

Bagi Dinas Sosial dan Instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah, sebagai *policy maker* dalam pembangunan perkotaan, tetap mengedepankan pada aspek kebutuhan para gelandangan bukan karena kebijakan yang diambil dari keinginan pembuat kebijakan. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan memandang manusia secara holistik, bahwa para gelandangan juga manusia yang membutuhkan pelayanan baik fisik, psikis dan sosial. Oleh karena itu, segala bentuk penanganan yang diberikan harus memandang manusia secara utuh, segi fisik, psikis dan sosial merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Diharapkan masyarakat dapat memberikan peluang serta menyediakan ruang hidup bagi para gelandangan untuk dapat menjalani kehidupan di Kota. Dengan memahami kehidupan gelandangan, masyarakat melakukan sesuatu yang akan memudahkan para gelandangan melakukan aktivitas selama hidup di lingkungan masyarakat perkotaan.

Pustaka Acuan

- Alkostar Artidjo. 1984. *Potret Kehidupan Gelandangan Kasus Ujung Pandang dan Yogyakarta*. Jakarta: LP3ES.
- 1980. *Insan Kesepian dalam Keramaian: telaah tentang gelandangan di Ujung Pandang*. Yogyakarta : UII Press.
- 1984. *Advokasi Anak Jalanan*. Jakarta: Rajawali.
- Ali Marpujdi dkk. 1990. *Gelandangan di Kartosuro* dalam Monografi 3 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.
- Irwani Abdullah. 2008 dalam Maghfur Ahmad. Strategi Kelangsungan Hidup Gepeng. *Jurnal Penelitian Vol 7. No 2 Nopember 2010*.
- Jang A. Muttalib dan Sudjarwo. 1988. Gelandangan dalam Kancah Revolusi dalam Paulus Widiyanto. *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Kartini Kartono. 1985. *Psikologi Abnormal dan Pathologi Sosial*. Bandung: IKAPI.
- Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali Marpujdi dkk. 1990. *Gelandangan di Kartosuro* dalam Monografi 3. Surakarta. Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.
- Maghfur Saan. Fenomena Anak Punk Pekalongan http://www.suaramerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetakdetailberitacetak&id_beritacetak=112826, akses 12 Okt 2010.
- Onghokam. 1988. Gelandangan Sepanjang Zaman dalam Paulus Widiyanto. *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta:LP3ES.
- Suparlan. Parsudi. 1993. *Orang Gelandangan di Jakarta: Politik Pada Golongan Termiskin*. Dalam Parsudi Suparlan (ed). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- 1988. Gelandangan Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota dalam Paulus Widiyanto. *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*. Jakarta:LP3ES.
- Sadli. Saparinah. 1988. Perilaku Gelandangan dan Penanggulangannya dalam Paulus Widiyanto. *Gelandangan Pandangan Ilmuwan Sosial*, Jakarta: LP3ES.
- Supriyadi. 1998. dalam Maghfur Ahmad. Strategi Kelangsungan Hidup Gepeng. *Jurnal Penelitian Vol 7.No 2 Nopember 2010*.
- Vembriarto. ST. 1984. Kapita Selekta Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita.
- Wirosardjono dalam Ali Marpudji. dkk. 1990. *Gelandangan di Kartosuro* dalam Monografi 3. Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhamadiyah.

Strategi Keluarga Miskin dalam Mengatasi Kemiskinan ***Poor Family Strategy to Overcome Poverty***

Tyas Eko Raharjo F.

Peneliti Muda pada Balai Besar Pengembangan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1, Sonosewu, Bantul, Yogyakarta. E.mail: <kukuhsetiawan_koeh@yahoo.co.id>

Diterima 21 Maret 2013, disetujui 2 April 2013

Abstract

This research is a study on the method of poor family home industry workers to fulfill their families needs. Informants in this research are home industry workers. Data are gathered through interview, observation, and documental analysis. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The research findings are that the poor family strategy is a method to fulfill the needs of physical, psychological, and social. The physical need is fulfilled by saving and using local material, and social resources such as working hand-in-hand (gotong royong). Psychological need is fulfilled by going for recreation, meeting together with families, and finding additional work to be acknowledged by people around them, and expressing their ideas in neighbor meeting. Social need is fulfilled by participating in communal activities, such as arisan, family welfare activity, and working hand-in-hand (gotong royong). Can be concluded that with simple strategy poor families are able to overcome their poverty themselves. It is recommended that the Ministry of Social Affairs should prompt local related institutions to guide poor families to benefit potential resources around their existence.

Keywords: Overcoming Strategy-Poor Families-Home Industry

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi mengenai cara keluarga miskin pekerja industri rumah tangga (*home industry*) dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga miskin pekerja industri rumah tangga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga miskin pekerja *home industry* mampu mengatasi kemiskinan dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga dengan strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, psikis, maupun sosial. Dalam memenuhi kebutuhan fisik terutama kepemilikan rumah, informan menggunakan strategi menabung dan pemanfaatan bahan bangunan lokal serta kearifan sosial yang ada di lingkungan (gotong royong). Dalam pemenuhan kebutuhan psikis, informan dapat melakukan dengan cara rekreasi secara sederhana dengan berkumpul anggota keluarga, memperoleh pekerjaan tambahan untuk dapat diakui masyarakat dan menyampaikan pendapat dalam acara pertemuan warga. Dalam strategi pemenuhan kebutuhan sosial, informan melakukan dengan cara ikutserta dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan yakni kegiatan arisan PKK dan gotong royong. Disimpulkan, bahwa dengan strategi yang sederhana keluarga miskin mampu mengatasi kemiskinan secara mandiri. Direkomendasikan agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial mendorong instansi terkait yang berada di daerah dengan sungguh-sungguh untuk mendampingi keluarga miskin agar mampu memanfaatkan sumber potensi yang ada di sekitar mereka.

Kata kunci: Strategi Pemecahan-Keluarga Miskin-Home Industry

A. Permasalahan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang tidak kunjung henti, meskipun sampai dengan tahun 2012 telah mengalami penurunan sebagai berikut: dari 13,33 persen pada tahun 2010 turun menjadi 12,49 persen pada tahun 2011 dan turun lagi menjadi 11,6 persen pada tahun 2012 dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2012). Dengan menurunnya tingkat kemiskinan tersebut, maka perlu kewaspadaan pemerintah maupun masyarakat, karena tidak menutup kemungkinan kondisi keluarga yang sekarang telah terentaskan dari kemiskinan akan kembali miskin, dan mengalami guncangan ekonomi keluarga yang tidak menentu. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang tentunya memegang peran penting dalam proses pendidikan anak dan anggotanya. Pendidikan dalam keluarga biasa disebut sebagai pendidikan informal yang dapat membentuk sikap dan perilaku individu atau anggota keluarga dalam kehidupan mereka. Kehidupan keluarga tidak terlepas dengan peran wanita yang merupakan salah satu anggota keluarga berperan sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang mengurus semua pekerjaan rumah tangga di dalam keluarga termasuk pekerjaan reproduktifnya. Banyak keluarga dengan ibu rumah tangga merangkap sebagai pekerja demi mendapatkan penghasilan keluarga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Kemiskinan di Indonesia sebagian besar adalah masyarakat pedesaan, mereka menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertanian, maka diperlukan upaya penambahan pendapatan keluarga miskin di pedesaan. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi sumberdaya alam yang ada di lingkungan juga perlu, untuk dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomis produktif yang dapat menambah penghasilan mereka, selain mengandalkan penghasilan dari sektor pertanian. Berdasar latar belakang penelitian di atas, maka dilakukan penelitian tentang strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya, dengan pertanyaan yang diajukan yakni bagaimanakah strategi yang

dilakukan keluarga miskin dalam mengatasi kondisi kemiskinannya. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan tentang strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinan keluarganya.

Hasil pengkajian ini diharapkan memiliki manfaat ganda sebagai salah satu masukan untuk bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial dan berbagai pihak berkompeten dalam merumuskan kebijakan penanganan masalah sosial keluarga miskin. Selain itu untuk menambah pembendaharaan khasanah pustaka, utamanya pengetahuan tentang strategi yang dilakukan keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya.

B. Penggalan informasi dalam penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap makna subjektif secara mendalam tentang gejala sosial yang diamati dari sisi pelaku (subjek), termasuk mengungkap proses dan dinamika dari gejala sosial bersangkutan (Noeng Muhajir, 2002: 16), Sementara menurut Suharsimi Arikunto (2001: 309), dalam penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak bermaksud menguji hipotesis tertentu, tetapi mengumpulkan informasi untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, suatu gejala atau keadaan pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi kemiskinan. Penerapan pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai informasi, fakta, serta fenomena berkaitan dengan strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya melalui kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul dengan pertimbangan, bahwa di daerah tersebut banyak dijumpai home industri dan perajin barang sovenir yang memungkinkan dapat digunakan sebagai lahan dalam mendapatkan penghasilan tambahan bagi

keluarga miskin. Dengan demikian peneliti akan mudah untuk mendapatkan informasi secara detail. Pertimbangan yang lain adalah, bahwa lokasi ini merupakan daerah wisata yang terkenal dengan budaya tradisional, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah ini memiliki khas tersendiri dari pada daerah lain, terutama keluarga miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan sebagai tambahan penghasilan keluarga. Dengan kondisi lokasi penelitian yang demikian diharapkan dapat diperoleh data yang diinginkan peneliti.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* dengan mengacu ketentuan, yakni para keluarga miskin yang memiliki pekerjaan pada sektor industri rumah tangga sebagai penghasilan tambahan keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara untuk memperoleh data primer dari informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara baku (*standardized interview*) yaitu wawancara yang dilakukan dengan panduan (Deddy Mulyana, 2001: 180), digunakan untuk menggali informasi berkaitan dengan strategi yang dilakukan keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya, faktor pendukung dan penghambat para keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya.

Observasi untuk mengamati secara langsung mengenai strategi yang dilakukan keluarga miskin kondisi fisik, sosial, dan kondisi sosial ekonomi keluarganya. Beberapa alasan peneliti menggunakan teknik pengamatan dalam penelitian ini adalah: Pengamatan mendasarkan pada pengalaman secara langsung peneliti atas objek yang dikaji. Dengan teknik ini peneliti dapat melihat/mengamati sendiri atas perilaku ataupun kejadian yang sebenarnya dan memungkinkan peneliti memahami berbagai situasi yang rumit. Dengan pengamatan merupakan cara terbaik untuk mengecek kebenaran suatu data, sehingga dalam kasus tertentu apabila komunikasi yang lain tidak memungkinkan, maka pengamatan menjadi alat yang dimanfaatkan oleh peneliti. Teknik ini juga memungkinkan peneliti mencatat sejumlah peristiwa dalam situasi berkaitan dengan pengetahuan yang proporsional ataupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.

Telaah dokumen digunakan dalam upaya memperoleh data pendukung dari dokumen yang dilaporkan oleh pihak berwenang di lokasi penelitian, selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, untuk menganalisis: Strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya; Faktor pendukung dan penghambat keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya.

C. Memahami Strategi Keluarga Miskin

Sebagai landasan dalam penelitian ini disajikan konsepsi strategi dan keluarga miskin, sehingga dengan kedua konsep tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pemahaman Strategi: Strategi merupakan cara bagi seseorang maupun kelompok untuk merubah keadaan atau situasi sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya, mereka berusaha dengan bekerja pada industri rumah tangga (*home industri*) demi memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu strategi, bahwa dengan penghasilan tambahan yang mereka peroleh dapat mengubah kondisi kehidupan keluarga miskin. Sebagaimana pendapat Louis C Johnson dalam Abas Basuni dkk, (2001) bahwa strategi merupakan suatu pendekatan dan cara seseorang maupun kelompok untuk melakukan perubahan di dalam situasi, strategi berisi peran, tugas-tugas untuk dilakukan setiap orang.

Tropman dan Erlich (dikutip oleh Ellen Netting, 2001) memberikan pandangan bahwa strategi merupakan suatu usaha yang disetujui untuk mempengaruhi orang atau sistem yang dikembangkan dengan suatu tujuan yang pelaku harapkan. Dalam pendapat tersebut dimengerti, bahwa strategi dipergunakan untuk melakukan suatu perubahan manusia maupun kelompok masyarakat yang di susun sesuai dengan keinginan dan tujuan yang diharapkan. Dengan demikian strategi mengandung adanya suatu cara yang disusun berdasar

pedoman tertentu secara sistematis untuk memecahkan permasalahan yang dialami manusia. Selanjutnya Garth N. Jones dalam Hudri (1994) mengemukakan pendapatnya mengenai strategi, yakni merupakan rencana menyeluruh, sebuah pendekatan sistematis terhadap suatu masalah yang menjadi pedoman-pedoman intervensi tertentu, atau garis-garis besar arah rencana perubahan yang akan ditempuh. Berdasar pada pendapat para ahli tersebut dapat dimaknai bahwa strategi dalam penelitian ini merupakan cara keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya, yang berkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Sedangkan yang berkait dengan kebutuhan keluarga yakni kebutuhan fisik, psikis, dan sosial.

2. **Pemahaman Keluarga Miskin:** Keluarga sejahtera merupakan dambaan bagi setiap orang, situasi dan kondisi yang menyebabkan keluarga belum mampu mencapai kesejahteraan yang ideal adalah belum terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga. Sedangkan keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan ideal tersebut dapat digolongkan sebagai keluarga pra sejahtera dan sejahtera tahap I (KS I), dengan kriteria bahwa keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan pelajaran agama, papan, pangan, sandang dan kesehatan. Sementara Keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial, psikologisnya, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

Kemiskinan mempunyai banyak definisi, beberapa Orang memahaminya dari perspektif subyektif dan komperatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif. Walaupun sebagian besar konsepsi mengenai kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, namun sebenarnya kemiskinan menyangkut berbagai aspek yakni material, sosial,

kultur, institusional dan struktural. Piven dan Clowerd sebagaimana juga Swanson (dikutip oleh Edi Suharto, 2001) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial.

Kekurangan materi yakni kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian dan perumahan. Kemiskinan disini dapat diartikan sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang maupun keluarga dalam memperoleh barang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai yakni makna memadai sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. Bank Dunia menetapkan bahwa seseorang atau keluarga dianggap miskin jika ia memiliki pendapatan kurang dari dua dolar per hari. Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasar pengeluaran yang merupakan perkiraan untuk menggambarkan pendapatan seseorang atau keluarga dalam memenuhi sejumlah kebutuhan minimum yang diukur berdasarkan asupan kalori (2.100 kalori) yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup. Garis kemiskinan berbeda untuk wilayah pedesaan dan perkotaan, juga berbeda untuk setiap provinsi setiap tahunnya. Selanjutnya kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*), ketergantungan dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Bahwa kemiskinan diartikan sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi

Dari pengertian di atas menunjukkan, bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan adanya ketidakmampuan dan ketidakberdayaan seseorang maupun keluarga dalam

memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan akibat ketidakmampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi rakyatnya. Dengan demikian penanganan masalah sosial sangatlah kompleks, dan diperlukan adanya partisipasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan keluarga miskin.

Kemisikinan disebabkan oleh banyak faktor, sangatlah langka kemiskinan disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga menjadi miskin dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling bersinggungan satu sama yang lain, seperti mengalami kecacatan, pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya lapangan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau hidup di daerah tertinggal dengan sumberdaya dan infrastruktur yang terbatas. Edi Suharto (2009) memberikan pandangan tentang penyebab kemiskinan secara konseptual terdapat empat faktor yakni: Faktor individual, terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya. Faktor sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan, faktor ini secara khusus menunjuk pada konsep kemiskinan kultur atau budaya kemiskinan yang menghubungkan antara kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Misalnya, malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja (sering ditemukan pada orang-orang miskin). Faktor struktural, menunjuk pada stuktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan

tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Contoh sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus memupuk kekayaan.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah merupakan ciri umum kehidupan keluarga miskin. Gambaran umum kondisi kemiskinan dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dari fakta empirik seperti penghasilan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar yakni kondisi perumahan tidak layak huni, tidak dapat memenuhi kebutuhan makan (gizi buruk), tingkat pendidikan rendah. Kondisi tersebut dapat dipahami bahwa keluarga miskin merupakan keluarga yang dalam keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan sosialnya.

Berkait dengan pemahaman dasar tentang kemiskinan tersebut sudah barang tentu kemiskinan bukan semata-mata bersifat ekonomi. Kemiskinan merupakan perwujudan dari hasil interaksi yang melibatkan hampir semua aspek kehidupan manusia yakni: keluarga miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan rendah, tidak memiliki fasilitas, relatif berusia muda dan tidak memiliki keterampilan serta pendidikan yang memadai (Tjahya Supriatna, 2000). Dalam hal pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki, jika pendidikan yang dimiliki dipersatukan dengan pelatihan keterampilan dapat meningkatkan peluang kerja pada sektor-sektor pekerjaan yang berpenghasilan lebih baik. Bertambahnya tingkat pendidikan dan keterampilan akan meningkatkan kemampuan kerja, sehingga meningkat pula produktivitas kerja baik secara horisontal maupun vertikal.

Secara horisontal berarti memperluas jenis pengetahuan dan keterampilan kerja yang diketahui. Peningkatan vertikal berarti memperdalam pengetahuan dan kapasitas mengenai pengetahuan dan keterampilan kerja tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan keterampilan kerja seseorang maka semakin besar pula kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Berarti peluang memperoleh penghasilan akan lebih baik, dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan.

D. Strategi dalam Mengatasi Kemiskinan

Dalam pengkajian ini menampilkan pembahasan hasil penelitian berkait dengan strategi yang dilakukan keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya. Kemiskinan dalam kajian ini merupakan kurang terpenuhinya kebutuhan keluarga. Berbagai macam strategi yang dilakukan keluarga miskin agar mereka dapat mengatasi kemiskinannya dan berubah dalam kehidupannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut para keluarga miskin memiliki strategi atau cara yang dapat mereka lakukan. Dalam kajian ini peneliti lebih melihat pada strategi informan dalam mengatasi kemiskinannya dengan mengoptimalkan anggota keluarga untuk mendapatkan penghasilan tambahan demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Berdasar pengamatan dan wawancara terhadap informan selaku sasaran dalam kajian ini, ternyata strategi yang mereka lakukan dapat memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga. Berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yakni dari 30 informan terdapat 18 orang yang mengaku bekerja pada industri rumah tangga (*home industri*) oleh-oleh khas Yogyakarta. Sementara 9 (sembilan) informan bekerja sebagai pengrajin gerabah (keramik), dan tiga informan lainnya bekerja sebagai pengrajin wayang kulit yang dijadikan salah satu cara untuk memperoleh penghasilan tambahan bagi keluarga. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan keluarga miskin dalam

mengatasi kemiskinannya berikut dibahas tentang karakteristik informan dan strategi yang dilakukan.

1. Karakteristik: Mengenai umur informan yang menjadi sasaran dalam pengkajian ini dapat disimak dalam uraian berikut. Sebagian besar umur informan berkisar pada 25 tahun sampai dengan 45 tahun, yakni sebanyak 24 orang. Selanjutnya umur antara 46 sampai dengan usia 56 sebanyak 6 orang. Dengan demikian, dilihat dari segi umur informan rata-rata masih dalam masa produktif untuk melakukan pekerjaan sehingga memungkinkan mampu mandiri untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dari data yang dapat dihimpun tersebut hanya beberapa informan yang mendekati usia pensiun apabila mengacu pada peraturan pegawai negeri. Hal ini menunjukkan, bahwa informan memiliki semangat untuk keluar dari kondisi kemiskinan yang mereka alami. Berbagai upaya dan cara yang mereka lakukan, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, semua anggota keluarga ikut serta dalam mengupayakan entas dari kemiskinannya.

Apabila dilihat dari jenis kelamin informan selaku sasaran dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan, yakni sebanyak 26 orang berjenis kelamin perempuan dan 4 orang laki-laki. Hal ini dikarenakan bahwa status perempuan dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, dan mereka bekerja hanya sebagai upaya untuk menambah penghasilan keluarga. Para kepala rumah tangga sebenarnya telah memiliki pekerjaan pokok, namun dengan pekerjaan pokok yang ditekuni tersebut masih mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Untuk itu agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi, timbul upaya anggota keluarga yakni istri untuk membantu mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja pada industri rumah tangga yang berdekatan dengan tempat tinggalnya.

Ditinjau dari tingkat pendidikan informan ternyata sebagian besar telah menjalani

pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama. Sebanyak 21 informan mengatakan dirinya telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama. Sementara informan yang mengaku telah lulus sekolah dasar sebanyak 6 orang, mereka memberi keterangan bahwa dirinya tidak mampu lagi untuk meneruskan sekolah lanjutan pertama karena orangtua mereka tidak mampu mengupayakan biaya sekolah. Selanjutnya hanya 3 orang yang mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat sekolah menengah atas. Menurut pengakuannya mereka dapat menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SLTA karena pada waktu masih sekolah dua orang di antara mereka mengatakan menumpang di saudaranya yang mampu menyekolahkan. Informan yang lain menyatakan dirinya mendapat subsidi dari keluarganya untuk melanjutkan sekolah. Hasil wawancara menunjukkan, bahwa tingkat pendidikan informan telah memenuhi standar pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dengan pendidikan yang dimilikinya dirasa masih diperlukan adanya tambahan keterampilan, mengingat informan bekerja pada industri rumah tangga yang memungkinkan untuk lebih terampil dalam bekerja. Dengan demikian pemberian keterampilan sangat dibutuhkan untuk menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan informan.

Keseluruhan informan telah memiliki pekerjaan sebagai pekerja pada industri rumah tangga. Berdasarkan pengakuan para informan mengenai jenis pekerjaan yang mereka ditekuni merupakan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebanyak 18 orang bekerja pada industri kue dalam rumah tangga, sedangkan yang lain sebanyak sembilan orang sebagai pekerja pada industri kerajinan grabah (keramik) yang dikelola rumah tangga. Selanjutnya tiga orang bekerja pada kerajinan wayang kulit. Dari pekerjaan yang ditekuni tampak, bahwa para informan telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk lepas dari belenggu kemiskinan yang mereka alami. Mereka mempunyai keyakinan dan harapan bahwa dengan bekerja dan berdoa

suatu saat akan mampu untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Pada saat ini memang mereka sedang berjuang untuk mengalahkan kondisi yang serba kekurangan, namun dengan bekerja pada industri rumah tangga telah dirasakan adanya tambahan penghasilan yang dapat bermanfaat sebagai penyambung hidup.

2. Strategi yang Dilakukan

Berbagai macam kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi oleh informan, baik kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar pada keluarga, sehingga apabila terdapat salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi akan menimbulkan ketimpangan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu diperlukan adanya strategi yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, terlebih pada keluarga yang mengalami permasalahan dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam wawancara ditemukan beberapa strategi informan yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Terdapat beberapa unsur dalam memenuhi kebutuhan fisik yakni kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada beberapa strategi yang informan lakukan yakni.

- a. **Strategi dalam memenuhi kebutuhan fisik:** Pemenuhan kebutuhan fisik tidak terlepas dengan kebutuhan pangan, makan, pakaian dan kesehatan. Mereka dalam memenuhi kebutuhan pangan, memiliki cara untuk memperoleh tempat tinggal dan upaya pemeliharannya. Sebagian besar informan telah memiliki tempat tinggal (papan) berasal dari pemberian orangtua (warisan). Namun tempat tinggal yang dimilikinya rata-rata masih memerlukan pembenahan untuk menjadi rumah yang layak huni. Dengan kondisi tersebut ternyata mereka mengaku belum mampu untuk melakukan perbaikan rumahnya. Meskipun kondisi rumah yang mereka tempati merupakan rumah belum layak huni, tetapi para

informan tetap berusaha melakukan upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Untuk mengetahui kepemilikan rumah tempat tinggal informan dapat dilihat dari pengakuan para informan yakni terdapat lima belas orang yang mengaku memiliki rumah sebagai warisan dari orangtua, sembilan orang masih menumpang di rumah orangtuanya, sedangkan enam orang lainnya telah memiliki rumah sangat sederhana dengan membangun sendiri. Berikut pengakuan Partiah salah satu informan: "Rumah ini saya bangun dengan cara menyisihkan uang hasil kerja, kebetulan saya mendapat warisan berupa tanah pekarangan. Bahan bangunan sebagian saya buat bersama keluarga, seperti batu bata, dan kayu bangunan rumah sebagian saya ambil dari pepohonan di pekarangan. Namun untuk bahan bangunan seperti batu pondasi, semen, pasir, besi atap asbes, saya membeli dengan keringanan mengasur, Pak."

Berdasar hasil wawancara ternyata para informan membangun rumah secara sendiri karena mereka telah mendapat pembagian waris dari orangtua berupa tanah pekarangan. Dengan menabung dari penghasilannya sebagai pekerja pada industri rumah tangga dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan bangunan yang tidak bisa disediakan sendiri, sedangkan batu bata mereka membuat sendiri di sebelah pekarangan. Sementara untuk pemakaian kayu sebagai bahan bangunan para informan mengaku memanfaatkan kayu lokal yang ada di lingkungan desanya. Pemakaian kayu termasuk kayu yang murah, kayu *glugu* (pohon kelapa) dapat dimanfaatkan sebagai *blander* dan kemudian untuk pemakaian penyangga atap memanfaatkan bambu yang tebal. Semua bahan bangunan tersebut dapat mereka peroleh sebagian dari pekarangannya dan sebagian lagi dapat menghutang dari toko bangunan yang ada di desa dengan cara kredit. Para

informan pada umumnya membawa surat keterangan dari kepala dusun untuk mendapatkan pinjaman pembelian kayu yang pengembaliannya dilakukan secara angsur (kredit). Dalam pengakuan informan tersebut menunjukkan, bahwa mereka sebenarnya telah memiliki strategi secara alami untuk memenuhi kebutuhan fisik terutama upaya untuk memiliki rumah. Hal ini dapat memberi pelajaran positif bagi para informan yang belum memiliki tempat tinggal secara sendiri.

Makan merupakan kebutuhan hidup manusia yang mutlak untuk dipenuhi. Ada berbagai cara seseorang dapat memenuhi kebutuhan makan, supaya mereka tetap terjaga kesehatan secara fisik. Orang yang mampu dan memiliki kesibukan tinggi biasanya memilih makan dengan cara memesan kepada katering, sehingga tidak perlu mengupayakan dengan cara memasak sendiri. Namun dalam penelitian ini para informan semuanya memiliki keterbatasan dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga dengan berbagai strategi atau cara mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan makan bagi keluarganya

Dalam wawancara diperoleh informasi, bahwa ada 21 orang yang memberi penjelasan mengenai cara memenuhi kebutuhan makan dengan mengurangi menu makan, yakni mereka menyediakan makan nasi dan sayur hanya untuk siang dan malam. Pada pagi hari menyediakan makan sarapan hanya dengan makanan kecil (singkong atau ubi-ubian) dengan minum teh manis. Selanjutnya sebanyak lima orang mengaku menyediakan makan dengan cara mengurangi porsi makan, yakni jika pada umumnya orang lain sekali makan dengan satu piring nasi dan sayur, namun informan yang peneliti temui mengatakan setiap kali makan hanya setengah bahkan kurang dari setengah piring dan sayur agar jatah setiap harinya cukup dimakan keluarga.

Sementara informan lainnya yakni sebanyak empat orang mengatakan mereka lebih memilih mengurangi lauk dan tetap makan nasi seperti orang lain umumnya. Informan pada pagi hari makan sepiring nasi dengan lauk ikan asin disertakan sambal, kemudian pada siang harinya menyediakan makan nasi dengan tempe atau tahu goreng dan sayur seadanya selanjutnya pada malam harinya juga sama dengan makan siang. Sebagaimana pengakuan Ida, "Kalau saya menyiapkan makan untuk keluarga hanya siang dan malam saja, karena keluarga telah biasa dengan makan dua kali sehari. Sedangkan untuk pagi kami cukup hanya sarapan dengan makanan kecil dan minum teh anget. Makanan kecil itu lho pak, singkong atau ubi rebus saja."

Hasil wawancara dengan informan dapat ditegaskan, bahwa mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan makan dengan jumlah yang cukup memadai agar kesehatan fisik terjaga dan tidak mengalami kekurangan gizi. Untuk memenuhi kebutuhan makan secara cukup memadai memang membutuhkan kerja keras dari keluarga informan, terlebih informan juga memiliki anak yang masih sangat membutuhkan asupan gizi memadai demi tumbuh kembang mereka. Mengingat kebutuhan makan sangat penting bagi perkembangan anak, maka layak untuk diperhatikan terpenuhinya kebutuhan makan bagi keluarga miskin. Kondisi tersebut penting untuk mendapat perhatian baik pemerintah maupun masyarakat mampu bersama-sama memberikan alternatif dalam pemecahan masalah yang dialami keluarga miskin.

Pakaian merupakan kebutuhan fisik yang tidak kalah pentingnya bagi manusia, jika kebutuhan pakaian tidak terpenuhi secara memadai akan menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuhnya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan pakaian para informan memiliki strategi

yang berbeda antara informan satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui cara informan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pakaian dapat disimak dalam pengakuan berikut. Dalam pengakuannya informan melakukan pemenuhan kebutuhan pakaian dengan cara menyisihkan penghasilannya sampai dengan mendekati hari raya tabungan dibuka untuk dibelanjakan beberapa barang kebutuhan hari raya termasuk pakaian untuk keluarga. Pengakuan ini disampaikan oleh tiga orang. Adapun informan yang lain sebanyak 23 orang mengaku memiliki cara lain untuk memenuhi kebutuhan pakaian yakni dengan cara memanfaatkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang kemudian ditambah dengan penghasilan bulanan. Sedangkan empat orang mengatakan membelinya dari para penjual pakaian bekas dengan alasan dapat membelinya dengan harga yang murah. Irah mengaku, "cara yang saya lakukan dalam membelikan pakaian keluarga, dengan menyisihkan gaji setiap minggu sekali. Pada hari menjelang lebaran saya buka untuk membeli pakaian baru. Tapi kalau untuk pakaian harian saya kadang-kadang di kasih pakaian yang sudah tidak dipakai majikan. Ya lumayan pak bisa saya pakai kerja harian."

Dari pengakuan para informan tersebut terungkap, bahwa mereka memiliki cara pemenuhan kebutuhan pakaian sangat bervariasi. Pada dasarnya kebutuhan pakaian dapat terpenuhi hanya cara yang mereka lakukan belum benar karena sebagian masih membeli pakaian pada tukang rombeng (pakaian bekas), sehingga kebersihannya tidak terjaga, akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Namun terdapat beberapa cara yang baik dilakukannya yakni dengan menabung dan menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dipergunakan pembelian kebutuhan pakaian bagi keluarga.

Berkait dengan strategi dalam memenuhi kebutuhan kesehatan, bahwa sehat merupakan idaman bagi setiap orang. Dalam wawancara menemukan berbagai strategi atau cara yang dilakukan informan dalam menjaga kesehatan tubuh, yakni tujuh orang mengaku menjaga kesehatan dengan minum jamu tradisional satu minggu sekali. Mereka memberi alasan dengan cara minum jamu tradisional badan terasa nyaman untuk melakukan pekerjaan, dan berobat ke Puskesmas jika telah mengalami sakit yang tidak segera sembuh. Sementara sebanyak tiga orang mengatakan bahwa dirinya lebih suka mengonsumsi obat yang ada dipasaran jika mengalami sakit atau tidak enak badan. Mereka mengaku dengan cara tersebut akan lebih praktis dalam menjaga kesehatan, tidak perlu antre di puskesmas. Selanjutnya sebanyak 20 orang mengaku memeriksakan diri ke Puskesmas.

Dari pengakuan di atas terungkap, bahwa sebagian besar informan telah menyadari pentingnya kesehatan bagi dirinya. Dengan kesehatan yang terjaga mereka akan selalu mendapatkan penghasilan yang baik, karena dengan badan yang sehat informan dapat melakukan pekerjaan dengan baik pula. Hal ini terbukti bahwa pada umumnya informan memeriksakan kesehatan dengan memanfaatkan sarana kesehatan yang disediakan pemerintah yakni Puskesmas menjadi pusat pemeriksaan kesehatan bagi mereka. Namun demikian selain memeriksakan kesehatan ke Puskesmas ternyata sebagian informan juga melakukan pemeliharaan kesehatan dengan cara tradisional yakni dengan minum jamu setiap dua hari sekali dan atau satu minggu sekali. Mereka mengaku akan memeriksakan kesehatan di Puskesmas apabila telah mengalami sakit yang belum segera sembuh.

Mengenai strategi dalam mengatasi kemiskinan keluarga, terutama hal

pemenuhan kebutuhan fisik yakni makan, papan, pakaian dan kesehatan telah dapat dimengerti berdasar pengakuan para informan di atas. Para informan telah melakukan strateginya dengan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai pekerja industri rumah tangga (*home industri*), untuk membangun dan memperbaiki rumah tinggal serta membeli pakaian keluarga. Strategi mengatur menu makan bagi keluarga agar mereka tetap tercukupi dalam kebutuhan pemenuhan gizi keluarga. Namun dalam mengatur menu makan tidak mengurangi asupan gizi yang dibutuhkan tubuh terutama bagi anak-anak mereka. Demikian juga dalam melakukan strategi pemenuhan kebutuhan kesehatan, ternyata para informan telah sadar arti pentingnya kesehatan bagi dirinya dan keluarga, sehingga telah dapat melakukan perawatan kesehatan dengan baik dan benar. Puskesmas menjadi tempat dalam menjaga kesehatan dan menjadi tempat untuk berobat dikala keluarga mengalami sakit.

- b. Strategi dalam memenuhi kebutuhan psikis:** Pada hakikatnya manusia hidup memiliki kebutuhan psikis yakni kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan kejiwaan sebaik mungkin. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi apabila seseorang dapat memenuhi aspek-aspek yang ada dalam kebutuhan psikis yakni kebutuhan rekreasi, harga diri, dan kebutuhan untuk berpendapat. Oleh karena itu untuk mencapai pemenuhan kebutuhan psikis, tentunya seseorang mampu melakukan strategi/ cara yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan, sebagaimana yang dinyatakan para informan pada saat dilakukan wawancara.

Berkait dengan strategi informan dalam pemenuhan kebutuhan rekreasi sebanyak empat informan menyatakan tidak pernah melakukan rekreasi dan tidak pernah memiliki cara untuk

melakukannya, sementara 20 informan mengatakan dengan cara berkumpul dengan anggota keluarga pada hari minggu. Selanjutnya informan yang lain yakni enam orang mengaku tidak ada waktu untuk melakukan kegiatan rekreasi. Dari pernyataan informan tersebut membuktikan, bahwa sebagian besar tidak pernah melakukan rekreasi dengan alasan tidak ada waktu untuk melakukannya. Namun demikian masih terdapat beberapa informan yang mampu melakukan strategi pemenuhan kebutuhan rekreasi secara sederhana, seperti yang dikatakan Ngatilah dalam wawancara, "Saya dan keluarga tidak bisa melakukan rekreasi seperti orang lain pak, saya sekeluarga hanya santai-santai bisa bareng kumpul di rumah, jika kebetulan ada waktu libur. Seperti hari minggu kami dapat bebarengan kumpul di rumah, sambil bersih-bersih pekarangan."

Dari hasil wawancara terungkap ternyata para informan yang mengaku tidak pernah melakukan rekreasi tersebut mereka belum memahami mengenai aspek kebutuhan rekreasi. Sebenarnya informan telah melakukan cara pemenuhan kebutuhan rekreasi bagi keluarga dengan cara bekerja membersihkan pekarangan rumah secara bersama diantara anggota keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesederhanaan para informan dalam melakukan strategi pemenuhan kebutuhan psikis terutama pada aspek rekreasi. Rekreasi dapat dilakukan dengan cara apapun, sambil melakukan kegiatan rumah maupun kegiatan secara bersamaan antar anggota keluarga. Oleh karena itu rekreasi merupakan salah satu faktor penting untuk menghindari stress dan melepas ketegangan, sehingga para informan menjadi lebih rileks. Dengan terpenuhinya kebutuhan rekreasi secara cukup menjadikan para informan lebih tenang dalam melakukan kegiatannya.

Sementara strategi informan dalam memenuhi kebutuhan psikis dalam aspek harga diri dilakukan dengan cara untuk memperoleh pekerjaan sejajar dengan orang-orang di lingkungannya. Dengan pekerjaan yang menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan maka akan mendapat pengakuan dan penghargaan yang wajar pada lingkungannya. Namun untuk melihat seberapa pengakuan informan dalam melakukan strategi pemenuhan kebutuhan harga diri dapat disimak pada pernyataan berikut. Dua puluh dua orang menyatakan bahwa strategi yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan harga diri dengan berusaha memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan orang lain pada umumnya. Sementara lima orang memberi penjelasan bahwa mereka melakukan dengan cara untuk mengupayakan dapat selalu mengikuti kegiatan sosial yang diadakan lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya tiga orang mengaku dalam memenuhi kebutuhan harga diri dengan cara mendorong anak-anak mereka untuk selalu melanjutkan sekolah sampai pada tingkat yang lebih tinggi di lingkungan tempat tinggalnya. Partiah mengatakan, "Untuk dapat diakui dan mendapat harga diri yang baik di masyarakat, saya melakukan pekerjaan sebagai pekerja harian pada sebuah industri rumah tangga. Seperti layaknya tetangga kanan kiri rumah saya, mereka semua bekerja di perusahaan rumahan." Dari pengakuan informan tersebut terungkap, bahwa para informan memiliki strategi masing-masing yang tentunya mereka telah melakukan sesuai dengan kemampuannya. Memperoleh pekerjaan layaknya orang lain, menjadi salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan harga diri.

Pemenuhan kebutuhan psikis dalam hal berpendapat semestinya dapat dipenuhi bagi keluarga miskin. Oleh karena itu untuk mencapai pada pemenuhan kebutuhan berpendapat

tersebut diperlukan adanya strategi yang dapat dilakukan. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan informan dalam pemenuhan kebutuhan berpendapat dapat dilihat pada pengakuan berikut. Dua puluh empat orang mengaku dengan cara datang pada setiap pertemuan dasawisma dan berusaha untuk menyampaikan pendapatnya demi kepentingan warga di lingkungannya. Berbeda dengan yang lain yakni sebanyak empat orang mengaku mereka melakukan pemenuhan kebutuhan untuk berpendapat dengan cara ikut kegiatan kerja bakti sambil menyampaikan pendapatnya, namun demikian masih terdapat dua orang yang menyatakan dirinya tidak berani untuk menyampaikan usul, dan mengaku takut kalau pendapatnya salah, berikut pengakuan Ngatilah pada saat di wawancara, "Kalau untuk menyampaikan usul, saya lakukan pada saat mengikuti acara arisan di dasawisma (PKK), mumpung saya dapat ketemu ibu ketua dasawisma dan ibu-ibu warga masyarakat.

Penelitian menemukan, bahwa pada umumnya informan telah mampu dan berani untuk menyampaikan pendapatnya baik di acara formal maupun informal, yakni pada saat rapat dasa wisma PKK dan kegiatan kerja bakti lingkungan. Meskipun masih terdapat beberapa informan yang belum mempunyai keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, namun demikian ternyata mereka memiliki strategi yang berbeda dalam menyampaikan pendapat yakni mereka menyampaikan pendapat dengan perantara orang lain (teman) yang selanjutnya temannya menyampaikan pendapatnya pada saat pertemuan warga. Setelah dikonfirmasi lebih lanjut ternyata ketidakberanian mereka dalam menyampaikan pendapat dikarenakan tidak dapat menyusun kalimat dengan baik, sehingga mereka malu kalau menyampaikan pendapat ditertawakan.

c. Strategi dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial: Strategi yang dilakukan keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya mengenai pemenuhan kebutuhan sosial yang berkaitan dengan aspek kebutuhan ekonomi, pengetahuan dan kebutuhan bermasyarakat dapat diketahui dalam pengakuan berikut. Berkait dengan strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi, yakni duapuluh satu orang mengaku melakukan dengan cara mendapatkan pekerjaan sampingan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Selanjutnya enam orang memberi jawaban bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi dilakukan oleh semua anggota keluarga dengan cara membagi tugas untuk melakukan pekerjaan yang dapat memberi penghasilan keluarga. Sebanyak tiga orang memiliki strategi yang berbeda yakni dengan menghemat pengeluaran keluarga, bahwa anggota keluarga tidak pernah jajan hanya membawa bekal baik anak pada saat ke sekolah maupun kedua orangtuanya pada waktu melakukan pekerjaan.

Dalam mengatasi kemiskinan para informan memiliki strategi yang relatif berbeda. Pada dasarnya mereka telah melakukan strategi yang praktis dalam mengatasi kemiskinannya, sehingga mereka mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Meskipun dalam melakukan strategi tersebut diperlukan pengorbanan bagi setiap anggota keluarga. Menghemat atau menekan pengeluaran keluarga merupakan strategi yang dilakukan informan, dengan menghemat mereka dapat menabung yang tentunya demi kepentingan masa depannya.

Meskipun informan telah memiliki pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ternyata mereka juga masih membutuhkan pengetahuan. Untuk mengetahui strategi informan dalam mengatasi kebutuhan pengetahuan dapat dicermati dalam pengakuannya, yakni sebanyak lima orang mengatakan

dengan membaca majalah atau koran setelah menyelesaikan pekerjaan. Dua puluh satu orang mengaku, bahwa mereka melakukan pemenuhan kebutuhan pengetahuan dengan cara menonton acara televisi pada saat tidak melakukan pekerjaan. Selanjutnya empat orang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan masyarakat di lingkungannya. Para keluarga miskin selaku informan dalam penelitian ini ternyata memiliki strategi yang berbeda dalam mengatasi kemiskinannya. Sebagaimana pengakuan informan di atas, bahwa sebagian besar mereka telah memiliki strategi dalam melakukan pemenuhan kebutuhan pengetahuan dengan menonton acara televisi. Dengan melakukan kegiatan tersebut mereka dapat memperoleh informasi maupun hiburan yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pengetahuan.

Hidup bersosialisasi dengan warga masyarakat yang lain merupakan suatu kebutuhan sosial bagi para keluarga miskin selaku informan dalam penelitian ini. Meskipun informan setiap harinya telah memiliki pekerjaan yang cukup padat namun mereka tetap menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan bermasyarakat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sosial dalam aspek bermasyarakat diperlukan adanya strategi dari masing-masing informan. Strategi yang dilakukan informan dalam mengatasi kemiskinannya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bermasyarakat dapat di simak dalam pengakuan berikut. Sebagian besar yakni lima belas orang mengaku melakukan kegiatan bermasyarakat dengan cara ijin pada majikan untuk ikut dalam kegiatan arisan dilingkungan mereka tinggal, sedangkan sebelas orang mengatakan bahwa dirinya mengikuti kegiatan bermasyarakat bila hari minggu. Selanjutnya empat orang menjawab dengan cara mengikuti kegiatan bersama masyarakat pada malam hari dan hari

minggu. Dalam pengakuan informan tersebut menunjukkan, bahwa berbagai macam cara/strategi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sosial terutama dalam hal bermasyarakat. Hal cara pemenuhan kebutuhan bermasyarakat tidak mengalami permasalahan yang serius bagi para informan, karena mereka telah dapat mengatur waktu. Kegiatan bermasyarakat merupakan kegiatan yang telah lazim dilakukan pada lingkungan para informan, sehingga para majikan telah menyadari untuk memberikan ijin para informan dalam mengikuti kegiatan bermasyarakat. Kecuali empat informan yang mengaku dirinya mengikuti kegiatan bermasyarakat pada malam hari, karena keempat informan tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki dan biasanya kegiatan para bapak dilingkungan mereka dilakukan pada malam hari.

E. Rangkuman

Dalam rangkuman makalah ini disajikan kesimpulan dari hasil pembahasan mengenai strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya. Lebih lanjut juga di ajukan rekomendasi yang kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan rencana program.

1. Simpulan: Sebagai penutup dalam penulisan makalah ini disajikan kesimpulan hasil penelitian tentang strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinannya. Lebih lanjut juga diajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pihak berkepent. Berdasar hasil penelitian sebagaimana disajikan dalam gambaran dan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Berkait dengan karakteristik keluarga miskin selaku informan dalam kajian ini, ternyata berumur antara 25 - 56 tahun, sebagian besar perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan pada umumnya berpendidikan sekolah menengah pertama. Sedangkan pekerjaan yang ditekuni informan dalam industri rumah tangga merupakan

Hasil Pembahasan dalam Penelitian
Strategi Keluarga Miskin dalam Mengatasi Kemiskinan

Pemenuhan Kebutuhan	Aspek Kebutuhan	Strategi Pemenuhan yang Dilakukan
Fisik	Papan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapat Warisan orangtua. • Dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan dipergunakan untuk memperbaiki dan membangun rumah • Menggunakan bahan bangunan (konstruksi rumah) dengan kayu lokal yang ada di lingkungan tempat tinggal, batu bata membuat sendiri. • Bahan yang lain yang tidak ada di lingkungan dilakukan dengan cara kredit di toko bangunan terdekat dengan menyertakan surat rekomendasi kepala dusun.
	Makan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara mengurangi menu makan supaya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. • Makan nasi dan sayur hanya dilakukan pada siang dan malam, makan pagi hanya ubi-ubian dan teh manis.
	Sandang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyisihkan penghasilan untuk dibelikan pakaian pada hari raya idul fitri. • Membeli pakaian dengan memanfaatkan THR ditambah uang keluarga. • Membeli pakaian di tempat <i>rombeng</i> (penjual pakaian bekas), dengan alasan
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara minum jamu tradisional satu minggu sekali. • Minum obat yang ada dipasaran, bila merasa sakit. • Periksa di puskesmas bila sakit.
Psikis	Rekreasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berkumpul dengan anggota keluarga pada hariminggu • Rekreasi dengan cara berkumpul dengan anggota keluarga sambil membersihkan lingkungan rumah. Makan bersama.
	Harga diri	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara bekerja sebagai pekerjaan sampingan. • Mengikuti kegiatan sosial di dalam masyarakat. • Membiayai dan mendorong anak untuk bersekolah sampai pada tingkat yang lebih tinggi.
	Berpendapat	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara mengikuti kegiatan PKK atau dasa wisma sambil menyampaikan pendapatnya. • Menyampaikan pendapat dengan mengikuti kegiatan gotong royong • Pada saat pertemuan warga informan berusaha menyampaikan pendapatnya.
Sosial	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara bekerja untuk mendapat penghasilan tambahan • Membagi tugas pekerjaan kepada anggota keluarga dengan maksud mendapat penghasilan yang lebih baik. • Menghemat pengeluaran keuangan keluarga, membiasakan anggota keluarga tidak jajan baik di sekolah maupun di tempat kerja.
	Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara membaca korang atau majalah yang diperoleh dari majikan, setelah selesai melakukan pekerjaan. • Melihat acara berita di televisi. • Ikut dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan rumah
	Bermasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan cara ikut dalam kegiatan keagamaan di lingkungan • Bergabung dalam kegiatan arisan ibu-ibu PKK. • Ikut dalam bergotong royong di lingkungan masyarakat setempat.

pekerjaan sampingan selain pekerjaan pokok yang dilakukan suaminya sebagai petani. Terkecuali bagi informan yang berjenis kelamin laki-laki, mereka melakukan pekerjaan sebagai perajin juga merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan setelah mereka melakukan pekerjaan pokoknya sebagai petani ladang. Strategi keluarga miskin dalam mengatasi kemiskinan berkait dengan strategi pemenuhan kebutuhan dapat disimak pada rangkuman berbentuk tabel berikut.

2. **Rekomendasi:** Bagi Kementerian Sosial RI bahwa sesungguhnya keluarga miskin telah memiliki strategi atau caranya sendiri untuk mengatasi kemiskinannya. Dengan demikian pemberdayaan bagi keluarga miskin dapat dilakukan dengan memanfaatkan strategi yang pernah dilakukan keluargamiskin. Pemerintah hanya menambah dan menyempurnakan apa bila strategi yang ada pada keluarga miskin tersebut belum tepat. Industri rumah tangga memiliki peran yang penting dalam ikut membuka lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin, sehingga sudah semestinya dilakukan pembinaan bagi para pengusaha industri rumah tangga. Upaya pemberdayaan keluarga miskin yang direkomendasikan adalah berbentuk

kegiatan bimbingan keterampilan praktis dengan sasaran para ibu rumah tangga dalam keluarga miskin.

Pustaka Acuan

- Deddy Mulyana, 2001: *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ellen Netting, 2001 : *Praktek Makro Pekerjaan Sosial*, Alih bahasa Nelson Aritonang dkk, Bandung: STKS.
- Edi Suharto, 2007: *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, LSP Bandung: STKS.
- Edi Suharto, 2009: *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: STKS.
- Hudri, 1994 : *Istilah Untuk Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Kementerian Sosial.
- Louis C. Johnson, 2001 : *Praktek Pekerjaan Sosial*, Alih bahasa Abbas Basuni dkk, Bandung: STKS.
- Noeng Muhajir, 2002 : *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Suharsimi Arikunto, 2001 : *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Bima Aksara.
- Tjahya Supriyatna (2000) *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Bima Aksara.
- 2012 : *Penduduk Miskin Indonesia*, Yogyakarta: BPS.

Bantuan Rehabilitasi Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang ***Home Renovation for Poor Citizen in Padang Municipality***

Achmadi Jayaputra

Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Jl Dewi Sartika 200, Jakarta Timur.

E-mail: <jachmadi@yahoo.co.id>. Telpn (+62) 8128518190.

Diterima 22 Maret 2013, disetujui 3 April 2013.

Abstract

The Ministry of Social Affairs holds a Social Rehabilitation Program for the citizens having unadequate home condition for living. The program aimed at the poors by providing assistance in the form of funds Rp 10.000.000,- per family to rehabilitate their homes. The goal of the program is that the poors can improve their own homes in order to meet the health requirements. The implementation of the program activities is to go through the process set out by the guidelines to be followed in some stages. Research locations is chosen purposively in Lubuk Buayo District, Padang. At this location, assistance has been provided to 50 families. Data sources are obtained from the informations of several informants encountered. The research result shows that there are some poor people who can perform these activities in accordance to the stages guided, while some are not able to complete the renovation of the houses. Therefore, the model suggested that home assistance repairement should be provided and based on the situation and condition of the poors participating in the program.

Key words: Home Rehabilitation Assistance-Poor Citizens-Padang Municipality

Abstrak

Kementerian Sosial RI mempunyai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang ditujukan kepada warga miskin dengan memberi bantuan berupa dana berjumlah Rp 10.000.000,- per kepala keluarga (KK). Tujuannya; agar warga miskin dapat memperbaiki rumahnya sendiri supaya memenuhi syarat kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses yang diatur dalam suatu pedoman yang harus diikuti secara bertahap. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja di Kecamatan Lubuk Buayo, Kota Padang. Di lokasi ini bantuan telah diberikan kepada 50 KK. Sumber data diperoleh dari keterangan dari beberapa informan yang ditemui. Hasil penelitian menunjukkan, ada sebagian warga miskin yang dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai tahapannya. Sementara ada juga yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan rumahnya. Oleh karena itu disarankan, model pemberian bantuan sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemampuan warga miskin.

Kata Kunci: Bantuan Rehabilitasi Rumah- Warga Miskin-Kota Padang

A. Warga Miskin dan Kebutuhan Rumah

Sebagai makhluk manusia dalam mempertahankan kehidupannya harus mencari dan memenuhi kebutuhan dasar dengan cara bekerja. Penghasilan yang diperoleh disesuaikan dengan kebutuhan individu atau keluarganya. Semua dilakukan sebagai tanggung jawab pribadi dan terhadap anggota keluarganya. Kebutuhan dasar bagi tiap orang atau keluarga selalu berbeda, termasuk juga pemenuhan kebutuhan dasar yang diutamakan anggota keluarga seperti makan dan rumah. Penghasilan menentukan dalam menentukan kebutuhan utama. Hanya keluarga tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum. Kebutuhan makan pastilah dipenuhi secara individu atau kepala keluarga yang bertanggung jawab membelikan bahan makanan untuk diolah atau membeli makan. Namun, kebutuhan rumah sangat beragam dari kepemilikan terbagi dua yaitu; milik sendiri atau milik orang lain. Rumah milik sendiri perolehannya juga beragam karena ada yang sudah bisa membelinya atau dengan cara mencicil seperti dalam program Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Masih banyak dijumpai rumah milik orang lain karena keluarga yang bersangkutan belum mampu membeli rumah sesuai dengan penghasilannya.

Apalagi warga miskin yang kebanyakan belum memiliki rumah. Mereka masih banyak yang menumpang dengan orang lain atau keluarga lain karena ketidakmampuannya untuk membeli rumah atau penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan. Itupun sering dikatakan kurang, sehingga belum terpikirkan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Memang ada yang memiliki rumah, tetapi rumah yang dihuni tidak atau kurang memenuhi syarat kesehatan disebabkan penggunaan bahan material seadanya yang dibeli dengan harga murah.

Kementerian Sosial RI dalam menangani keluarga miskin mempunyai Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Berdasarkan data diketahui ada sekitar 14,8 juta tergolong Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau keluarga fakir miskin. Mereka akan mendapat program tersebut, sehingga perlu

diakukan secara bertahap. Tahun 2008 telah melaksanakan perbaikan rumah terhadap 4.856 Kepala Keluarga di 37 kabupaten/kota pada 16 provinsi. Kemudian tahun 2009 dilanjutkan di 22 kabupaten/kota pada 13 provinsi sebanyak 2.346 unit rumah. Tahun 2010 ditargetkan kegiatan bagi 6.144 unit rumah dan 123 unit Sarana Lingkungan (Sarling) (Anonim, 2010: 2).

Perbandingan antara fakir miskin perlu dibantu dengan target yang akan dilakukan Kementerian Sosial RI tidak seimbang dan akan memerlukan waktu yang lama. Tetapi kegiatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan terhadap daerah atau lokasi yang sudah ditentukan bisa di wilayah perkotaan dan perdesaan. Target yang akan dicapai tiap lokasi antara 50–100 Kepala Keluarga. Pelaksanaannya selain menggunakan dana APBN, penerima program harus berperan serta dalam perbaikan rumahnya melalui kelompok kerja yang dibentuk untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu perhatian dan peran serta pihak lain seperti pemerintah daerah, instansi swasta, organisasi sosial dan orang peduli.

Kegiatan tersebut sangat menarik karena diharapkan adanya peran serta masyarakat. Selain itu dana yang diberikan kurang dari yang seharusnya diperlukan, sehingga penerima program harus menambah sendiri. Hal ini sangat penting untuk memahami pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan peran serta masyarakat. Lokasi akan dipilih secara sengaja (*Purposive*) di Kecamatan Koto Tengah di Kota Padang. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan pernah bertugas di Kota Padang dan terbatasnya kalau dilakukan di tempat lain. Penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) tahun 2010. Jumlahnya 100 KK berada dalam dua kecamatan yaitu; Koto Tengah dan Bungus Teluk Kabung. Di Koto Tengah terdapat 50 KK penerima bantuan berada dalam lima kelurahan; Balai Gadang, Panjang Iku, Koto Pulai, Pasie Nan Tigo, dan Lubuk Buaya.

Sumber Data: Keperluan penelitian dipilih lima kelompok informan dengan catatan masing-masing diperlukan antara dua atau tiga orang. Informannya yaitu ; pelaksana program di

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Lurah, Ketua Kelompok, dan Pendamping. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan diskusi kelompok. Wawancara dilakukan terhadap informan instansi pemerintah. Sedangkan diskusi kelompok terarah dilaksanakan di Kelurahan Teluk Buaya yang dihadiri 10 orang terdiri dari; Pengurus Kelompok Kerja, pendamping, dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara dan diskusi diolah dengan analisis isi yang mengutamakan pemahaman terhadap keterangan yang diperoleh. Terutama berkaitan dengan proses dan pelaksanaan kegiatan.

Secara administrasi Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Seluruh wilayah tersebut telah tersentuh program pemberdayaan masyarakat, khususnya bantuan rumah bagi warga miskin. Selama ini Kementerian Sosial RI baru memberikan bantuan perbaikan rumah pada dua kecamatan yaitu; Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung. Tiap kecamatan menerima alokasi perbaikan rumah hanya untuk 50 KK dan tersebar di tiap kelurahan yang ada. Tentunya jumlah tersebut tidak sebanding dengan usulan yang masuk ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran untuk 2.100 KK.

Pelaksanaan perbaikan rumah yang didanai APBN, dalam pelaksanaannya diharapkan ada peran serta masyarakat. Sebab dana yang diberikan sebesar Rp 10.000.000,- per KK sebagai perangsang (stimulus), sehingga pasti ada yang merasa kurang atau berlebihan. Jika bagi penerima bantuan merasa kurang, maka mereka harus menambah sendiri kekurangannya. Tentunya akan menjadi masalah dari keluarga yang bersangkutan karena disebabkan beberapa hal antara lain; keluarga miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap, memiliki rumah yang tidak layak huni, dan sebagainya.

Kaitannya dengan perbaikan rumah, maka perlu dikaji tentang pelaksanaannya dimulai dari proses sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini dianggap penting untuk melihat pemahaman warga miskin terhadap program tersebut. Oleh karena itu permasalahannya yaitu; bagaimana pelaksanaannya perbaikan rumah yang dilakukan secara berkelompok?

B. Penyebab Kemiskinan dan Kebutuhan Dasar

Kajian yang akan dibahas terbatas pada tiga konsep yaitu; kemiskinan, kebutuhan dasar, dan perbaikan rumah. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan, sehingga dianggap penting untuk dibahas. Konsep kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu; aspek agama, sosial, ekonomi, dan budaya. Sudah banyak para ahli menulis dan menjelaskan konsep yang disusun berdasarkan teori-teori dan aspeknya. Khususnya agama Islam melihat kemiskinan dari dua konsep yaitu fakir dan miskin. Menurut pandangan agama Islam, fakir miskin yaitu orang yang hidupnya melarat dan membutuhkan bantuan. Sebutan lain bagi orang yang memiliki kebutuhan mendesak tetapi tidak meminta pada orang lain. Sedangkan miskin adalah orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya; 1) Faktor Struktural; dampak kebijakan pemerintah menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Ada suatu golongan yang menderita kekurangan-kekurangan fasilitas, modal, sikap mental atau jiwa yang diperlukan untuk melepaskan diri dari ikatan kemiskinan. Ada segolongan yang tidak mungkin hidup wajar karena penghasilannya terbatas; 2) Faktor Budaya; dampak budaya dan dukungan lingkungan. Kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung cukup banyak bahan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidupnya. Kondisi atau kualitas budaya demikian menyebabkan kemiskinan; 3) Faktor Sosial; kondisi-kondisi lingkungan sosial ekonomi yang menyebabkan seseorang menjadi miskin (Selo Sumardjan, 1997; Edi Suharto, 2009: 16 – 18).

Freidman (Edi Suharto, dkk; 2003), kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial basis tersebut meliputi modal yang produktif atau asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan, dan lain-lain); organisasi sosial dan politik (partai politik, koperasi);

jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan orang. Kemiskinan dan hubungannya dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial (Edi Suharto, 2009: 15 – 16).

1. Kekurangan materi; Adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan perumahan,
2. Rendahnya penghasilan; BPS menetapkan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang diukur berdasarkan asupan kalori sebesar 2.100 kalori yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup,
3. Kebutuhan sosial; dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial. Dengan demikian, kemiskinan hakekatnya menunjukkan situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara dan masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pasal 18, bahwa: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sosial. (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi; a. peningkatan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup; b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

Undang-undang tersebut mengisyaratkan tiap pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menggali potensi dan sumber daya setempat dalam menanggulangi permasalahan

sosialnya. Sebab berharap dana pemerintah melalui APBN atau APBD belum memungkinkan melaksanakan seluruh program pelayanan terhadap warga miskin. Biasanya potensi dan sumber daya tersedia cukup banyak, terutama banyak kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat saat ini. Penggalan kearifan lokal juga dengan maksud mengurangi beban anggaran pemerintah karena sebagian tanggung jawab pemerintah berada di masyarakat itu sendiri.

Kemiskinan konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan secara umum; kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar fakir miskin antara lain:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan,
2. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kesempatan berusaha, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan yang sehat,
3. Rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman tindak kekerasan,
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kebutuhan dasar menurut Medgley (1997) dalam perspektif pekerjaan sosial, orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dikategorikan sebagai orang yang tidak sejahtera atau mengalami masalah sosial. Ada lima kebutuhan dasar yang disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu penting (Huda, 2009):

1. Kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, papan atau rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.
2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, yaitu kebutuhan bebas dari penjjajaan,

bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.

3. Kebutuhan Sosial, yaitu kebutuhan untuk memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.
4. Kebutuhan Penghargaan, yaitu kebutuhan pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri, yaitu kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuai hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, khususnya Pasal 1 ayat 3 bahwa, kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Dengan demikian rumah menjadi penting bagi warga miskin, sehingga memiliki fungsi bagi penghuninya. Menurut Gymnastiar (2003) (Suradi, dkk, 2012: 15) rumah memiliki empat fungsi:

1. Tempat berzikir. Kalau kita ingin rumah kita menyejukkan, pergunakanlah rumah yang kita tempati untuk memperbanyak dzikir dan menyebut nama Allah.
2. Sumber Energi. Rumah tangga itu sumber energy dan sumber semangat bagi keluarga. Jadi jika terjadi sesuatu, rumahlah generator semangatnya. Jika misalnya suami sedang memiliki masalah, maka inilah saatnya istri menjadi motivator. Laki-laki yang gagah perkasa sekalipun, tetap menginginkan ada isteri yang mendaminginya, yang berperan sebagai pengayomnya.
3. Tempat saling koreksi. Fungsi rumah bagi suami, isteri, dan keluarga adalah sebagai cermin. Tidak ada tempat yang paling aman untuk saling mengoreksi kecuali di rumah. Suami, isteri saling koreksi, begitu juga dengan anak. Sebab jika kita dikoreksi orang lain biasanya suka sakit hati, maka rumah tangga adalah korektor yang paling aman.
4. Tempat sinergi dan saling melengkapi. Suami, isteri saling bersinergi begitu juga dengan anak, baik dalam ilmu dunia maupun akherat. Kunci penting lainnya yakni dengan memperbanyak ilmu. Karena kebanyakan, sebuah keluarga babak belur akibat kurang iman dan ilmu yang terbatas.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Pasal 1 bahwa; rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya. Kemudian dijelaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif.

Pemikiran, bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tiap orang. Rumah sebagai bentuk bangunan mempunyai dua fungsi yaitu; pertama, fungsi fisik sebagai tempat berlindung bagi orang-orang yang mendiaminya dari ancaman atau gangguan dari luar seperti panas, dingin, hujan, dan gangguan binatang. Kedua, fungsi non fisik sebagai tempat yang menjamin penghuninya untuk bersosialisasi, reproduksi, ekonomi, pelestarian nilai-nilai agama dan adat.

C. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang merupakan bagian penelitian yang pernah dilakukan. Menurut Creswell, Rossman and Rallis (Samsul Hadi, dkk; 2011: 262 – 263), pertama analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data.

1. **Pemilihan Lokasi Penelitian:** Dipilih secara sengaja (*Purposive*) di Kecamatan Koto Tengah di Kota Padang. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan pernah bertugas di Kota Padang dan terbatasnya kalau dilakukan di tempat lain. Penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH) tahun 2010. Jumlahnya 100 KK berada dalam dua kecamatan yaitu; Koto Tengah dan Bungus

Teluk Kabung. Di Koto Tangah terdapat 50 KK penerima bantuan berada dalam lima kelurahan; Balai Gadang, Panjang Iku, Koto Pulai, Pasie Nan Tigo, dan Lubuk Buaya.

2. **Pengumpulan data:** dilakukan dengan tiga cara yaitu; studi dokumentasi, pengamatan, dan wawancara. Studi dokumentasi melalui buku-buku yang diterbitkan unit operasional, hasil penelitian, buku umum, dan data lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap 10 Kepala Keluarga penerima bantuan (stimulan) warga berumah tidak layak huni. Diantaranya dua orang sebagai Ketua Kelompok Kerja. Sedangkan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang diajukan kepada informan yang melaksanakan kegiatan. Hasil wawancara dan diskusi diolah dengan analisis isi yang mengutamakan pemahaman terhadap keterangan yang diperoleh. Sumber data terbagi dua kelompok informan. Pertama, masyarakat terdiri dari tujuh keluarga penerima bantuan, dua Ketua kelompok dan tokoh masyarakat. Kedua, instansi pemerintah yaitu; pelaksana program di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, Pendamping, dan Lurah.
3. **Analisis Data:** Dilakukan dengan teknik deskriptif-kualitatif. Analisis data kualitatif bisa melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Lokasi dipilih secara sengaja ada tiga kriteria; terdapat dua kecamatan di Kota Padang yang menerima program RS RTLSH, adanya warga penerima bantuan stimulan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan adanya kelompok kerja. Oleh karena itu dipilihlah Kelurahan Lubuk Buayo di Kecamatan Koto Tangah. Penerima bantuan menyebar dalam empat kelurahan, tetapi untuk kepentingan penelitian ini hanya memilih satu kelurahan saja.

D. Bantuan Rumah bagi Warga Miskin di Kota Padang

Secara administratif Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat terletak di

pantai barat Pulau Sumatera yang dahulu disebut Andalas. Luasnya 694,96 Km² terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Wilayah daratan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan, bagian utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Bagian daratan dilintasi 21 sungai besar dan kecil, hulunya berasal dari Bukit barisan. Wilayah lautan di bagian selatan dengan 19 pulau yang tersebar dan bagian dari Samudera Indonesia, terbesar Pulau Bitangur 56,78 Ha dan terkecil Pulau Ular 1,38 Ha. Secara administrasi terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Di beberapa tempat masih menggunakan kewilayahan adat disebut *nagari* yang melingkupi atau lintas wilayah kecamatan dan kelurahan. Seperti dalam wilayah Kecamatan Pauh terdapat Nagari Pauh Limo karena di daerah ini terdapat lima suku yaitu; Caniago, Bodi, Jambak, Kumbang, dan Melayu. Keturunan yang berasal dari kelima suku tersebut secara turun temurun mendiami wilayah itu.

Tahun 2010 penduduk Kota Padang berjumlah 833.562 jiwa. Laju pertumbuhan 1,57 % disebabkan karena kelahiran dan perpindahan penduduk dari beberapa kabupaten disekitarnya. Perpindahan karena kedatangan dari berbagai wilayah Provinsi Sumatera Barat dan luar provinsi tersebut kepadatan penduduk sekitar 1.199 jiwa per Km². Kecamatan Koto Tangah merupakan wilayah terpadat, berpenduduk 162.079 jiwa dan wilayahnya mencapai 33 % dari luas Padang, sehingga kepadatannya 698 jiwa per Km². Kecamatan ini wilayahnya terdiri dari berbagai sarana seperti perumahan dan perkantoran, hanya sedikit tanah kosong. Sedangkan Kecamatan Bungus Teluk Kabung terendah kepadatannya, penduduknya berjumlah 22.896 jiwa dengan kepadatan 227 jiwa per Km². Sebagian besar kecamatan ini masih terdiri dari hutan, lainnya hanya permukiman dan sarana besar seperti pergudangan, gardu induk listrik, depo bahan bakar minyak, dan pelabuhan perikanan (Anonim; 2011: 59).

Masyarakat Minangkabau membagi wilayahnya menjadi dua; wilayah daratan dan pesisir. Wilayah daratan mencakup beberapa

kabupaten yang berada di pedalaman yaitu; Agam, Bukit Tinggi, Lima Puluh Koto, Pasaman, dan Payakumbuh. Wilayah tersebut merupakan wilayah asal suku bangsa tersebut. Wilayah pesisir mencakup dua kabupaten dan dua kota yaitu; Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman .

Khususnya kota Padang, secara statistik belum ada data tentang asal usul suku bangsa yang mendiami kota ini. Namun, penghuninya ada yang sudah lama tinggal di kota seperti orang Nias, orang Jawa, orang Batak, keturunan Cina, dan sebagainya. Terlihat dari nama penamaan beberapa daerah tempat tinggal dengan nama suku bangsa tersebut. Artinya Kota Padang tidak didominasi satu suku bangsapun. Hanya saja dalam pergaulan hidup sehari-hari, mayoritas berasal dari suku bangsa Minangkabau dengan penggunaan bahasa Minang selalu terdengar. Dapat dikatakan juga kota ini dihuni berbagai suku bangsa (*multi ethnic*).

Kota Padang sebagai kota yang berkembang ditandai dengan sarana dan prasarana umum yang selalu bertambah. Pertambahan hanya pada sarana dan prasarana yang bersifat umum seperti sarana ibadah, perkantoran pemerintah dan swasta. Sedangkan sarana perumahan dan permukiman sangat terbatas. Termasuk perumahan bagi kaum miskin yang berada di pinggiran kota. Berdasarkan kategori kemiskinan, secara materi digolongkan masyarakat miskin karena masih ada yang tinggal di rumah tidak layak huni, dan pekerjaan pokoknya sebagai petani atau berdagang secara kecil-kecilan.

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS 2011) di Provinsi Sumatera Barat terdapat jumlah Rumah Tangga (Ruta) 416.102 = 443.819 Keluarga = 1.813.972 Anggota Rumah Tangga. Di antaranya terdapat di Kota Padang (Anonim, 2010; Hamonangan Ritonga, 2011: 15). Artinya penduduk miskin di Kota Padang sekitar 120.041 jiwa. Mereka dianggap telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kementerian Sosial RI pernah membantu dalam pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH). Ada juga bantuan dari

berbagai instansi pemerintah lainnya atau pihak swasta.

Lokasi penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tahun 2010 berjumlah 100 KK berada dalam dua kecamatan yaitu; Koto Tengah dan Bungus Teluk Kabung. Khusus di Kecamatan Koto Tengah terdapat 50 KK penerima bantuan yang tersebar dalam lima kelurahan; Balai Gadang, Panjang Iku, Koto Pulau, Pasie Nan Tigo, dan Lubuk Buaya.

Penduduk Kecamatan Koto Tengah luasnya 232,25 Km² atau sekitar 33,42 % dari wilayah Kota Padang. Kecamatan Koto Tengah terdiri dari 13 kelurahan. Daerah ini merupakan daerah pantai di bagian barat Kota Padang dan wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Pariaman. Kebanyakan daerah permukiman, lahan kosong dan pertanian. Permukiman penduduk menyebar dan sudah banyak perumahan yang dibangun beberapa pengembang. Terdapat jalan utama yang menghubungkan Kota Padang menuju kota-kota lainnya seperti ke arah utara menuju Bukit Tinggi, Lubuk Sikaping dan terus ke utara memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara mulai dari Kota Padang Sidempuan di daerah Mandailing dan seterusnya sampai ke Medan. Ke arah barat menyusuri pantai melewati Pariaman dan Lubuk Basung selanjutnya memasuki wilayah Provinsi Sumatera Utara sampai ke Sibolga dan Singkil yang termasuk wilayah Provinsi Aceh.

Kecamatan Koto Tengah terbanyak penduduknya yaitu; 162.079 jiwa. Tetapi karena wilayahnya mencapai sepertiga Kota Padang, maka kepadatan penduduknya termasuk rendah yaitu 698 jiwa/Km². Khususnya Kelurahan Lubuk Buaya merupakan pusat aktivitas baru berkembang yang dipengaruhi keberadaan Bandara Udara Internasional Minangkabau dan banyaknya pemukiman baru. Dilihat dari jenis kelamin jumlahnya seimbang laki-laki 81.590 jiwa (50, 34 %) dan perempuan 80.489 jiwa (49,66 %). Penduduk Kecamatan Koto Tengah mengalami pengurangan karena tahun 2009 pernah mencapai 166.033 jiwa. Kondisi tersebut disebabkan makin banyaknya penduduk pendatang pindah ke tempat lain karena dilihat dari kondisi wilayahnya termasuk daerah

Ring Satu bencana alam air pasang (tsunami) (Anonim, 2010: 23-59-63; Haryani, 2011: 16).

Kondisi Sosial Budaya penduduk Kecamatan Kota Tengah separohnya dihuni oleh suku bangsa Minangkabau. Mereka selalu mengetahui asal usul sukunya seperti Chaniago, Jambak, Koto, Melayu, dan Tanjung. Memang tiap orang yang tinggal dalam suatu Nagari atau kelurahan harus diketahui asal usul sukunya karena masing-masing mempunyai kepala suku. Ini dilakukan dalam rangka memelihara adat istiadat Minangkabau misalnya jangan sampai perkawinan yang dilakukan masih terhitung dalam suku yang sama. Bisa juga untuk saling menjaga nama suku masing-masing, sehingga bila ada perselisihan dapat diselesaikan secara adat.

Hal lain terlihat dalam pergaulan hidup sehari-hari saling menggunakan bahasa Minangkabau dialek Padang. Dialek tersebut juga digunakan suku bangsa lain yang tinggal di daerah tersebut karena sebagian lagi terdiri dari pendatang yang berasal dari daerah lain seperti Jambi, Bengkulu, Jawa. Pendatang selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga bila ada pendatang yang sudah lama tinggal dalam satu kelurahan dipastikan yang bersangkutan lancar menggunakan dialek Padang.

Penduduk Kota Padang dan kelurahan dapat dilihat dari penganut agama. Umumnya atau lebih dari 98 % beragama Islam. Selebihnya terdiri dari Penganut agama Nasrani sebagai penganut Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Kondisi tersebut memperlihatkan sebagian besar penduduk berasal dari suku bangsa Minangkabau dan pendatang yang ditandai dengan banyaknya Masjid dan Musholla. Sedangkan penduduk pendatang yang beragama lain merupakan pendatang dari daerah Batak dan keturunan Cina. Sarana Ibadah yang tersediakan kebanyakan di Kecamatan Padang Selatan dan Padang Barat (Anonim, 2010 : 72).

Sarana lingkungan permukiman di lokasi penelitian dapat dikatakan lengkap. Terutama semua jalan sudah teraspal dan dapat menghubungkan antar kelurahan atau antar kecamatan, sehingga dapat dilalui berbagai jenis kendaraan. Hanya wilayah tertentu yang kurang

baik karena rusak ringan seperti daerah rawa, antar gang yang belum ada jalan masuk.

Sarana lain untuk ibadah, pendidikan dan kesehatan. Tempat ibadah kaum muslim paling banyak. Hampir tiap kelurahan ada satu atau dua masjid dan Musholla. Masjid kebanyakan dibangun dengan mengandalkan sumbangan penduduk setempat atau masyarakat sekitarnya dan bantuan dari pihak lain. Sedangkan Musholla kebanyakan didirikan secara perorangan di tanah keluarga. Sarana ibadah bagi pemeluk agama lain berada di luar kedua kecamatan.

Sarana pendidikan dari mulai tingkat pra kanak-kanak sampai menengah ada dalam tiap kelurahan. Sarana pendidikan tercatat sebagai berikut; PAUD ada di tiap kelurahan, sehingga di Kota Padang terdapat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 263 unit, TK 223 unit, SD Negeri 353 unit dan swasta 55 unit, SMP Negeri 37 unit dan swasta 44 unit, SMA Negeri 16 unit dan swasta 32 unit (Anonim, 2010: 81).

Sarana kesehatan berupa Puskesmas terdapat di tiap kecamatan dan Puskesmas Pembantu (Pustu) hanya ada dalam beberapa kelurahan. Namun demikian klinik dan praktek dokter sudah banyak yang terdapat dalam tiap kelurahan. Sarana kesehatan tersebut sangat digunakan penduduk karena pembayarannya terjangkau dan tarifnya murah.

Kementerian Sosial dalam membantu sarana lingkungan permukiman yaitu pembuatan riol dan jalan setapak. Di Kecamatan Koto Tengah telah dibuat riol atau saluran air sepanjang 600 meter untuk melancarkan jalannya air dari jalan ke sungai. Pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.

1. Perencanaan: Sebenarnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah menetapkan keluarga miskin dalam dua kategori yaitu; Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Kategori tersebut berdasarkan 14 indikator kemiskinan secara nasional yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Nama tersebut dipaku dengan tempelan aluminium (plat) yang terpasang di bagian depan rumah atau diatas pintu. Oleh Karena itu sasaran utama keluarga miskin yang sudah terdata

berdasarkan nama dan alamat.

Penerima bantuan dikategorikan keluarga miskin dengan dilihat dari; jenis pekerjaan terdiri dari buruh, tani dan nelayan; tidak memiliki tanah sendiri karena merupakan tanah kaum; tidak memiliki asset, dan tidak memiliki dana. Sejak awal petugas dan pendamping telah mendata calon penerima bantuan. Namun tidak semuanya mendapatkan bantuan karena kuota yang diberikan sangat terbatas. Kebanyakan keluarga yang memperoleh bantuan merupakan keluarga yang menumpang di rumah orang tua atau mertua. Demikian juga dilihat dari pemilikan harta benda (*asset*), hanya sedikit yang memilikinya. Harta benda yang ada di rumahnya merupakan harta benda orang tua atau mertua. Keluarga baru belum bisa membeli harta benda karena penghasilan yang tidak cukup. Penghasilan yang diperoleh digunakan hanya untuk makan anggota keluarga seadanya. Tiap keluarga masih mengandalkan pekerjaannya, apalagi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Biasanya para isteri bekerja di sektor informal dengan cara berjualan di rumahnya atau di tempat lain. Justru ada juga kaum perempuan atau isteri yang menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah. Mereka berjualan di sektor informal seperti berdagang makanan dan minuman kecil di rumahnya atau di tempat lain.

Dana atau bantuan stimulan untuk tiap Kepala Keluarga yang akan disalurkan Rp 10.000.000,- per KK. Dana tersebut diterima dalam dua tahap. Tahap pertama diterima awal Desember 2010 dan dibelanjakan pertengahan Desember 2010. Tahap kedua diterima bulan Januari 2011 dan langsung dibelanjakan. Penerima bantuan hanya menandatangani penerimaan dana sebesar yang ditentukan dari Ketua Kelompok Kerja. Ketua berunding dengan anggotanya mengenai bahan bangunan rumah yang akan dibeli. Selanjutnya penerima bantuan akan dikirim bahan bangunan rumah dari toko yang sudah disepakati. Setelah bahan bangunan rumah diterima, maka keluarga yang bersangkutan mengerjakan perbaikan

rumah yang dikerjakan sendiri atau dengan tukang. Jika dikerjakan sendiri, maka tidak mengeluarkan upah. Gambaran demikian biasa bagi suami yang bekerja sebagai tukang atau yang dapat mengerjakan bangunan rumah, sehingga dikerjakan sendiri. Kalaupun ada anggota keluarga yang membantu sesuai kebutuhan dan biasanya saat pekerjaan berat seperti mengerjakan lantai, dinding, atap dan lain-lain. Anggota keluarga yang membantu akan diberi semacam uang terima kasih di lain waktu.

Selain itu, ada juga yang menjadi tukang seorang mertua. Dengan demikian suami yang bersangkutan harus menyiapkan bahan bangunan rumah yang diperlukan, makan dan minuman. Penyediaannya sesuai dengan hari kerja, sehingga mertuanya bekerja sesuai dengan bahan bangunan yang tersedia tersebut. Oleh karena itu kalau bahan bangunan rumah dapat digunakan untuk yang penting-penting dahulu seperti lantai dari keramik, dinding diplester, dan atap lengkap dengan seng. Bagian dalam yang belum diselesaikan seperti sekat atau kamar ditinggalkan saja sampai adanya dana lagi. Selesai mengerjakannya, mertua yang bersangkutan berhenti bekerja.

Sosialisasi dilaksanakan tim dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI. Kegiatan dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan mengundang beberapa instansi sosial kota dan kabupaten. Intinya menyiapkan atau memberi kesempatan kepada 100 KK – 200 KK keluarga miskin yang akan menerima bantuan perbaikan rumah. Jumlah tersebut berada dalam satu kota dan satu kabupaten, sehingga akan ditentukan satu lokasi dalam satu desa atau kelurahan dalam satu kecamatan.

Diskusi dilakukan untuk menetapkan dan menyiapkan lokasi. Oleh karena itu, Kota Padang menjadi satu lokasi untuk wilayah perkotaan. Hasil diskusi ditetapkan Kecamatan Koto Tangah dan Bungus Teluk Kabung. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menugaskan TSKS dan PSM

untuk melakukan pendataan sesuai dengan arahan yang diberikan. Sasaran penerima bantuan diutamakan bagi keluarga miskin yang rumahnya sudah ditempel plat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sesuai dengan jumlah yang diperlukan, maka dilakukan pendataan keluarga. Ketika sudah ada penetapan calon penerima bantuan, mereka dikumpulkan di kecamatan untuk mendapatkan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pembicara dan pendamping yang telah ditunjuk. Kegiatan tersebut merupakan sosialisasi di tingkat bawah dan hanya berkaitan dengan bantuan dana yang akan diterima, kegiatan yang akan dilakukan dan batas waktunya.

Namun, jarak antara sosialisasi dengan penerimaan bantuan sangat jauh karena bantuan baru turun bulan Desember 2010. Selama itu tidak ada kegiatan berkaitan dengan penerimaan bantuan. Hanya saja, baik penerima bantuan yang sudah pasti maupun keluarga yang sudah didata tetapi tidak menerima bantuan selalu menanyakan ke pendamping. Para pendamping menjelaskan, bahwa bantuan belum diterima dari Kementerian Sosial. Sesuai dengan ketentuan penerima bantuan akan langsung memperbaiki rumahnya masing-masing. Ketika dana sudah masuk ke rekening kelompok, maka dilakukan pertemuan tentang penggunaan dana tahap pertama. Oleh karena itu secara langsung pula perlu menjelaskan kembali kepada penerima bantuan untuk menggunakan dana sesuai dengan keperluan.

Identifikasi dan seleksi secara prosedur atau proses pelaksanaan kegiatan RS RTLH sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI. Dimulai dari pendataan, identifikasi, seleksi, sosialisasi, pertemuan kelompok, pemberian bantuan, pembelian bahan bangunan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang memberikan

rekomendasi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pelaksana, TKSK dan PSM sebagai pendamping lapangan. Kebijakannya; perbaikan rumah tiap kelurahan hanya untuk 10 KK atau 10 rumah, dan tiap rumah berada dalam satu Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial.

- 2. Pelaksanaan:** Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di lokasi penelitian. Program perbaikan rumah tahun 2010 sudah diusulkan secara berjenjang mulai dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang, lalu direkomendasikan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan usulan tersebut Kementerian Sosial telah melakukan verifikasi. Pelaksanaannya pertengahan tahun 2011, tahap awal dimulai dengan sosialisasi dan diakhiri dengan pelaksanaan kegiatan.

Perbaikan Rumah: Pelaksanaan kegiatan terbagi dua. Pertama, kebanyakan dikerjakan sendiri penerima bantuan karena berpengalaman atau bisa menjadi tukang dan hanya dibantu anggota keluarga. Orang yang membantu menyumbang tenaga, ada yang dibayar kemudian sesuai dengan kemampuan pemilik rumah dan ada yang tidak dibayar. Kedua, sebagian membayar tukang dan pekerja. Dengan demikian mereka mencari dana untuk membayar tukang Rp 80.000,- per hari dan pekerja Rp 60.000,- per hari. Pelaksanaan kegiatan secara terus menerus 10–15 hari. Namun ada juga yang dikerjakan selama satu bulan lebih.

Berdasarkan pengamatan dari 40 KK atau rumah yang diperbaiki hanya sekitar 12 rumah (30 %) yang selesai atau sempurna. Kelompok ini memperbaiki rumah di lokasi yang sama dengan ukuran kecil seperti 6 x 5 meter. Masih banyak rumah yang belum selesai karena antara lain; rumah yang diperbaiki menjadi lebih besar, berpindah dari lokasi yang lama, dan menggunakan bahan bangunan lebih banyak. Adanya kearifan lokal; tanah milik kaum – khususnya milik keluarga perempuan atau istri (*Matriach*),

sehingga semua tidak mempunyai sertifikat dan dengan pernyataan yang diketahui lurah dan camat; anggota keluarga yang membantu pelaksanaan tidak mendapat upah karena masih ada hubungan keluarga; biasanya dalam pembangunan pondasi dilakukan secara bergantian dalam kelompok (julo-julo); pemilik rumah menyiapkan antara lain satu kali makan tiap hari kerja, minuman kopi dan makanan kecil.

Pendampingan. Pendampingan dimulai sejak ditetapkan penerima bantuan yang memuat nama dan alamat yang sebenarnya. Pendamping terdiri dari TKSK. Namun, di lapangan TKSK dibantu PSM yang secara bersama-sama sejak pengumpulan data awal. Pendampingan yang dimaksud; 1) Sosialisasi. Saat diadakan sosialisasi, pendamping mendampingi calon penerima bantuan ke kecamatan. Mulai dari memberi undangan, menemani sampai calon penerima bantuan kembali ke rumah. Ada hal tertentu yang perlu dijelaskan seperti syarat-syarat yang diperlukan untuk dilengkapi sesuai kebutuhan; 2) Pendataan. Pendataan yang dilakukan bersama dengan petugas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pendampingan dengan melihat langsung kondisi rumah dan penghuninya; 3) Penerimaan Dana. Pendampingan saat menerima dana di kelurahan dilakukan dalam dua tahap. Pertengahan Juli 2012 dilakukan penerimaan dana tahap pertama Rp 5.000.000,-, penerima bantuan dihadirkan untuk menandatangani uang atas namanya masing-masing. Penerima bantuan diberikan tidak dalam bentuk kontan karena mereka akan menerima bahan bangunan yang diperlukan di rumah masing-masing. Bahan bangunan dibeli di toko bahan bangunan terdekat atas kesepakatan dengan ketua kelompok; 4) Perbaikan Rumah. Secara berkala atau sewaktu-waktu pendamping meninjau perbaikan rumah. Terjadi dialog antara pendamping dengan penerima bantuan. Hal-hal yang dibicarakan berkaitan dengan kekurangan dalam perbaikan rumah seperti dana tidak cukup, perbaikan rumah agak lambat dan sebagainya. Pendamping

hanya memberi saran karena penggunaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing.

Asesmen. Ada dua kemudahan yang diperoleh dari penerima bantuan. *Pertama*, penerima bantuan merupakan penduduk setempat yang menetap. Mereka sangat mengharapkan bantuan karena selama ini tidak dapat mengumpulkan dana untuk perbaikan rumahnya. Sebagaimana diketahui kebanyakan kaum laki-laki bekerja di sektor informal yang memperoleh penghasilan terbatas. Sedangkan tempat tinggal yang ditempati kebanyakan milik kaum dari isterinya. Dengan demikian bisa saja dalam satu rumah terdiri dari lebih dari satu keluarga inti yang disebut keluarga luas (*saparuik*). Model keluarga luas tersebut sangat banyak terjadi, sehingga penerima bantuan banyak atas nama isteri.

Kedua, penerima bantuan mempunyai peluang dalam memperbaiki rumahnya. Berdasarkan pengamatan, hampir semua penerima bantuan membangun kembali rumahnya—kebalikan dari kegiatan dengan memperbaiki bagian rumah yang rusak. Rumah yang akan diperbaiki selama dua tahun ini dianggap belum selesai karena masih ada bagian rumah yang belum diperbaiki. Alasan yang dikemukakan dana atau bantuan yang diterima tidak cukup untuk ukuran rumahnya.

Umur. Penerima bantuan kebanyakan (85 %) pasangan usia produktif yang berumur 18 – 35 tahun, dan sebagian lagi (15 %) berusia lanjut. Pasangan usia produktif menunjukkan bentuk keluarga baru atau keluarga muda yang membentuk rumah tangga. Kebanyakan mereka masih tinggal di rumah keluarga luas istri (*matriachat*). Sedangkan keluarga berusia lanjut merupakan keluarga inti penerima bantuan, sehingga ada kemungkinan keluarga tersebut menampung keluarga inti baru dari anak-anaknya. Dilihat dari jenis kelamin penerima bantuan ada Kepala Keluarga yang laki-laki dan perempuan. Keluarga inti masih dihitung dari pihak ibu, sehingga ada kecenderungan penerima bantuan berdasarkan nama istri

karena keluarga inti baru tersebut tinggal di rumah keluarga istri. Kecuali itu kaum laki-laki sebagai penerima bantuan dianggap sebagai Kepala Keluarga, namun tinggal di rumah mertua atau keluarga istri.

Pendidikan. Pendidikan dari penerima bantuan bervariasi karena masih ada yang tidak sekolah 10 KK dan ada yang pernah duduk di SLTA. Ketika pengamatan di lokasi, banyak kaum ibu yang sudah tua atau janda mendiami rumah miliknya. Mereka ini mengaku tidak sekolah karena kebanyakan hanya mengikuti pengajian pada majelis taklim atau di surau secara informal. Pengertian bersekolah hanya mengikuti pendidikan di sekolah formal seperti SD, SMP, dan SMA. Kepala Keluarga yang menyatakan sekolah yaitu mereka yang pernah mengikuti pendidikan secara formal misalnya lebih dari separoh pernah SD (57,5%), SMP (17,5%) dan SMA (15%). Ini memperlihatkan kondisi mereka seadanya ditandai dengan pendidikannya kebanyakan rendah dan tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

Pekerjaan. Lebih separohnya sebagai buruh (55%) dan selebihnya dagang (20%), jasa transportasi (17,50%), dan ibu rumah tangga (7,50%). Bekerja sebagai buruh lebih banyak dilakukan kaum laki-laki yang melakukan pekerjaan sebagai tukang, nelayan dan penarik becak. Pekerjaan ini sama dengan mereka yang tergolong di bidang jasa transportasi yang bekerja sebagai tukang ojek. Oleh karena itu banyak responden yang laki-laki bekerja apa saja. Ketika ditawarkan pekerjaan tukang, maka ia akan bekerja dalam waktu tertentu dan meninggalkan pekerjaan sebagai tukang ojek. Ketika tidak menjadi tukang, maka ia terus menunggu penumpang di pangkalan ojek atau di tempat tertentu mencari penumpang. Banyak juga ibu rumah tangga yang membuka warung di rumahnya dengan berjualan makanan dan minuman ringan. Membuka warung di rumah sendiri menggunakan bagian depan rumah, sehingga hanya memerlukan membuka dan menutup pintu atau jendela. Atau

menyediakan tempat atau sarana seadanya seperti meja digunakan meletakkan bahan makanan, gantungan plastik atau kayu untuk menyusun makanan atau minuman yang digantung. Pagi dagangan dikeluarkan dan kalau sudah habis atau menjelang sore diangkat ke dalam rumah. Penghasilan yang diperoleh hanya untuk keperluan sesaat. Biasanya membantu suami yang bekerja di sektor informal karena penghasilannya tidak mencukupi. Ada juga kaum ibu secara penuh memang membiayai keperluan rumah tangganya seperti makan sehari-hari dan lainnya. Biasanya mereka terdiri dari janda atau kepala keluarga tunggal, sehingga berdagang di rumah merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keluar rumah hanya tiga hari sekali untuk belanja barang dagangan atau keperluan lain. Di rumah dapat menambah penghasilan sambil menjaga anak-anak.

Penghasilan selalu dikaitkan dengan jenis pekerjaan. Penghasilan keluarga terbagi dua; penghasilan Kepala Keluarga dan penghasilan seluruh anggota keluarga. Tempat tinggal keluarga luas sebagian besar tinggal di rumah isteri (matrilokal) menunjukkan dalam keluarga luas ada penghasilan Kepala Keluarga dan penghasilan anggota keluarga lainnya. Penghasilan Kepala Keluarga kebanyakan antara Rp 600.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,- (70%), dan selebihnya di bawah Rp 600.000,- (25%). Hanya sedikit yang berpenghasilan di atas Rp 1.500.000,- (5%). Ini menunjukkan penghasilan rata-rata Rp 20.000,- per hari. Seiring dengan jenis pekerjaan yang sebagian besar sebagai buruh dan jasa, sehingga dapat dikatakan penghasilan mereka rendah dan tidak tetap. Penghasilan tersebut hanya memenuhi kebutuhan makan anggota keluarga sehari-hari.

Sedangkan penghasilan seluruh anggota keluarga tidak jauh berbeda dengan jumlah penghasilan Kepala Keluarga. Masih banyak yang berpenghasilan Rp 600.000,- sampai dengan Rp 1.500.000,- per bulan (40%), selebihnya di bawah Rp 600.000,- (7,50%)

dan di atas Rp 1.500.000,- (2,50%). Ini menunjukkan penghasilan Kepala Keluarga masih menjadi andalan keluarga dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Penghasilan keluarga, separohnya tidak memberi jawaban. Artinya data yang diperoleh tidak mendukung adanya jawaban yang pasti. Terutama dialami keluarga luas karena masing-masing keluarga dengan penghasilan yang diperoleh untuk keperluan keluarga itu sendiri, sehingga agak sulit menghitung pengeluaran seluruh anggota keluarga. Alasannya penghasilan keluarga harus dihitung dari keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah dan siapa saja anggota keluarga yang memperoleh penghasilan untuk dibawa pulang. Selain itu harus menghitung untuk apa saja pengeluaran dari keluarga, sehingga harus ada pengeluaran yang bersifat pribadi dan untuk kepentingan bersama.

Dua kasus sebagai contoh dari Kelurahan Lubuk Buayo. Pertama, keluarga A - suami tinggal di rumah keluarga isteri. Mereka sebagai keluarga inti dengan dua anaknya yang masih kecil. Suami bekerja sebagai tukang dengan upah Rp 80.000,- per hari, tetapi yang dibawa pulang hanya Rp 50.000,- karena digunakan untuk ongkos dan bayar hutang. Suami memperbaiki rumah isterinya tanpa ongkos, bahkan menambah bahan bangunan dari barang-barang sisa di tempat kerja. Isteri tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga. Kedua, keluarga B - suami tinggal di rumah keluarga isteri, mereka keluarga luas terdiri dari keluarga inti suami-isteri dan tiga anak, serta tinggal juga bapak dan ibu mertua. Suami bekerja sebagai buruh dan isterinya berdagang makanan minuman ringan. Penghasilan keluarga masing-masing untuk memenuhi kebutuhan keluarga inti masing-masing, sehingga keluarga inti senior tidak ada gabungan penghasilan.

Jumlah Tanggungan. Tanggungan keluarga responden diketahui tergantung bentuk keluarga yaitu keluarga inti atau keluarga luas. Bentuk keluarga inti, biasanya hanya terdiri dari suami-isteri dan anak-anak

yang berjumlah dua orang. Bentuk keluarga inti hanya 25%. Sedangkan bentuk keluarga luas, tanggungan keluarga tergantung yang dominan. Oleh karena itu tanggungan keluarga lebih dari tiga orang (75%). Sebab dalam satu rumah bisa saja yang dominan mertua karena sebagai pemilik rumah dan biasanya anak-anak atau menantunya belum mampu dalam ekonomi, sehingga harus ditanggung sebagiannya seperti makan sehari-hari. Menantu penghasilannya untuk keperluan tertentu atau keperluan sesaat seperti membayar listrik dan air minum.

Ada juga menantu yang lebih dominan. Hal ini terjadi walaupun menantu menumpang di rumah mertuanya, ia juga sebagai anggota keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Oleh karena itu penghasilan yang diperoleh untuk menanggung keluarga luas yang tinggal dalam satu rumah. Hal ini terjadi biasanya sang menantu mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan cukup atau mapan, sehingga rumah belum menjadi prioritas – terpenting menanggung anggota keluarga yang ada.

Informasi RS-RTLH. Pengetahuan tentang bantuan perbaikan rumah diakui penerima bantuan (100 %) diperoleh dari pendamping sebagai petugas lapangan yang ditugaskan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Alasannya pendampinglah yang secara terus menerus berada di sekitar mereka. Termasuk seorang tokoh masyarakat mengakui tidak tahu informasi bantuan bagi keluarga miskin tersebut. Biasanya bantuan diberikan pejabat setingkat wali kota atau anggota dewan berkaitan dengan posisinya menjelang pemilihan kepala daerah. Bagi penerima bantuan informasi tidak tahu karena dana yang diperoleh dari BRI dan dibagikan langsung kepada mereka. Artinya dana berasal dari Negara atau pemerintah pusat. Jarang yang menyebutkan Kementerian Sosial RI.

Kebutuhan Rumah. Kebutuhan rumah menjadi penting dengan banyaknya pola keluarga luas yang menampung dari pihak perempuan (Matrilokal). Dipastikan tiap rumah yang dihuni oleh satu keluarga luas

yang terdiri dari beberapa keluarga inti lebih banyak laki-lakinya sebagai orang yang datang (*sumando*). Rumah yang diperbaiki menjadi lebih besar karena yang akan menempati keluarga besar, sehingga dalam pelaksanaan kekurangan dana untuk membeli bahan bangunan dan ongkos tukang. Biasanya keluarga yang bersangkutan berhutang ke toko bahan bangunan. Pembayaran dilakukan dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan. Kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal menjadikan pemiliknya harus memenuhi berbagai bahan bangunan yang diperlukan. Namun, masih banyak yang belum bisa menyelesaikan rumahnya. Hal ini terjadi karena kemauan lebih besar dibandingkan dengan kemampuan atau modal yang dimiliki.

Bagi keluarga yang memperbaiki rumahnya menggunakan jasa tukang dipastikan ongkosnya secara harian atau borongan, upah seorang tukang Rp 70.000,- atau Rp 80.000,- per hari dan seorang pekerja Rp 60.000,- per hari. Kepala Keluarga mencari pinjaman untuk membayar upah tukang atau pekerja sesuai dengan perjanjian. Hal ini terpaksa dilakukan karena mereka tidak punya pilihan mencari tambahan karena pekerjaan yang dilakukan paling-paling hanya dapat disisihkan sekitar Rp 20.000,- atau Rp 30.000,-. Apalagi kalau tidak bekerja tentunya tidak ada penghasilan. Pinjaman dana sebagai biaya tambahan banyak yang diperoleh dari anggota keluarga juga. Dengan demikian pembayarannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Walaupun demikian, biasanya pemberi pinjaman yang akan menerima kelebihan dana yang telah dipinjamkan. Cara tersebut ditempuh sebagai tanda terima kasih dari peminjam. Dibandingkan kalau keluarga yang bersangkutan meminjam kepada orang lain yang menawarkan pinjaman, tentunya dibebani waktu yang sudah ditentukan ditambah bunga.

Ada juga yang membantu dengan memberi pinjaman tanpa bunga. Namun

ditentukan waktunya seperti dalam waktu satu tahun atau dua tahun. Penentuan waktu tersebut oleh si peminjam sebagai tabungan dan akan digunakan saat tertentu atau ada rencana secara berjangka seperti persiapan perkawinan anaknya, mendirikan rumah dan lain-lain. Perjanjian tetap saja diberlakukan dengan perhitungan yang sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga peminjam akan melunasinya. Cara demikian biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dianggap lebih kaya dari anggota keluarga.

Kondisi Sosial. Secara sosial, kondisi rumah menjadi penting bagi keluarga yang bersangkutan. Perbaikan rumah telah meningkatkan derajat kehidupan di masyarakatnya, sehingga pemilik rumah dapat disamakan dengan pemilik rumah lainnya yang dibangun dengan biaya sendiri. Fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga luas yang memberi kesan bagi keluarga tersebut. Terutama dilihat dari kepemilikan tanah, pada umumnya pemilik rumah dan pekarangan kaum perempuan (*Matriarchat*). Oleh karena itu kepala keluarga lebih banyak kaum perempuan karena kaum mereka yang memiliki hak. Selain itu kaum laki-laki yang tercatat sebagai penghuni rumah tersebut dapat dikatakan semuanya sebagai pendatang dari daerah Minangkabau atau dari luar Kota Padang.

Kondisi Psikis. Dirasakan rumah baru lebih nyaman karena di bangunan sesuai dengan kebutuhan kesehatan seperti ventilasi, ruang keluarga dan ruang tamu. Rumah lama kebanyakan belum memenuhi syarat kesehatan karena ada bagian tertentu yang tidak dipelihara dengan baik. Kenyamanan dirasakan sangat membantu penerima bantuan yang memperlihatkan bertambahnya bahan bangunan rumah atau baru. Keluarga mulai memfungsikan ruang tamu sebagai tempat berkumpul anggota keluarga lain.

Pedampingan. Sebagai pendamping lapangan ditunjuk TKSK. Namun kenyataannya TKSK dibantu oleh PSM dari tiap kelurahan. Kedua unsur tersebut tidak

dapat dipisahkan karena seluruh kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan sosial secara berjenjang saling membutuhkan dan saling membantu. Ditambah lagi dengan adanya Seksi Kesejahteraan Sosial yang ada di tiap kelurahan. Bedanya Seksi Kesejahteraan Sosial hanya bertugas di kantor kelurahan. Sedangkan PSM sebagai orang yang bertugas di masyarakat.

Umumnya yang diangkat sebagai TKSK terdiri dari kaum perempuan. Kebanyakan yang sudah berkeluarga dan kedudukannya sebagai ibu rumah tangga. Memang persyaratan untuk menjadi TKSK tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Tetapi pemilihan TKSK dari kaum perempuan diartikan mereka lebih aktif di masyarakat, pekerjaan yang dilakukan tidak terikat dan dapat dilakukan sesuai keperluan, dan tidak banyak tuntutan.

Di lokasi penelitian TKSK terdiri dari ibu rumah tangga. Keberadaan mereka di lapangan dapat memperlancar seluruh kegiatan yang berkaitan dengan PSKS dan PMKS. Kegiatan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan stimulan dalam memperbaiki rumah tidak layak huni.

Pendamping hanya menerima honor dan uang perjalanan. Tidak ada sarana lainnya yang diberikan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pendamping menggunakan sarana kerja milik pribadi seperti lap top dan motor. Honor dan uang perjalanan yang diterima digunakan juga untuk keperluan lain seperti menyusun dan menggandakan laporan, membeli makanan dan minuman. Jika dibandingkan dana yang diterima dengan pengeluaran tidak seimbang karena lebih besar pengeluaran. Pendamping yang melakukan kegiatan pendampingan terhadap penerima bantuan berbeda dengan pendamping KUBE yang mendapat dana pendampingan selama melakukan kegiatannya. Oleh karena itu, menurut pendamping perlu disesuaikan dengan keperluannya. Permintaan hanya satu yaitu minta disediakan kendaraan

bermotor roda dua untuk memudahkan pemantauan dan kegiatan lainnya.

3. Realitas Implementasi Bantuan Rumah

Terminasi. Terminasi atau pemutusan kegiatan bagi penerima bantuan ketika dana telah diterima dalam dua tahap. Semestinya terminasi dilanjutkan dengan kegiatan lain sebagai upaya meningkatkan daya keluarga miskin. Belum ada kegiatan lain atau kegiatan baru bagi penerima bantuan baik dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang atau instansi pemerintah lainnya.

Penerima bantuan melakukan kegiatan semula. Belum ada pengaruh perkembangan dari perbaikan rumahnya. Menurut keterangan dari Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kota Padang, mereka yang menerima bantuan belum ada kebijakan secara pasti. Boleh saja berbagai kegiatan diteruskan oleh instansi lain karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang akan memperhatikan PMKS lain yang belum memperoleh bantuan.

Jenis Bantuan Rumah lainnya. Terdapat enam jenis bantuan yang dianggap pro rakyat yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta. Jenis bantuan untuk rakyat yaitu: (a) Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Program Kementerian Sosial RI, perbaikan biayanya Rp 10.000.000,- per KK atau rumah sebanyak 100 rumah. Pembuatan sarana lingkungan Rp 40.000.000,- hanya dua kegiatan. (b) Bantuan Rumah Janda Perintis Kemerdekaan. Program Kementerian Sosial RI, perbaikan biayanya Rp 20.000.000,- hanya satu rumah. (c) Bantuan Keswadayaan Rakyat. Program Kementerian Perumahan Rakyat, perbaikan rumah Rp 5.000.000,- per rumah dan sarana lingkungan Rp 4.000.000,-. (d) Bantuan Stimulan Swadaya Masyarakat. Program Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Sumatera Barat, perbaikan rumah ada yang diterima dalam bentuk dana Rp 15.000.000,-, bahan bangunan rumah Rp 3.000.000,-, Rp 50.000.000,- terdiri dari bahan bangunan (fisik) dan keperluan lain (non fisik), dan bedah rumah. Kegiatan dilakukan hanya dalam satu kelurahan dan

satu kecamatan. (e) Rehabilitasi Rumah Rakyat (Rekompak). Program dari Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM), perbaikan rumah sesuai dengan kategori kerusakan yang ditentukan konsultan dan juru bangunan. Misalnya; rusak ringan dibantu sebesar Rp 5.000.000,- per rumah, dan rusak berat dapat dibantu paling tinggi Rp 20.000.000,- per rumah.

Faktor Berpengaruh terbagi dua yaitu, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor Pendukung meliputi, pendamping melakukan kegiatan secara bertahap mulai dari pendataan, pembagian dana, pemantauan, dan menyusun laporan, perbaikan rumah secara gotong royong (*goro*) dan *julo-julo*. Kebanyakan yang membantu masih ada hubungan keluarga dengan pemilik rumah. Faktor Penghambat meliputi, belum ada pembinaan lanjut dari instansi sosial dan dana kurang.

E. Rangkuman

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi yang memberikan rekomendasi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sebagai pelaksana, TSKS dan PSM sebagai pendamping lapangan. Kebijakannya; perbaikan rumah tiap kelurahan hanya untuk 10 KK atau 10 rumah, dan tiap rumah berada dalam satu Rukun Tetangga (RT). Hal ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial. Kesimpulannya, proses pelaksanaan kegiatan RS RTLH sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan – Kementerian Sosial RI. Penerima bantuan dikategorikan keluarga miskin karena Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang menggunakan 14 indikator kemiskinan. Diperoleh data keluarga miskin; pekerjaan terdiri dari buruh, tani dan nelayan; tidak memiliki tanah sendiri – hanya tanah kaum; tidak memiliki asset, dan tidak memiliki dana. Dana bantuan yang diterima sebesar Rp 10.000.000,- per KK diterima dalam dua tahap. Seluruh dana tersebut dibelikan bahan bangunan rumah sesuai dengan keperluan. Pelaksanaan kegiatan terbagi dua. *Pertama*, kebanyakan dikerjakan sendiri

penerima bantuan karena berpengalaman atau bisa menjadi tukang dan hanya dibantu anggota keluarga. Orang yang membantu menyumbang tenaga, ada yang dibayar kemudian sesuai dengan kemampuan pemilik rumah dan ada yang tidak dibayar. *Kedua*, sebagian membayar tukang dan pekerja. Dengan demikian mereka mencari dana untuk membayar tukang Rp 80.000,-/hari dan pekerja Rp 60.000,- per hari. Pelaksanaan kegiatan secara terus menerus 10 – 15 hari. Namun ada juga yang dikerjakan selama satu bulan lebih.

Berdasarkan pengamatan dari 40 KK atau rumah yang diperbaiki hanya sekitar 12 rumah (30 %) yang selesai atau sempurna. Kelompok ini memperbaiki rumah di lokasi yang sama dengan ukuran kecil seperti 6 x 5 meter. Masih banyak rumah yang belum selesai karena antara lain; rumah yang diperbaiki menjadi lebih besar, berpindah dari lokasi yang lama, dan menggunakan bahan bangunan lebih banyak. Adanya kearifan lokal; tanah milik kaum khususnya milik keluarga perempuan atau istri (*Matriachat*), sehingga semua tidak mempunyai sertifikat dan dengan pernyataan yang diketahui lurah dan camat; anggota keluarga yang membantu pelaksanaan tidak mendapat upah karena masih ada hubungan keluarga; biasanya dalam pembangunan pondasi dilakukan secara bergantian dalam kelompok (*julo-julo*); pemilik rumah menyiapkan antara lain satu kali makan tiap hari kerja, minuman kopi dan makanan kecil.

Masukan yang diajukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang perlu menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah. Ke depan atau tahun 2012 biaya perbaikan rumah yang layak Rp 15.000.000,-. Alasannya biaya harus disesuaikan dengan kenaikan harga bahan bangunan. Ke depan bantuan perbaikan rumah disesuaikan dengan bantuan kebutuhan dan tidak disamakan. Model rumah PNPM dapat ditiru karena menggunakan konsultan dan fasilitator kelurahan. Perbaikan rumah disejajarkan dengan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan humanistik karena rumah secara budaya berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga inti dan sedapat mungkin menampung keluarga luas matrilineal. Selain itu

perlu dijelaskan fungsi secara cultural, structural dan situasional.

Pustaka Acuan

- Alfitri, 2011. *Community Development. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim, 2010. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.
-, 2011. *Padang Dalam Angka 2010*. Padang: Bappeda Kota Padang dan BPS Kota Padang.
-, 2003. "Kota Padang" dalam *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. (Editor; FH Santoso), hal 108 – 114.
-, 2008. *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007*. Jakarta: BPS.
- Azwar, 2005. *Eksistensi Tanah Ulayat Kaum dan Dinamika Relasi Sosial Masyarakat Minangkabau di Wilayah Pinggiran Kota*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand
- Haryani, 2011. *Bunga Rampai Tata Ruang Kota Padang*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Miftahul Huda, 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Musyair Zainuddin, 2010. *Pelestarian Eksistensi Dinamis Adat Minangkabau*. Jogjakarta; Ombak
- Sjafnir Dt Kando Marajo, 2006. *Sirih Pinang Adat Minangkabau*. Padang: Sentra Budaya.
- Suradi, dkk (2012; 12). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni*. Jakarta: P3KS Press.

**Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Luar Panti
dalam Mengentaskan Korban Penyalahgunaan Napza di Propinsi Bali
*The Implementation of Non-Institutional Social Rehabilitation on Raising
Drug Abuse Victims in Bali Province***

Sri Kuntari*

*Peneliti Madya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Badiklit Kesos
Kementerian Sosial RI, Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Nitipuran Yogyakarta.
Telp (0274) 377265 Fax (0274) 373530 Email: srikuntari48@yahoo.com
Diterima 12 Februari 2013, disetujui 6 Mei 2013

Abstract

Various types of drugs flow through illegally to Indonesia, so that it can be categorized the state is in dangerous condition. Indonesian position has been seen around the world as a state that used to be a place of consumers, then becomes a place of transit and drugs producer, proved by frequent findings of big scale drug producers in several place. The fact is supported by drug abuse data received by Supreme Court that the cases have increased 40 percent only in one year. The increase of drug abusers signs there is a need of an institution to rehabilitate ex drug victims. The government takes a role to help drugs victims through non-institutional social rehabilitation program. The goal of this research is to get a description on its program and to know the handicap and supporting factors of the program on lifting the victims from drugs addiction in Bali Province. This research is done descriptively, the informant (as data resources) are ex-clients and Bali Social Agence apparatus working for drugs victims rehabilitation program. Data are analyzed through quantitative technique. The research finds that the rehabilitation is implemented as non-institution regulation, and in the process of rehabilitation the victims are given social, mental, skills guidance and health check-up. The success of rehabilitation can be seen from the working togetherness between related agencies and non-governments organizations, and its continuity in guiding ex-victim in Joint Business Group (Kube). The handicap is found in the lack of ex-victims working spirit, and their lives styles are difficult to be motivated to chance. There by, to increase clients enthusiasm to follow the rehabilitation activities, the kinds of skill given should be updated as market needs, so that kube can be developed and ex-clients will not relaps, it needs continuous monitoring.

Keywords: Social Rehabilitation-Drugs Abuses-Non-institution

Abstrak

Berbagai jenis napza mengalir deras ke Indonesia, sehingga negara dapat dikategorikan dalam kondisi bahaya napza. Posisi Indonesia menjadi sorotan dunia karena yang semula menjadi konsumen, kemudian menjadi tempat transit dan produsen napza, terlihat di berbagai tempat ada pabrik napza dalam skala besar. Kenyataan ini semakin diperkuat oleh data perkara penyalahgunaan napza yang diterima Mahkamah Agung meningkat 40 persen hanya dalam satu tahun. Peningkatan jumlah penyalahgunaan napza mengisyaratkan adanya kebutuhan institusi untuk melakukan proses rehabilitasi bagi penyalahguna napza. Pemerintah mengambil peran membantu pecandu napza dengan program rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di luar panti. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dalam mengentaskan korban penyalahgunaan napza, lokasi penelitian di Provinsi Bali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, informan adalah mantan klien dan aparat Dinas Sosial Provinsi Bali yang menangani rehabilitasi korban penyalahgunaan napza luar panti. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan rehabilitasi sudah sesuai dengan pedoman rehabilitasi sosial secara luar panti, dalam proses rehabilitasi dilakukan bimbingan sosial, mental, keterampilan dan pemeriksaan kesehatan. Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dapat terlihat dari adanya dukungan dan kerjasama antarsektor dan LSM peduli napza, dan keberlangsungan kegiatan Kube mantan klien. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya etos kerja dan sikap mental yang sulit diberi motivasi untuk berubah. Oleh karena itu, agar klien antusias dalam mengikuti kegiatan, jenis keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pasar, agar Kube dapat berkembang dan mantan klien tidak *relaps*, sehingga perlu dilakukan monitoring secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial-Napza-Luar Panti

A. Perkembangan Peredaran Napza

Napza adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sebagaimana ditetapkan dalam UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Napza akan berguna apabila digunakan dalam bidang pengobatan, tetapi dalam kenyataannya zat ini sering disalahgunakan sehingga menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi serta merusak kehidupan maupun kesejahteraan umat manusia. Pada saat ini, penyalahgunaan maupun peredaran napza sudah merambah di semua lapisan masyarakat, dalam hal keterlibatan lapisan masyarakat di negara Indonesia memasuki tahapan *nation at risk*, karena ibu rumah tangga, anak sekolah, mahasiswa, seniman, artis, dan pengusaha telah terjebak dalam sindikat napza, mereka ada yang terlibat sebagai konsumen maupun sebagai pengedar (Sunyoto, 1999). Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia telah membuat suatu ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, salah satu bagiannya yaitu pasal 23 ayat 2 secara tegas melarang perbuatan menyimpan untuk memiliki atau menguasai napza, yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 10 tahun, sementara bagi pemakai diancam maksimum tiga tahun penjara. Dewasa ini penerapan hukuman bagi pengedar napza atas aturan hukum sebagaimana tersebut di atas realitanya masih sangat ringan, dan penyalahguna napza pada umumnya divonis dengan rehabilitasi, hal ini berdampak meningkatnya perkembangan penyalahgunaan dan peredaran napza. Menurut Pusdatin jumlah penyalahguna napza mencapai 80.269 orang pada tahun 2008. Sedangkan menurut data BNN pada tahun 2008 diperkirakan jumlah penyalahguna napza di Indonesia mencapai 3,6 juta orang (<http://yoursos.depsos.go.id/modulas.php?name.new&file,artikel&sid;6.2>). Dalam data yang dikeluarkan oleh Pusdatin tahun 2010 penyalahguna napza terbanyak di Provinsi Jawa Timur yaitu 8.804, menyusul Provinsi Jawa Barat 5.870, Maluku 4.819, dan Provinsi Bali sebanyak 1.815 orang, data korban penyalahguna napza ini merupakan fenomena

gunung es, dimana yang terlihat di permukaan lebih sedikit, sementara yang tidak terdeteksi jauh lebih banyak.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia, sehingga dimungkinkan para pengedar napza dengan leluasa dapat mengedarkan dan menjadi lahan subur bagi para bandar napza karena pangsa pasarnya sangat banyak. Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal dengan sebutan *the last paradisc in the world* dan *the morning of the world* itu dalam perkembangannya menjadi daerah yang sangat terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis benda haram salah satunya adalah napza (OC Kaligis, 2002). Peredaran napza merupakan bagian dari strategi global untuk menghancurkan budaya dan generasi muda, untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah berusaha membantu korban penyalahguna napza dengan melakukan rehabilitasi sosial dengan sistem panti maupun non panti. Sejak tahun 1985 Provinsi Bali melalui mekanisme Dekonsentrasi telah dilaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza melalui luar panti. Berdasarkan hal ini, maka Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi penelitian, maka rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dalam mengentaskan korban penyalahgunaan napza serta bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dalam mengentaskan korban penyalahgunaan napza.

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran pelaksanaan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dalam mengentaskan korban penyalahgunaan napza. Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Sosial dan berbagai pihak yang berkompeten dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial luar panti dalam mengentaskan korban penyalahgunaan napza dan diharapkan dapat menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan tentang pelayanan sosial bagi korban penyalahgunaan napza secara luar panti. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Menurut Suharsimi (1995) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penentuan subjek dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dinas Sosial Provinsi Bali telah melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza luar panti, yaitu sebagai upaya untuk membantu mengentaskan para korban penyalahgunaan napza dari jerat napza sehingga dapat bersosialisasi serta mampu mandiri. *Key informan* dari aparat Dinas Sosial Provinsi Bali yang menangani rehabilitasi korban penyalahgunaan napza luar panti dan informan adalah 30 mantan klien yang sudah selesai mengikuti rehabilitasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, artinya tidak menguji hipotesis tertentu, tetapi mengumpulkan informasi untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, dan suatu gejala pada saat penelitian dilaksanakan. Sedang pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan panduan wawancara dan telaah dokumen.

1. **Pengertian Napza:** Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut napza) menyebutkan bahwa yang dimaksud narkotika yang sering juga disebut napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Napza memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, daya toleran (penyesuaian) dan daya hobisual (kebiasaan) yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan pemakai napza tidak dapat lepas dari cengkeraman napza (Subagyo Partodiharjo. 2007: 11). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, jenis napza dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu: napza golongan I adalah napza yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi, sehingga tidak boleh digunakan kecuali untuk penelitian

atau ilmu pengetahuan, contohnya: ganja, heroin, kokain, morfin, opium dan lain-lainnya. Napza golongan II, adalah napza yang memiliki daya adiktif kuat, golongan ini bermanfaat untuk pengobatan, sedangkan napza golongan III daya adiktifnya ringan juga digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Napza jenis ini antara lain: ganja, kokain, heroin, morfin, methadon, petidin, dan lain-lainnya.

Psikotropika adalah zat atau obat bukan napza, baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku (Subagyo Partodiharjo. 2007: 15). Sedangkan zat adiktif adalah zat yang bukan jenis napza maupun psikotropika yang dapat menyebabkan ketagihan dan perubahan khas termasuk fisik, mental, emosi, sikap, dan perilaku. Napza tergolong zat psikoaktif, karena dapat mempengaruhi otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran (Sydes Sudyarto: 2003).

Secara umum napza tidak berbahaya apabila pemakaiannya sesuai dengan fungsinya, tetapi jika orang sudah tergantung pada napza, ia akan menjadi pecandu dan apabila pemakaiannya secara terus menerus dapat merusak syaraf, paru-paru, dan liver. Di samping itu, dapat merusak fisik, psikis, dan mengganggu fungsi sosial bagi pemakaiannya.

2. **Penyalahgunaan Napza:** Penyalahgunaan napza merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik, digunakan dalam jangka waktu tertentu dan dapat menimbulkan disfungsi sosial. Napza yang seringkali digunakan mempunyai pengaruh terhadap sistem syaraf pusat. Penyalahgunaan napza adalah orang yang menggunakan napza tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta melanggar hukum (UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika). Sementara itu penyalahgunaan napza di luar indikasi medis mengakibatkan penggunaanya tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dan menunjukkan perilaku

maladiktif, hal ini akan berakibat *intoksikasi* atau perubahan mental dan perilaku akibat langsung dari penggunaan zat psikoaktif/napza (Eko Prasetyo: 2007).

Seseorang yang sudah kecanduan napza akan mempunyai kecenderungan untuk selalu menambah dosis napza yang digunakan, sehingga dapat berakibat over dosis dan meninggal dunia. Penyalahgunaan napza merupakan pelanggaran hukum, sehingga dilakukan upaya penindakan secara hukum dengan maksud membuat jera para pelaku penyalahguna dan pengedar serta bandar napza dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Sedangkan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa seseorang yang menyalahgunakan napza dan terbukti sebagai korban, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sedangkan pecandu yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtuanya tidak dituntut pidana. Demikian juga dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2011 tentang Narkotika pasal 24 mewajibkan pecandu narkotika/napza untuk melapor kepada institusi wajib lapor (IPWL). Sementara itu, menurut Kepala Puslitdatin Badan Narkotika Nasional (BNN) Darwin Butar Butar, masyarakat masih beranggapan jika pengguna napza melaporkan akan diproses secara hukum. Peraturan itu ditujukan untuk membantu para pecandu mendapatkan pelayanan rehabilitasi (Koran Tribun, 23 Mei 2012).

Ada beberapa alasan seseorang menggunakan napza, di antaranya untuk: a) Melepaskan diri dari kesepian, rasa frustrasi dan kegelisahan yang diakibatkan dari adanya problem hidup yang tidak dapat diatasi, b) Menunjukkan keberanian dan mengikuti kemauan teman-teman sebaya dengan alasan memupuk solidaritas, c) Melepaskan rasa keingintahuan dan iseng menggunakan napza. Hasil penelitian yang dilakukan Dadang Hawari (1996), seseorang menjadi pecandu napza karena: a) Kondisi keluarga *modern* yang cenderung *permissive* dan kurang memperhatikan kondisi anak karena kesibukan, b) Semakin mudahnya

zat jenis psikotropika tertentu diperoleh di pasaran “bebas”, c) Pengaruh teman yang sudah terbiasa menyalahgunakan napza.

Penggunaan napza di luar pengawasan medis dan digunakan secara berlebihan akan beresiko merusak kesehatan dan menimbulkan sikap dan perilaku anti sosial. Resiko yang harus ditanggung oleh pengguna napza yang tidak berkonsultasi dengan dokter antara lain: a) Dapat merusak kesehatan baik jasmani, rohani maupun sosial, b) Menimbulkan gangguan perkembangan jiwa, dimana dalam kondisi normal seseorang tidak akan melakukan perilaku menyimpang, tetapi karena pengaruh napza mempunyai keberanian untuk melakukan tindakan irrasional, c) Pada wanita yang sedang mengandung dapat mengakibatkan bayi yang baru lahir menderita cacat dan kelainan bawaan serta merusak mental, d) Dapat merusak keluarga, karier, sekolah, ekonomi keluarga, karena tidak ada pecandu yang dapat hidup secara sehat.

Berdasarkan penghitungan tingkat prevalensi, pecandu narkotika/napza di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 2,2 persen dari penduduk rentan terjerat napza yang berjumlah 175 juta jiwa. Diprediksi akan meningkat pada tahun ini menjadi 2,44 persen dari total jumlah penduduk rentan (Darwin Butar Butar: 2012). Penduduk rentan adalah mereka yang berusia 10-59 tahun, dan yang paling rawan melakukan penyalahgunaan napza adalah kelompok usia remaja, karena pada usia ini mereka memiliki rasa keingintahuan yang besar, belum dapat berfikir panjang mengenai resiko yang diakibatkan dari penggunaan napza, sehingga perlu adanya kewaspadaan baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak dan remaja tinggal. Selain itu upaya penyembuhan bagi yang sudah terlanjur menjadi pecandu perlu terus dilakukan, salah satunya upaya penyembuhan bagi penyalahguna napza adalah melalui rehabilitasi sosial yang dilakukan secara luar panti. Rehabilitasi sosial luar panti merupakan suatu proses pemulihan secara terpadu meliputi aspek fisik, mental,

sosial, dan vokasional yang dilaksanakan di luar lembaga, agar penyalahguna dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat (Departemen Sosial RI: 2007).

3. Tahapan Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Korban Penyalahgunaan Napza

Penanganan adiksi napza di Indonesia selama ini umumnya hanya terfokus pada rehabilitasi yang dilakukan di dalam panti, namun karena keterbatasan panti tidak semua korban penyalahguna napza dapat mengikuti rehabilitasi di dalam panti. Oleh karena itu, untuk membantu mengentaskan korban penyalahguna napza pemerintah melalui Dinas Sosial di masing-masing provinsi melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahguna napza melalui sistem luar panti. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial luar panti mencakup tahapan:

- a. Sosialisasi: merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang program rehabilitasi sosial luar panti kepada pihak-pihak terkait agar terdapat kesamaan persepsi dan tindakan dalam melaksanakan program
- b. Pembekalan Petugas Pendamping: merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping agar mampu melaksanakan rehabilitasi sosial luar panti secara tepat.
- c. Identifikasi, Orientasi, dan Seleksi: merupakan proses menemukan, menginventarisasi, memilih, dan menentukan calon klien serta lokasi kegiatan. Dalam melaksanakan identifikasi, orientasi dan seleksi, dinas/ instansi sosial dapat bekerjasama dengan instansi terkait serta lembaga lain seperti Orsos/LSM/RBM yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
- d. Bimbingan Fisik dan Kesehatan: merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi fisik dan kesehatan klien rehabilitasi sosial luar panti. Pelaksanaan bimbingan ini sifatnya komprehensif terintegrasi, artinya

memberikan bimbingan bersama-sama dan saling terkait dengan jenis bimbingan lain.

- e. Bimbingan Mental Spiritual: merupakan upaya yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental spiritual bagi klien rehabilitasi sosial luar panti. Bimbingan ini dapat diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ibadah, etika pengantar, penanaman budi pekerti dan sikap yang normatif.
- f. Bimbingan Sosial: merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial klien sehingga mampu melaksanakan peran sosial secara normatif.
- g. Bimbingan Keterampilan (vokasional): merupakan usaha-usaha yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat klien sebagai investasi bagi diri mereka guna menunjang masa depan dan membangun kemandirian.
- h. Terminasi dan Rujukan: merupakan proses pengakhiran setelah klien selesai mengikuti program. Rujukan adalah proses menghubungkan klien dengan pelayanan lain yang dibutuhkan sesuai masalah dan kebutuhannya (Depsos RI: 2007).

Diharapkan dengan proses rehabilitasi sosial luar panti, penyalahguna napza dapat terentaskan dari ketergantungan dan mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk menopang kehidupannya serta dapat bergaul dan diterima oleh masyarakat di lingkungannya.

B. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Luar Panti di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Dinas Sosial Provinsi Bali, pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang dilakukan secara luar panti memerlukan tahapan kegiatan pelayanan sosial yang meliputi:

1. **Sosialisasi:** Dalam tahap kegiatan sosialisasi kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian informasi tentang program rehabilitasi sosial

luar panti kepada pihak-pihak yang terlibat agar terdapat kesamaan persepsi dan tindakan dalam melaksanakan program kegiatan. Tujuan dilakukan sosialisasi adalah menyebarluaskan informasi program dan kegiatan kepada calon sasaran, meningkatkan pemahaman kesadaran calon klien dan keluarganya tentang perlunya rehabilitasi sosial bagi penyalahguna napza, meningkatkan pemahaman, kesadaran dan dukungan masyarakat serta pihak terkait lainnya terhadap kegiatan rehabilitasi sosial luar panti, menciptakan kesamaan pemahaman, gerak dan langkah pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan.

Sasaran kegiatan sosialisasi adalah calon klien/korban penyalahguna napza dan keluarganya, aparat pemerintah daerah dalam hal ini adalah instansi sosial kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa yang masyarakatnya rawan menjadi penyalahguna napza, LSM peduli korban penyalahguna napza, PSM, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan mendapatkan hasil dengan tersebarluasnya informasi program dan kegiatan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna napza kepada calon sasaran. Adanya pemahaman dan kesadaran dari para pengguna napza dan keluarganya, bersedia memberi ijin anggota keluarganya yang menjadi pengguna napza untuk mengikuti rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang dilaksanakan secara luar panti. Adanya dukungan dari masyarakat dan pihak terkait terhadap kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan secara luar panti.

2. **Identifikasi, Orientasi, dan Seleksi:** Dalam tahap identifikasi petugas dari dinas sosial bekerjasama dengan aparat mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa yang akan menjadi sasaran kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, karena mereka yang mengetahui warganya sebagai pengguna napza. Wilayah yang menjadi sasaran kegiatan meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten

Tabanan, dan Kabupaten Badung, serta LSM yang menangani dan melakukan pendampingan bagi korban penyalahguna napza yaitu Yayasan Dua Hati di Denpasar, Yayasan Mata Hati di Gianyar, Pusat Terapi dan Rawatan Metadon Klinik Sandat di Denpasar dan Dinas Sosial Kabupaten Tabanan yang dipilih untuk menjadi tempat bimbingan fisik dan sosial bagi klien.

Tahap selanjutnya adalah melakukan orientasi dan seleksi calon klien yang memenuhi persyaratan yaitu orang yang pernah dan masih menggunakan napza, tidak dalam kondisi "*Dual diagnosis*" dan mempunyai keinginan untuk keluar dari jerat napza serta berminat mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial. Dari proses seleksi diperoleh calon klien definitif yang akan mengikuti rehabilitasi sosial sebanyak 30 orang, dan menjadi klien yang akan memperoleh pelatihan-pelatihan dan bimbingan fisik, mental, kesehatan, sosial dan keterampilan. Diharapkan dengan mendapatkan pelatihan klien benar-benar meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi napza, dan mempunyai rasa percaya diri karena tidak lagi mendapat stigma negatif dari masyarakat serta mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari nafkah.

3. **Bimbingan Fisik, Mental, Kesehatan, Sosial, dan Keterampilan:** Dari hasil seleksi diperoleh klien sebanyak 30 orang untuk mendapatkan pembinaan dengan alokasi waktu 52 hari kerja dengan perincian: bimbingan fisik, mental, kesehatan, dan sosial selama 22 hari dengan materi pelatihan bimbingan fisik berupa olahraga, bimbingan mental berupa etika, kedisiplinan diri dan bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan pelayanan kesehatan dilakukan pemeriksaan satu kali dalam satu minggu oleh petugas dari puskesmas, dalam hal pelayanan dan bimbingan sosial diberikan materi bimbingan sosial perorangan dan kelompok. Sedangkan untuk bimbingan keterampilan dilaksanakan selama 30 hari kerja dengan jenis keterampilan berupa

bengkel sepeda motor, yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja, sedangkan keterampilan sablon bekerjasama dengan anggota Kube mantan klien yang sudah berhasil.

Dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan bimbingan klien mendapat jatah makan satu kali, uang transport sebesar Rp 25.000,- dan uang saku Rp 20.000,- per hari/orang. Setelah klien selesai mendapat bimbingan sosial dan keterampilan diwajibkan untuk mengikuti magang selama satu bulan, untuk keterampilan jenis sepeda motor bekerja sama dengan sepuluh bengkel, sedangkan klien yang mengikuti bimbingan keterampilan sablon mendapat kesempatan magang di Kube bekas klien yang telah dapat mandiri. Tujuan diberikannya bimbingan fisik, kesehatan dan keterampilan adalah meningkatkan kesadaran dan motivasi cara hidup sehat, meningkatkan kedewasaan berfikir, tanggung jawab moral, dan pengembangan kepribadian serta keterampilan dalam meningkatkan kesejahteraannya sehingga mampu menjalankan kembali fungsi sosialnya dengan baik. Sedangkan tujuan dilakukannya magang adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri, memperoleh kecakapan diri dan kecakapan mencari peluang kerja serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan bantuan UEP.

4. **Terminasi:** Setelah klien selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial, mereka dikembalikan kepada keluarganya dengan dibekali berupa bantuan usaha ekonomi produktif sesuai dengan bidang keterampilan masing-masing, bantuan diberikan dalam bentuk kelompok usaha bersama dan disewakan ruang usaha selama satu tahun dengan biaya dari Dinas Sosial Provinsi Bali. Seluruh klien yang berjumlah 30 orang dibagi dalam lima kelompok Kube, sehingga masing-masing Kube beranggotakan 6 orang. Kelompok Kube yang berada di Kabupaten Tabanan mempunyai kegiatan usaha *show room* sablon dengan nama *Rock and Role*, sedang beberapa Kube yang berada di Kota Denpasar mempunyai kegiatan Distro

Pakaian/ Kaos, membuka bengkel sepeda motor, dan satu Kube membuka layanan cuci sepeda motor dengan nama "Renata". Satu Kube tidak melakukan kegiatan sesuai dengan jenis keterampilan yang diberikan, mereka bekerja sebagai guide. Setelah kegiatan Kube berjalan pembinaan juga dilakukan yaitu berupa monitoring secara berkala untuk melihat perkembangan kegiatan Kube dan memonitor apakah mantan klien kembali menggunakan napza atau memang sudah tidak *relaps* lagi.

C. Keberhasilan Rehabilitasi Sosial Luar Panti dalam Mengentaskan Korban Napza

1. **Kondisi Informan:** Informan dalam penelitian ini adalah mantan klien yang pernah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial luar panti yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali sebanyak 30 orang. Seluruh informan berjenis kelamin laki-laki. Tingkat pendidikan informan bervariasi yaitu yang berpendidikan SLTP sebanyak 9 orang (30 %), SLTA sebanyak 20 orang (66,67 %), dan sarjana satu orang (1,33 %), dengan pendidikan yang cukup tinggi seharusnya mereka mampu berfikir bahwa dengan menggunakan napza akan berdampak negatif bagi kondisi fisik maupun psikis mereka, namun ternyata tingkat pendidikan tidak berpengaruh dengan keinginan untuk menggunakan napza.

Seluruh informan berasal dari beberapa kota/kabupaten di Provinsi Bali, yaitu Kota Denpasar 15 orang (50 %) meliputi Denpasar Selatan 5 orang, Denpasar Utara 2 orang, Denpasar Timur 2 orang, dan Denpasar Barat sebanyak 6 orang. Sedangkan dari Kabupaten Gianyar meliputi Kecamatan Tabanan 1 orang, Kecamatan Blakbatuh 5 orang dan responden dari Kabupaten Tabanan berasal dari Kecamatan Tabanan 5 orang Kecamatan Kediri 1 orang dan dari Kabupaten Badung berasal dari Kecamatan Kuta Utara sebanyak 3 orang.

Dilihat dari usia, informan yang mendapat

rehabilitasi sosial secara non panti bervariasi antara 17 sampai dengan 52 tahun. Informan yang berusia antara 17-22 tahun sebanyak satu orang (1,33 %), tidak adanya klien pada usia ini karena mereka masih menempuh pendidikan, sedangkan proses pembinaan dilakukan selama tiga bulan, sehingga mereka yang ternyata sebagai pengguna napza namun masih menempuh pendidikan tidak mungkin menjadi klien.

Informan yang berusia antara 23-28 tahun sebanyak 8 orang (26,67 %), yang berusia antara 29-34 tahun sebanyak 12 orang (40 %). Sementara informan yang berusia antara 35-40 tahun sebanyak 7 orang (23,33 %) dan dua orang berusia antara 41-52 tahun. Semua informan yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial adalah mereka yang masih berusia produktif. Mereka mempunyai pekerjaan sebagai pemandu wisata, pedagang, dan ada yang masih menganggur. Banyaknya pengguna napza di Provinsi Bali, salah satunya karena daerah tersebut merupakan daerah tujuan wisata, sehingga wisatawan yang membawa dan menggunakan napza sangat memberikan pengaruh bagi penduduk setempat yang pekerjaannya berhubungan langsung dengan para wisatawan tersebut. Jenis napza yang digunakan bervariasi, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1
Jenis Penyalahgunaan Napza

No	Jenis Napza	f	%
1	Alkohol	2	6,67
2	Pil Koplo	3	10,00
3	Ganja	7	23,33
4	Putaw	10	33,33
5	Shabu-shabu	2	6,67
6	Heroin	6	20,00
Jumlah		30	100,00

Jenis napza yang pernah digunakan informan mulai yang ringan seperti alkohol, pil koplo sampai heroin. Penjelasan yang diperoleh dari informan hanya dua (6,67%) yang minum alkohol, tetapi mereka juga

menggunakan ganja, cimenk, sedangkan yang menggunakan ganja juga menggunakan inek, mereka yang menggunakan putaw, shabu-shabu dan heroin juga minum alkohol. Seorang pengguna heroin akan mempunyai suggest yang sangat tinggi, dia dapat menyayat tangannya karena tersuggest, ada dorongan dari dalam diri bahwa dalam pikirannya di dalam darah ada heroin, sehingga darahnya dihisap untuk mendapatkan heroin yang dianggap ada dalam darahnya. Seluruh informan setelah mendapatkan penjelasan tentang bahaya napza atas kesadaran sendiri, mereka berusaha untuk berhenti atau mengurangi dosis dengan melakukan terapi metadon di puskesmas, dengan pengawasan LSM peduli korban penyalahgunaan napza. Atas rekomendasi dari LSM, informan mendapat pelayanan rehabilitasi sosial agar mereka dapat terbebas dari jerat napza dan mempunyai kesehatan fisik dan psikis yang lebih baik serta mempunyai keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan atau dapat menjalankan usaha yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali berupa usaha sablon dan pencucian motor dengan program Kube. Faktor penyebab informan menggunakan napza bermacam-macam antara lain: atas keinginan sendiri karena ingin mencoba, dipaksa dan adanya pengaruh dalam pergaulan karena daerah tempat tinggal mereka merupakan tempat tujuan wisata sehingga penggunaan dan perdagangan napza mudah dilakukan walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi.

2. **Keberhasilan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Napza:** Keberhasilan rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan napza dapat dilihat dari meningkatnya kesehatan fisik, psikis dan sosial. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza yang dilakukan secara luar panti dilihat dari kondisi fisik yaitu terpeliharanya kesehatan fisik dan dapat terlepas atau dapat mengurangi ketergantungan napza; kondisi psikis, yaitu

adanya peningkatan kepercayaan diri dan mampu mengubah sikap dan tingkahlaku; kondisi kehidupan sosial yaitu dapat berperan dalam kehidupan sosial secara wajar dan mempunyai jiwa wiraswasta.

Berdasarkan indikator tersebut, maka keberhasilan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan diharapkan dapat mengentaskan korban penyalahgunaan napza. Keberhasilan dari segi fisik, terpeliharanya kesehatan fisik. Kesehatan seseorang tergantung dari pola hidup dan pola makan yang baik dalam arti harus ada asupan-asupan gizi yang baik. Sebagian besar informan yaitu 24 orang (80 %) menyatakan selama mengikuti pelatihan/ rehabilitasi yang dilaksanakan selama dua bulan mendapatkan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan napza, sehingga memberi penyadaran bagi mereka untuk mengurangi penggunaan napza. Di samping itu, juga karena sebelum mengikuti program rehabilitasi mereka sudah mendapatkan pendampingan dari LSM peduli napza dan merekomendasikan mereka untuk mengikuti program rehabilitasi. Sebanyak 6 orang (20 %) informan masih menjalani terapi metadon. Dalam hal kesehatan fisik mereka merasa lebih baik, karena sewaktu mengikuti program rehabilitasi setiap minggu sekali diperiksa dan dipantau oleh dokter dari puskesmas. Penjelasan dari informan bahwa setelah mereka menjalani proses rehabilitasi mengalami peningkatan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan, seseorang dikatakan sehat apabila mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara normal, dan informan menyatakan sekarang mengalami perubahan baik dalam hal pola makan, merawat kesehatan dan kebugaran fisik.

Terlepas dari ketergantungan napza, rehabilitasi korban penyalahgunaan napza tentu saja kliennya adalah pengguna napza. Dari hasil wawancara dengan informan setelah menjalani rehabilitasi dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari puskesmas serta adanya dampingan dari LSM peduli napza sebanyak 19 orang informan

(63,33 %) menyatakan dengan susah payah berhasil mengatasi ketergantungan dan mampu berhenti menggunakan napza, sedangkan 5 orang informan (16,67 %) menyatakan apabila bertemu dengan *peer groupnya* masih tergoda untuk minum alkohol dan menggunakan napza dan sebanyak 6 orang (20 %) menyatakan masih menjalani terapi metadon.

Keberhasilan dari segi psikis, meningkatnya kepercayaan pada diri sendiri. Penjelasan yang diperoleh dari informan bahwa setelah mengikuti program rehabilitasi mengalami peningkatan rasa percaya dirinya, sebanyak 21 orang (70 %) informan menyatakan dirinya merasa lebih percaya diri karena masyarakat mengetahui bahwa mereka telah mendapat rehabilitasi sehingga stigma negatif selama ini mereka terima sudah dirasakan tidak ada, keluarga dan masyarakat memberi dukungan dan informan dapat kembali memperoleh kepercayaan dari lingkungan sosialnya. Sedangkan 9 orang (30 %) menyatakan biasa saja karena masyarakat di lingkungannya tidak pernah memperlakukan informan sebagai pengguna napza, yang penting mereka tidak merusak dan mengajak masyarakat di sekitarnya untuk menjadi pengguna dan mereka bergaul dengan lingkungan sosial dengan wajar.

Mampu mengubah sikap dan tingkah laku. Setelah mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna napza, informan merasa telah mendapatkan kepercayaan diri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dengan diterimanya informan baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial sebanyak 18 orang (60 %) setelah mendapatkan bimbingan sosial mampu mengubah sikap yang sebelumnya menjadi orang yang tertutup, bergaul hanya dengan *peer groupnya*, sekarang mampu dan mau bergaul dengan wajar dengan lingkungan sosialnya, tidak merasa dikucilkan dan stigma negatif dari masyarakat. Sedangkan 7 orang (23,33 %) informan mampu mengubah sikap dan tingkahlaku, dari hasil wawancara

dengan informan diperoleh informasi bahwa mereka berusaha untuk mengubah sikap dan tingkahlaku yang biasanya emosional, cuek dengan lingkungan, egois, berbuat kriminal (dalam keluarga) menjadi orang yang mau berbagi rasa, mau mendengarkan nasehat orang lain, lebih bersikap sabar, pada awalnya mengalami kesulitan namun dengan keinginan yang kuat mereka mampu sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Sedangkan 5 orang (16,67 %) informan menyatakan tidak mengalami perubahan sikap dan tingkahlaku, dari penjelasan informan menyatakan bahwa walaupun telah mendapatkan bimbingan sosial tetapi tidak merubah sikap karena sudah menjadi tabiat sejak kecil jadi merasa kesulitan untuk mengubahnya.

Keberhasilan dari segi sosial: Dapat berperan dalam kehidupan sosial secara wajar. Setelah mendapatkan bimbingan sosial dan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing serta mendapatkan bimbingan sosial yang antara lain bimbingan etika, dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan napza maka informan menyadari kesalahan yang dilakukan dimasa lalu, yaitu larut dalam kehidupan dan pergaulan yang menyimpang norma agama dan norma sosial. Sebanyak 16 orang (53,33%) menyatakan setelah menyadari bahwa selama menjadi pecandu napza jarang bergaul dan ikut berperan dalam kehidupan sosial, sekarang berani bergaul dalam organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan kegiatan sosial. Sedangkan sebanyak 7 orang (23,33 %) menyatakan telah mampu menerima kenyataan bahwa pilihan hidupnya selama ini salah, maka informan berusaha untuk keluar dari belenggu napza dan berusaha kembali hidup secara wajar dengan tidak menyendiri dan menutup diri, mereka berusaha bergaul dan mengikuti kegiatan sosial keagamaan yang ada di lingkungan kehidupannya yaitu baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakatnya, namun karena stigma negatif masih melekat pada diri mereka sehingga mereka kembali menarik diri dari lingkungan pergaulan

sosialnya. Informan yang tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun setelah mendapat bimbingan sosial sebanyak 7 orang (23,33 %) karena pada dasarnya mereka dari dulu tidak mengalami masalah dalam pergaulan dan kegiatan sosial di lingkungannya walaupun mereka sebagai pengguna napza namun tidak pernah membuat keretakan di masyarakat.

Memiliki tambahan keterampilan dan kemampuan berwiraswasta. Keterampilan yang diberikan kepada informan berupa keterampilan bengkel sepeda motor dan sablon, di samping itu juga adanya bimbingan kewiraswastaan dengan praktek kerja berupa magang selama satu bulan. Seluruh informan menyatakan merasa senang telah memiliki keterampilan baru berupa bengkel sepeda motor dan sablon. Setelah selesai mengikuti proses rehabilitasi dan melaksanakan magang mereka diberi modal usaha secara berkelompok berupa peralatan bengkel dan sablon, diharapkan membentuk kelompok usaha bersama dengan tahun pertama tempat usaha disewakan oleh Dinsosnakertrans Provinsi Bali. Namun tidak semua informan mampu melakukan kegiatan usaha bersama sesuai dengan jenis keterampilan yang dimiliki. Sebanyak 6 orang (20 %) atau satu kelompok Kube membuat Kube dengan kegiatan *show room* sablon (Distro) di daerah Tabanan, tempat usaha disewakan, namun untuk perbaikan dan persiapan usaha mereka.

Sebanyak 6 orang (20 %) membuka usaha bengkel sepeda motor, namun karena mereka belum begitu ahli dalam perbaikan mesin maka bengkel dikerjakan oleh orang lain dan mereka justru ikut membantu sambil belajar, bengkel sepeda motor "Renata" berlokasi di Denpasar. Kelompok usaha bersama yang beranggotakan 6 orang (20%) mempunyai kegiatan sablon dan tatto yang berlokasi di Gianyar. Sedangkan sebanyak 12 orang (40%) ternyata tidak berjalan, anggotanya ada yang bekerja sebagai guide, pedagang souvenir, dan ada yang terkena kasus sehingga harus masuk penjara.

3. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Rehabilitasi Sosial Luar Panti: Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza antara lain: adanya kesediaan kelayan untuk mengikuti rehabilitasi sampai selesai, adanya kesediaan dan bantuan dari keluarga pengguna napza/klien dalam memberi ijin salah satu anggota keluarga mengikuti rehabilitasi sosial, adanya kerjasama yang baik antara lintas sektor dan LSM peduli korban penyalahguna napza dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial secara luar panti mulai dari persiapan dalam mendapatkan klien. Karena tidak mudah mencari klien korban penyalahgunaan napza sehingga perlu kerjasama dengan LSM dan aparat desa setempat, sampai dengan dilakukannya bimbingan sosial keterampilan dan pembinaan lanjut bagi mantan klien yang telah mendapatkan bantuan sosial, agar mereka dapat melakukan kegiatan Kube dengan baik.

Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza antara lain: sikap mental klien yang sulit diberi motivasi untuk berubah, kurangnya etos kerja, dalam mengikuti rehabilitasi klien banyak yang mempunyai motivasi uang, hal ini dapat dilihat selama mengikuti kegiatan rehabilitasi setiap hari banyak klien yang bon uang saku.

D. Rangkuman

Kesimpulan: Pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza dilaksanakan sesuai dengan pedoman rehabilitasi sosial luar panti bagi penyalahgunaan napza, bimbingan sosial dan keterampilan cukup memadai yaitu adanya bimbingan mental, sosial, keterampilan dan adanya pemeriksaan medis. Dalam pelaksanaan kegiatan klien mendapat uang transport dan uang makan serta diberi stimulan yang berupa peralatan sablon dan bengkel sepeda motor serta disewakan tempat usaha selama satu tahun untuk membuka usaha kelompok usaha bersama (Kube), dimana tiap kelompok terdiri dari 6 orang. Dari 30 orang bekas penerima pelayanan sebanyak 18 orang

(60 %) telah melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif yaitu bengkel sepeda motor, distro, dan sablon serta tatto, diharapkan setelah mereka membentuk kelompok kerja (Kube) dan melaksanakan kegiatan usaha, mereka sudah dapat terhindar dari pergaulan dengan *peer groupnya* dan tidak mempunyai waktu luang untuk menggunakan napza. Rehabilitasi korban penyalahgunaan napza secara luar panti dapat membantu korban penyalahgunaan napza yang tidak dapat mengikuti proses rehabilitasi secara panti dalam upaya menghentikan ketergantungan terhadap napza dan mampu mandiri secara ekonomi.

Rekomendasi: Usia calon klien sebaiknya dibatasi sehingga mereka merasa menjadi teman sebaya yang akan memudahkan mereka untuk saling berkomunikasi. Jenis keterampilan diharapkan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keinginan pasar, sehingga dapat memacu klien untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti program rehabilitasi yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi. Diharapkan dilakukan monitoring berkelanjutan bekerjasama dengan pihak BNP, kepolisian dan LSM peduli korban penyalahgunaan napza agar mantan klien dapat benar-benar terentaskan dari ketergantungan napza dan dapat menjalankan usaha ekonomi melalui kelompok usaha bersama secara berkelanjutan. Kegiatan bimbingan sosial yang berupa tatap muka diberi tambahan alokasi waktu, untuk memberikan bimbingan penyuluhan dan penyadaran tentang bahaya penyalahgunaan napza dan bimbingan kewirausahaan agar mereka tumbuh jiwa wiraswasta. Menunjuk beberapa orang mantan klien untuk diberikan pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan mereka mendapat tugas menjadi pengawas bagi rekan-rekannya untuk menyelidiki apakah masih ada yang menjadi pengguna napza. Bila memungkinkan rehabilitasi sosial luar panti bagi penyalahguna napza menggunakan teknik *terapi community* (TC) yang hasilnya dapat dilaporkan baik kepada dinas sosial, LSM maupun pihak terkait agar mendapat pengawasan dan rehabilitasi lanjutan.

Pustaka Acuan

- BNN. 2009. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*: Jakarta
- Dadang Hawari. 1996. *Konsep Islam dalam Memerangi AIDS dan Napza*. PT. Dana Bakti Wakaf: Jakarta
- _____. 1998. *Al'Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. PT. Dana Bakti Primayasa: Yogyakarta
- Darwin Butar-Butar. 2012. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. BNN: Jakarta
- Data PMKS, PSKS. 2008. Pusdatin. Kementerian Sosial RI. Jakarta
- _____. 2010. Pusdatin. Kementerian Sosial RI. Jakarta
- Departemen Sosial RI. 2007. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Luar Panti bagi Penyalahguna Napza*. Departemen Sosial RI: Jakarta
- _____. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1977 Tentang Narkotika
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Eko Prasetyo. 2007. Buku Pedoman Taud R Primary Stoge. PSPP "Sehat Mandiri": Yogyakarta
- O.C. Kaligis and Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. P.T. Alumni: Bandung
- Sides Sudijarto, D.S. 2003. *Mencegah Bahaya Narkoba*. C.V Restu Agung: Jakarta
- Subagyo Partodiharjo. 2007. *Narkoba*. Erlangga: Jakarta
- Suharsimi Arikunto. 1995. *Managemen Penelitian*. Rineka Cipta Press: Yogyakarta
- Suyanto. 1999. *Persoalan Narkoba "Nation at Rish"*. Kompas: Jakarta
- Tribun. 2012. 23 Mei
- Undang-Undang Nomor 22.1999. *tentang Pemerintahan Daerah*
- _____. Nomor 35. 2009. *Narkotika*

Penyaluran Bantuan Korban Bencana Alam
Studi Kasus Pemulihan Kehidupan Korban Bencana Alam di Kota Jayapura
Aid Distribution for Natural Disaster Victims
A Case Study on Natural Disaster Victims Rehabilitation in Jayapura
Municipality

Akhmad Purnama dan Murdiyanto

Peneliti Muda Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Badiklit Kesos
 Kementerian Sosial RI Jl. Kesejahteraan Sosial Nitipuran No 1 Yogyakarta Telp (0274) 377265 Fax (0274) 373530

Email: purnamasribit@gmail.com.

Diterima 27 Maret 2013, disetujui 7 Mei 2013.

Abstract

Appropriate natural disaster victims aid distribution is an effort to reduce more victims, the problem of aid distribution are so many refugees camps and coordination among command posts. In an effort to know aid distribution, especially in Jayapura Municipality, this research is done. The research question is how aid distribution for natural disaster victims implemented and what are the supporting and handicap factor in this distribution? The answer is the goal of the research. The research location is determined purposively based on its most natural disaster happening frequency, sort of earthquake, flood, landslide, and tsunami. Information resources (informant) taken from distribution apparatus, victims, and people who know directly on natural disaster. Informants are chosen purposively with the consideration that those know well about disaster in their place and having formal and informal competency in the case. Data are gathered through interview, observation, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analysed through qualitative-descriptive technique. The research finds that the implementation of natural disaster aid distribution is done swiftly, because of many supports from natural disaster prevention, social, health, military district, police district, ready disaster youth, and volunteers in under district, district, municipality, and province level that are implemented well and solidly. The handicap factors are the unadequate of land and water transportation devices that make the distribution arriving late. Aid distribution mostly fulfilled, such as health services, home and environmental rehabilitation, working and business rehabilitation. One that is unfulfilled yet is the living resources of fishermen, such as boat for fishing as daily lives resources. It is recommended that transportation devices should be completed both for land and water needs, so that rehabilitation program can be fully realized for the victims that mostly fishermen to activate their work to fulfilled their daily lives needs.

Keywords: Aid Distribution-Natural Disaster-Victims

Abstrak

Penyaluran bantuan korban bencana alam yang tepat merupakan usaha untuk mengurangi korban yang lebih banyak, permasalahan penyaluran bantuan di antaranya adalah banyaknya titik pengungsi dan masih kurangnya koordinasi antarpusko. Dalam upaya untuk mengetahui penyaluran bantuan korban bencana alam, khususnya di Kota Jayapura, perlu dilakukan penelitian ini. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran bantuan korban bencana alam dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam? Jawaban dari permasalahan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan tingkat keseringan terjadinya bencana alam, baik gempa bumi, banjir, tanah longsor, maupun tsunami. Sumber informasi diambil dari orang (informan) yang mengetahui dan menjadi pelaku langsung distribusi bantuan, serta dari korban langsung bencana alam. Pemilihan informan ditentukan secara *purposive*, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui kejadian bencana alam dan memiliki kompetensi, baik secara formal maupun informal dalam penanganan bencana alam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui panduan wawancara, observasi, telaah dokumen, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan korban bencana alam dapat berjalan dengan lancar, berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah terjalin cukup solid, baik pihak BPBD provinsi maupun kota, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, kodim, kepolisian, Tagana, distrik, kelurahan, maupun sukarelawan. Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan bantuan kebutuhan korban bencana alam adalah terbatasnya alat transportasi (darat dan air), sehingga seringkali pemberian bantuan mengalami keterlambatan sampai di daerah korban bencana. Penyaluran bantuan korban bencana alam sebagian besar sudah dapat terpenuhi, seperti kebutuhan hidup korban (tanggap darurat), pelayanan kesehatan, rehabilitasi tempat tinggal, rehabilitasi lingkungan, dan rehabilitasi kerja dan usaha, walaupun ada sebagian kecil yang belum dapat terealisasi karena keterbatasan dana bantuan, seperti kapal penangkap ikan yang biasanya dipakai sebagai sarana memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan

keluarga sehari-hari. Disarankan agar ketersediaan transportasi dapat tercukupi, sehingga bantuan dapat cepat sampai korban bencana. Di samping itu, penyaluran bantuan korban yang berupa rehabilitasi kerja dan usaha secepatnya dapat terealisasi, mengingat bahwa peralatan tersebut sangat dibutuhkan untuk menghidupkan kembali mata pencaharian mereka sebagai nelayan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci: Penyaluran Bantuan-Bencana Alam-Korban

A. Bencana Alam dan Penanganan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkategori rawan bencana, karena secara geologis terletak di antara lempeng Asia, Pasifik, Australia, serta terletak di cincin api gunung berapi yang masih aktif sebanyak 129 buah. Di samping itu, terdapat 157 dari 497 kabupaten/kota di Indonesia memiliki kerawanan tinggi diterjang tsunami. kabupaten/kota dengan kerawanan tingkat tsunami itu terletak di Pantai Barat Sumatera, Pantai Selatan Jawa dan Nusa Tenggara, Pantai Timur dan Utara Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, serta Pantai Utara dan Barat Papua (Kompas 2 November 2010). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geografis beragam baik secara tatanan tektonik, dinamika meteorologis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Selain itu, Indonesia dilalui oleh dua jalur gunung api dunia, yaitu: sirkum pasifik (*Pacific Ring of Fire*) dan sirkum mediterania yang melintasi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara hingga Sulawesi Utara. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), diketahui bahwa 188 kabupaten/kota di Indonesia beresiko terkena tsunami (Kompas, Jumat 20 April 2012). Beberapa kejadian bencana alam terjadi di Indonesia seperti gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2009, bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut tahun 2010, erupsi gunung api di Ternate tahun 2010, erupsi gunung api di Kabupaten Sleman Provinsi DIY tahun 2010, serta tsunami yang terjadi di Jayapura tahun 2011, merupakan bukti empiris bahwa wilayah Indonesia rawan bencana.

Bencana alam menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian pada kehidupan

manusia baik dari segi moril, materiil, dan sosial yang melampaui batas kemampuan seseorang dan atau masyarakat untuk mengatasi dengan sumberdaya yang ada pada diri mereka sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka ketersediaan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam menjadi langkah yang cukup strategis untuk dilakukan. Berbicara tentang penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam tidak terlepas dari masalah regulasi dan kewenangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pasal 48 Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 huruf c mengamanatkan penyelenggaraan penanganan bencana, antara lain ditujukan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan. Selaras dengan ketentuan tersebut, Undang-undang Nomer 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 point 9 menyebutkan, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Guncangan dan kerentanan sosial yang dimaksud adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba, sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Rencana Nasional (Renas) penanggulangan bencana tahun 2010-2014 menyebutkan, bahwa Kementerian Sosial adalah instansi utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, *shelter*, dan psikososial. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi logis terhadap setiap kebijakan penanganan bencana yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam struktur tatanan birokrasi, setiap kebijakan penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah mengacu pada kebijakan Kementerian Sosial, demikian halnya dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam. Dalam hal bantuan sosial bagi korban bencana alam, agar tujuan penyaluran bantuan sosial tercapai secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan

kebutuhan hidup korban, prosedur kegiatan yang dilakukan akan merupakan sistem jaringan kerja yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat dan *stakeholders*, antara *stakeholders* dengan masyarakat, serta antar komponen sebagai sub sistem dalam sistem jaringan yang lebih luas.

Permasalahan dari penyaluran bantuan diantaranya banyaknya titik pengungsi, dan kurang koordinasi antarpusko. Berbagai kasus tersebut menjadi bukti empiris dari belum optimalnya pelaksanaan sistem jaringan dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam. Permasalahan terhadap lemahnya tata kelola penyaluran bantuan bagi korban bencana alam, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah penyaluran bantuan korban bencana alam? Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana alam?. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyaluran bantuan korban bencana alam, mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial, pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten dalam meningkatkan penyaluran bantuan bagi para korban bencana alam.

B. Konsep Manajemen Penanggulangan Bencana

Bencana alam yang terjadi secara tidak menentu membutuhkan beberapa penanggulangan dalam mengurangi resiko akibat bencana. Penanggulangan bencana dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

- 1. Pra Bencana:** Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap ini adalah dalam situasi tidak ada atau tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

- a. Kesiapsiagaan (*preparedness*):** adalah upaya yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Randolf Kent (1994), kesiapan bencana mencakup “peramalan dan pengambilan keputusan berbagai tindakan pencegahan sebelum munculnya ancaman. Kesiapan meliputi pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, gejala awal bencana, pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan dini, rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama periode waspada untuk meminimalisir kematian dan kerusakan fisik yang mungkin terjadi. Selain itu, meliputi pendidikan dan pelatihan kepada penduduk, petugas tim khusus, pengambil kebijakan, standar baku penanganan bencana, pengamanan suplai, dan penggunaan dana. Kesiapan bencana bertujuan untuk meminimalisir kerugian melalui berbagai tindakan yang cepat, tepat, dan efektif. Terdapat sembilan butir kerangka kerja persiapan bencana (Randolph Kent, 1994 dalam Enok), yaitu pengkajian kerentanan, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem Informasi, basis sumber daya, sistem peringatan dini, mekanisme respons pelatihan, pendidikan umum, dan gladi.

Dalam kesiapan bencana, koordinasi antar dan intra institusi sangat penting baik secara horisontal maupun vertikal “Tidak ada acara yang baku untuk memastikan koordinasi yang efektif”. Setiap rencana sangat tergantung pada berbagai tradisi dan struktur pemerintah dari setiap negara, akan tetapi suatu rencana buruk jika tidak ada koordinasi (Randolph Kent, 1994: 23). Namun demikian dapat dipastikan, bahwa semakin pendek jalur birokrasi dan spesifik tugas biro, maka akan semakin efektif dalam penanganan bencana. Dalam mengembangkan biro kebencanaan, harus diperhatikan tanggung jawab yang mapan dan sesuai dengan keahlian serta deskripsi tugas secara jelas.

b. Mitigasi Bencana: Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1, ayat 9 mendefinisikan mitigasi bencana sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (*natural disaster*), maupun bencana sebagai akibat dari perbuatan manusia (*human-induced disaster*). Dalam penerapannya di Indonesia, mitigasi bencana lebih ditekankan ke arah manajemen kebencanaan, yaitu pada saat dan setelah (pasca) terjadinya bencana. Sedangkan pada tahap sebelum (pra) bencana masih terbatas pada tahapan pencegahan/prevensi, yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang rawan bencana untuk dikembangkan sebagai kawasan aktivitas. Selain itu, kebijakan nasional penanggulangan bencana yang ada masih mengandung beberapa kelemahan, yaitu dalam hal tingkat implementasi ke segala lapisan masyarakat di Indonesia yang mempunyai kondisi sosio-ekonomi beragam. Akibatnya, masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan secara memadai tentang kebencanaan akan sangat rentan ketika menghadapi bencana, dan tidak mempunyai kemampuan adaptasi untuk pulih kembali pada saat pasca bencana. Masyarakat daerah rawan bencana mempunyai risiko tinggi terhadap ancaman bencana, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dekat dengan sumber bencana, pengetahuan tentang kebencanaan rendah, tingkat kesadaran rendah, kemiskinan, pendidikan rendah, penggunaan teknologi terbatas, sarana mobilitas rendah, usia non produktif tinggi, beban tanggungan tinggi, kualitas bangunan rendah, sistem informasi

terbatas, dan kualitas lingkungan rendah (Enok, 2008).

c. Pemetaan dan Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Bencana Alam: Dalam melakukan pemetaan dan karakterisasi sumber daya alam sebagai salah satu elemen sistem pendukung keputusan (*decision support system*), BGR (*German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources*) juga memberikan sosialisasi tahapan pra-bencana kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan masyarakat (*communities preparedness and resilience*) terhadap potensi bencana dalam jangka pendek dan panjang. Materi sosialisasi atau pembekalan kepada masyarakat yang diberikan adalah bahan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat, dan menarik perhatian. Materi tersebut dapat berupa 'safety rules' dalam menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami, siswa sekolah dasar diberikan buku bimbingan, poster kartun praktis inisiatif konco cilik (pengenalan bencana pada anak), dan sistematis dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Selain itu dapat berupa interaksi langsung dengan masyarakat, penguatan kelembagaan baik pemerintah dan masyarakat, merupakan faktor kunci dalam upaya mitigasi bencana.

Upaya lainnya dalam penguatan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pra-bencana dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada aparatnya, yaitu mencakup pemahaman mengenai kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau mendukung usaha *preventif* kebencanaan. Selain itu, juga memberikan pelatihan menggunakan berbagai perangkat sistem peringatan dini berbasis komputasi dan elektronik, dimana dibekali dengan kemampuan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait antar daerah maupun tingkat nasional. Dengan demikian, setiap daerah akan memiliki rencana penanggulangan bencana

sebagai potensi yang ada di wilayahnya. Dalam tahapan selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keahliannya secara bersinergi dengan masyarakat luas.

Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berbagai upaya pengurangan resiko bencana, merupakan salah satu faktor tingginya resiko bencana. Korban bencana yang besar (jiwa dan harta benda) dan kerusakan lingkungan seringkali diakibatkan oleh kelengahan dalam mengantisipasi datangnya bencana, upaya antisipasi mitigasi dan rendahnya kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana. Dalam rangka membangun sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, terkait erat dengan ketersediaan potensi dan sumber daya yang dimiliki, personal yang terlatih, sistem bantuan darurat, perawatan evakuasi, dan sistem jaringan komunikasi yang dapat didayagunakan ketika terjadi bencana. Peningkatan pengetahuan tentang kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan di daerah rawan bencana.

Masyarakat juga perlu disiapkan dengan pemberian pengetahuan mengenai kebencanaan agar memiliki pengetahuan yang benar, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, serta tanggap ketika terjadi bencana. Penanggulangan bencana maupun dampaknya harus dilakukan secara terkoordinatif dan terpadu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pemerintah telah membentuk wadah koordinasi nasional dalam penanggulangan bencana, yakni Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomer 3 Tahun 2001, jo Nomer 11 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 46 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Penanggulangan bencana harus dilakukan dengan mendasarkan pada asas gotong royong (kerjasama semua pihak) dan dilandasi dengan rasa sukarela tanpa paksaan dari semua unsur yang terkait. Oleh karena itu, dalam penanggulangan bencana harus dilakukan pada semua sektor secara terkoordinasi dan terintegrasi, dimana didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling menunjang dan diharapkan dapat diatasi oleh masyarakat secara swadaya, dan tidak terlalu menggantungkan pada bantuan dari pihak luar. Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran sesuai tuntutan keadaan yang serba darurat, dilakukan dengan prioritas utama yang menyangkut penyelamatan jiwa, serta lebih menitikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yakni kesiapsiagaan yang meliputi pencegahan dan pengurangan dampak resiko bencana. Pada dasarnya, terjadinya bencana tidak mengenal batas wilayah, oleh karena itu upaya penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan menggunakan kemampuan dan potensi seluruh wilayah maupun di luar wilayah bencana.

2. Saat Tanggap Darurat (ketika terjadi bencana)

Penanganan darurat merupakan tindakan yang diambil sesegara mungkin sesudah terjadinya bencana. Tindakan dilakukan untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda, serta menagani kehancuran dan kerusakan dampak bencana. Prioritas penanganan dalam tahap tangggap darurat meliputi,

penyelamatan korban dan penanganan luka-luka, pengaktifan tim tanggap darurat (satlak), pembentukan pusat-pusat layanan (posko), distribusi *supplies* (logistik, tenda dll), dan penyediaan hunian sementara.

3. Pascabencana

Pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan suatu proses untuk membantu masyarakat yang terkena bencana agar mampu melaksanakan fungsinya kembali dengan baik. Kegiatan rehabilitasi antara lain mencakup: Pemulihan pelayanan-pelayanan utama di dalam masyarakat, pemugaran rumah dan bangunan yang masih dapat diperbaiki, penyediaan rumah sementara, pemberian bantuan rehabilitasi fisik dan psikologis, penggantian bangunan dan infrastruktur yang hancur (peletakan dasar bagi tindakan rekonstruksi).

Rekonstruksi merupakan komponen penanggulangan bencana yang menghubungkan semua kegiatan penanggulangan bencana dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Pada umumnya timbulnya korban jiwa dan kerusakan yang besar disebabkan karena kelengahan dalam mengantisipasi datangnya bencana, berbagai upaya antisipasi, mitigasi dan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana masih rendah. Paradigma penanggulangan bencana saat ini harus berubah dari *fatalistik responsif* ke arah *preventif proaktif*, yaitu dari pendekatan kedaruratan menjadi kesiapsiagaan. Segala aspek dan proses penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada aspek sebelum bencana terjadi, agar setiap waktu masyarakat siap menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial sebagai pihak yang berkompeten dalam penanggulangan korban bencana, khususnya Direktorat Bidang Bantuan Sosial telah membangun suatu sistem kesiapsiagaan penanggulangan bencana, antara lain: Ketersediaan potensi dan sumber daya yang dimiliki, seperti: personal yang terlatih, sistem bantuan darurat peralatan

evakuasi, sistem jaringan komunikasi, mekanisme kerja, dan lain sebagainya yang siap didayagunakan ketika terjadi bencana. Sosialisasi, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana serta pelatihan Taruhan Siaga Bencana (Tagana), merupakan salah satu kunci dalam rangka pengurangan resiko bencana. Kehadiran Tagana di tengah-tengah masyarakat dalam setiap kejadian bencana mempunyai kontribusi yang sangat positif, dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelatihan Tagana dan yang sejenisnya penting dilakukan di daerah rawan bencana. Melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat guna meminimalisir resiko bencana, maka pada saat terjadi bencana diharapkan tidak ada korban yang menderita, terlantar ataupun tidak terlindungi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk keberhasilan penanggulangan bencana yang secara terus-menerus harus dipelihara dan ditingkatkan.

4. Tahapan Bantuan terhadap Korban Bencana

Korban bencana alam memerlukan bantuan dari berbagai organisasi, masyarakat, pemerintah dan lembaga atau negara asing. Dalam pemberian bantuan dapat dilakukan melalui beberapa tahap yang berbeda. Menurut Helssloot dan Reuitenbergh (2004) tahapan bencana dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap peringatan, tahap gawat darurat (tindakan pertolongan, bantuan medis, rumah sementara), dan tahapan pemulihan atau pembangunan kembali. Wolenksy (1990) membagi tahapan pemberian bantuan bencana alam menjadi empat tahapan yaitu tahap sebelum bencana (*mitigation and preparedness planning*), tahap tanggap darurat (*immediate pre and post impact*), tahap pemulihan jangka dekat (dua tahun) tahap pemulihan jangka panjang (10 tahun). Kiefer Monttjoy, mengutip dari Waugh (2000) membagi tahapan bantuan terhadap korban bencana alam dalam empat tahap, yaitu tahapan peringatan, (*prevention*),

perencanaan dan persiapan (*planning and preparedness*), tanggapan (*response*), dan pemulihan (*recovery*) (Sunit Agus TC: 2011). Kegiatan manajemen bencana dalam memberikan bantuan kepada korban bencana mempunyai tujuan 1) mencegah kehilangan jiwa, 2) mengurangi penderitaan manusia, 3) memberi informasi kepada masyarakat dan pihak yang berwenang mengenai resiko bencana, 4) mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber daya ekonomi (Hadi Purnomo dan Roni S, 2010)

C. Penggunaan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan distribusi bantuan bagi korban bencana alam yang ada di alam empirik. Penentuan lokasi penelitian dengan *purposive*, yaitu berdasarkan tingkat keseringan terjadinya bencana alam, seperti: gempa bumi, banjir, dan tsunami sehingga lokasi penelitian dipilih Kota Jayapura. Sumber data berasal dari (a) Informasi yang diberikan oleh orang yang mengetahui dan menjadi pelaku langsung distribusi bantuan bagi korban bencana, dan (b) Informasi yang diberikan oleh korban langsung dari bencana alam yang terjadi di lingkungan mereka. Pemilihan Informan-kunci dan Informan menggunakan teknik *purposive*, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah orang yang mengetahui kejadian bencana alam dan memiliki kompetensi, baik secara formal maupun informal dalam penanganan korban bencana alam di lingkungannya, yaitu aparat dari Dinas Sosial Kota Jayapura. Pengumpulan data dilakukan antara lain dengan menggunakan teknik wawancara melalui panduan wawancara sebagai *guide line*, yaitu ditujukan kepada orang yang mengetahui secara nyata perihal pendistribusian bantuan seperti: aparat Dinas Sosial Kota Jayapura, BPBD Kota Jayapura, Distrik Kota Jayapura, dan korban bencana. Di samping wawancara, juga menggunakan teknik observasi langsung kepada korban bencana alam, telaah dokumen terutama yang menyangkut peta bencana, distribusi bantuan,

serta kuantitas korban dalam berbagai gradasi kerugian. Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan teknik *Focus Group Discussion* (FGD), dengan peserta dari aparat Dinas Sosial Kota tiga orang, kecamatan dua orang, kelurahan lima orang, BPBD dua orang, Tagana tiga orang, TKSK satu orang, Karang Taruna dua orang, PSM tiga orang, dan instansi terkait dalam penyaluran bantuan sosial bencana alam sebanyak dua orang. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif terhadap distribusi bantuan bagi korban bencana alam di ranah empirik.

D. Realisasi Penanggulangan Bencana Alam di Kota Jayapura

Kondisi Kependudukan Wilayah Kota Jayapura secara geografis terletak di bagian Barat pada 137° 27' Bujur Timur, bagian Timur pada 141° 41' Bujur Timur, bagian Utara pada 1° 27' Lintang Selatan, dan bagian selatan pada 3° 49' Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Jayapura sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah selatan dengan Distrik Arso Kabupaten Keerom, bagian timur dengan Negara Papua New Guinea dan sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Depapre Kabupaten Jayapura. Kota Jayapura memiliki luas wilayah 940 km² yang terbagi menjadi lima kecamatan/distrik yaitu meliputi: Abepura, Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Muara Tami, dan Heram. Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Holandia, dimana nama tersebut diberikan oleh Kapten Sachse pada tanggal 7 Maret 1910. Hol diartikan sebagai lengkung teluk dan land diartikan tanah, dengan demikian nama Holandia diartikan sebagai tempat yang berteluk. Negeri Belanda atau Holand yang geografisnya menunjukkan keadaan berteluk-teluk. Topografi daerah ini cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, rawa-rawa, dan hutan lindung dengan kemiringan 40 persen bersifat konservasi dan berupa hutan lindung sehingga sebesar 30 persen wilayahnya tidak layak huni. Variasi curah hujan berada antara 45-255 mm per tahun dengan jumlah hari

hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan per tahun. Suhu udara rata-rata 29–31 derajat celsius, musim hujan dan kemarau tidak teratur dalam arti kadang-kadang panas namun kemudian turun hujan. Penduduk Kota Jayapura adalah penduduk heterogen yang terdiri dari bermacam-macam yang ada di Indonesia. Jumlah total penduduk kota Jayapura menurut sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 256.705 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Jayapura yakni sebanyak 278 jiwa per kilometer.

Kota Jayapura yang begitu elok dan indah merupakan daerah rawan bencana alam, kondisi wilayah geografis yang berbukit-bukit dan berada dibibir pantai serta berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik Utara memungkinkan timbulnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan tsunami. Beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi pada dua tahun terakhir adalah dampak akibat gempa bumi dan tsunami di Jepang yang terjadi di daerah pinggiran pantai Kota Jayapura pada tahun 2011 memakan korban jiwa satu orang. Bencana banjir yang terjadi di Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram pada pebruari 2012 menimbulkan kerusakan tempat tinggal dan tempat jualan, sedang kejadian tanah longsor juga terjadi pada distrik Jayapura Utara. Dari hasil wawancara dengan *key informant* dan *informant*, bahwa ada beberapa titik kerusakan akibat dampak tsunami Jepang di Kota Jayapura, di antaranya:

1. Distrik Muara Tami (Kampung Holtekam)

Sesuai dengan keterangan informan warga yang bermukim di sekitar Pantai Holtekam, bahwa bencana tsunami terjadi pada pukul 23.30 sampai dengan 00.30 WIT telah memporakporandakan fasilitas atau infrastruktur berupa sebuah jembatan putus yaitu jembatan Kali Buaya, dimana pada tiang penyangga jembatan amblas sehingga membentuk kerucut pada tengah jembatan. Jembatan tersebut belum dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, sehingga harus memutar kembali dan baru dapat dipakai oleh kendaraan roda dua. Kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 50 meter pada sisi jembatan Kali Buaya yang mengalami kerusakan aspal (mengelupas)

karena terkena terjangan air laut. Kerusakan rumah penduduk, sebanyak 19, tiga rumah rata dengan tanah dan tanpa bekas dihempaskan badai tsunami yang membuat tiga belas jiwa tidak dapat berteduh, dan tiga rumah pariwisata rusak berat. Kerusakan lain adalah alat tangkap ikan, yaitu perahu yang setiap harinya dipakai untuk mencari ikan maupun untuk keperluan lain. Sedangkan yang mengalami kerusakan berat sebanyak 38 buah perahu, dimana sebagian besar terdampar kurang lebih 150 meter dari bibir pantai. Jaring yang setiap malam oleh para nelayan di kampung Holtekam ini selalu dipasang untuk menangkap ikan, jumlah keseluruhan sebanyak 129 jaring dari berbagai ukuran, mata jaring ikut terhempas oleh tsunami. Di samping itu, tambak ikan dan udang yang ada di wilayah Pantai Holtekam juga mengalami kerusakan parah. Areal tambak ikan dan udang seluas kurang lebih 10 hektar mengalami rusak berat diterjang tsunami, dan semua ikan yang ada dalam tambak hanyut terbawa air. Selain itu, sebanyak dua buah kantor Koperasi Unit Desa (KUD) mengalami kerusakan berat.

2. Distrik Abepura

Rumah penduduk yang mengalami rusak berat sebanyak 7 buah, dengan jenis kerusakan antara lain hilangnya dapur rumah beserta papan, rumah mengalami kemiringan yang sewaktu-waktu dapat roboh. Rumah rusak ringan sebanyak 3 buah, dengan jenis kerusakan terutama terjadi pada teras rumah, yaitu mengalami kerusakan maupun hilangnya papan teras. Fasilitas umum berupa rumah adat, yaitu rumah yang dibangun secara bergotong-royong dan dilakukan secara bersama-sama oleh warga kampung secara swadaya masyarakat. Rumah adat ini biasa dipergunakan untuk kepentingan warga kampung, seperti: rapat, arisan, untuk menerima para tamu dari luar, dan untuk pentas kesenian. Kerusakan bangunan tersebut sekarang tinggal lantainya saja, sedangkan atapnya maupun tiangnya hanyut terbawa air laut. Jalan kampung, yaitu terdapat dua jalan kampung yang menghubungkan Kampung Enggros dan Kampung Metu Debby mengalami kerusakan berat atau putus, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Apabila warga

kampung hendak menghubungi kampung lain, maka harus ditempuh dengan menggunakan perahu kecil yang biasa dipakai untuk mencari ikan. Setelah satu tahun lebih dari saat kejadian tsunami, ternyata baru dilakukan perbaikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh warga kampung. Alat penyeberangan berupa sebuah *speed boat* 2 mesin dan dua unit motor hilang dihempas tsunami. Alat penerangan, yaitu dua buah genset yang biasa dipergunakan untuk penerangan rumah juga hilang. Keramba ikan, yaitu tempat untuk memelihara ikan dengan cara membentangkan jaring agar ikan tidak keluar, kurang lebih sebanyak 24 keramba ikan hanyut tanpa bekas.

3. Distrik Jayapura Selatan

Terdapat empat kampung atau kelurahan yang terkena dampak tsunami, namun kondisinya tidak separah dengan distrik yang lain. Adapun ke empat kampung atau kelurahan tersebut meliputi: Kelurahan Hamadi, meliputi Pantai Hamadi terdapat kotoran sampah yang berserakan dan timbunan pasir. Serakan sampah itu antara lain meliputi kayu atau papan, dedaunan, dan patahan bambu; Kelurahan Argapura, kondisi daerah ini hanya terdapat tumpukan sampah yang berserakan dan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti; Kampung Kayu Pulau, daerah ini tidak ada dampak yang begitu berarti akibat dari pasang air laut; Kampung Tobati, kondisi Kampung Tobati tidak separah jika dibandingkan dengan daerah di Holtekam, yaitu hanya terdiri dari tiga rumah warga yang mengalami rusak berat, dan sebanyak 14 rumah rusak ringan. Sedangkan sarana umum yang mengalami kerusakan, yaitu dua buah jalan jembatan yang menghubungkan antar rumah mengalami rusak berat atau putus, sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Jepang dengan besaran 8,9 skala richter pada tanggal 11 Maret 2011 pada pukul 16.00 WIT, dan menerjang di wilayah perairan Kota Jayapura sekitar jam 23.30 sampai dengan 00.30 WIT, berakibat pada porak-porandanya bangunan infrastruktur, rumah penduduk, dan fasilitas umum. Korban sebagian besar luka ringan dan korban jiwa yang meninggal akibat tsunami

tersebut sebanyak satu orang.

Keputusan Menteri Sosial Nomer 80 Tahun 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Perihal Indikator Kinerja Penanggulangan Bencana, di antaranya adalah terbangunnya sistem jaringan penanggulangan bencana bidang bantuan sosial korban bencana yang meliputi sistem jaringan kerja, logistik, komunikasi, personil, transportasi, dan posko bencana berbasis masyarakat. Dalam upaya penanggulangan bencana, ke enam sistem jaringan saling berkaitan dan berkoordinasi, walaupun masing-masing jaringan kerja juga mempunyai kewenangan sendiri-sendiri.

Dalam penanganan bencana yang terjadi di Jayapura akibat gempa tsunami di Jepang, dilakukan oleh personil yang ada di instansi Kota Jayapura melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura, yaitu mengambil langkah dengan memerintahkan dan menempatkan personil pada wilayah rawan bencana, serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di wilayah Kota Jayapura. Dengan diketahuinya hasil pemantauan dan koordinasi yang dilakukan, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana membentuk tiga tim sesuai perintah Sekretaris Daerah Kota Jayapura selaku Kepala Eksekutif Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu untuk melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya pada tiga titik yang terkena dampak bencana tsunami.

Instansi yang tergabung dalam jaringan personil antara lain meliputi Dinas Sosial Kota, Kodim/TNI, Dinas Kesehatan Kota, Tagana, Polsek, Distrik, dan kelurahan atau kampung yang bersangkutan. Tugas dan kewenangan setiap instansi berdasarkan kompetensinya masing-masing, antara lain: Dinas Sosial Kota menyiapkan tenaga untuk menyalurkan bantuan seperti sembako, pakaian, kebutuhan mandi, masak, dan sebagainya, Kodim/ TNI menyiapkan tenaga untuk kegiatan evakuasi. Dinas Kesehatan Kota menyiapkan tenaga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembagian obat-obatan, Tagana menyiapkan

tenaga untuk: (a) Melaksanakan pendataan korban (b) Menyediakan dan mengelola sebuah dapur umum lapangan untuk kebutuhan para korban, khususnya kebutuhan makanan dan minuman dengan mempertimbangkan potensi atau ketersediaan bahan pokok pada situasi darurat yang ada pada daerah bencana, Polsek menyiapkan tenaga untuk melakukan tindakan pengamanan dan ketertiban di daerah bencana, Distrik menyiapkan pemetaan data, penyaluran bantuan, dan kelurahan atau kampung menyiapkan tenaga sukarela yang dapat membantu penyaluran bantuan bencana.

Hal tersebut sesuai apa yang dikatakan oleh informan, bahwa personil yang terlibat dalam penanggulangan bencana meliputi instansi yang terkait, seperti: Dinas sosial Kota Jayapura, Dinas Kesehatan, Kodim/TNI, Polri (Polsek), Tagana, Distrik, kelurahan dan lembaga lain (PMI), masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Mereka di bawah komando Sekertaris Daerah Kota Jayapura. Dalam pelaksanaan kegiatan, mereka saling membantu agar segera tertanganinya korban. Di samping itu, keterlibatan masyarakat cukup membantu dalam upaya mengurangi korban lebih banyak.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menanggulangi bencana beberapa SKPD melakukan jaringan kerja. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa informan, bahwa jaringan kerja oleh masing-masing personil sudah dilakukan, mereka saling isi mengisi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dalam memberikan bantuanpun pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan kondisi dan kewenangan yang ada. Walaupun masih ada sedikit kekurangan penanganan karena kondisi wilayah bencana sulit dijangkau, sehingga korban ataupun bantuan untuk mengganti dan membangun kerusakan akibat bencana belum dapat cepat tertangani. Instansi yang tergabung dalam jaringan kerja meliputi Dinas Sosial Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kodim, Polisi, Tagana, SAR, dan para sukarelawan. Masing-masing SKPD melakukan tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensinya

masing-masing, antara lain. Dinas Sosial Kota melakukan kegiatan berupa: Mencari dana bantuan; Pengepakan dan menggolong-golongkan jenis bantuan; Pendistribusian bantuan. BPBD Kota melakukan kegiatan berupa: Mengkoordinir bantuan; Mengkoordinir Tagana dan tenaga sukarelawan. Dinas Kesehatan Kota melakukan kegiatan berupa: Pertolongan dan pemeriksaan kesehatan para korban tsunami baik oleh dokter maupun tenaga medis lain; Pembagian obat-obatan bagi para korban. Kodim melakukan kegiatan berupa: Evakuasi korban ke daerah yang lebih aman; Pengaturan jalannya evakuasi. Polisi melakukan kegiatan berupa: Mengkondisikan aman dan stabil di daerah bencana; Mengatur lalulintas di daerah bencana. Tagana melakukan kegiatan untuk: Pencarian korban; Penanganan pengungsi; Penanganan korban luka baik berat maupun luka ringan; Penanganan korban yang meninggal. SAR melakukan kegiatan membantu pelaksanaan evakuasi dan pencarian korban yang belum ditemukan. Sukarelawan melakukan tugas berupa membantu proses evakuasi, pencarian korban bencana, dan membantu penyaluran bantuan.

Dalam setiap terjadi bencana alam yang memerlukan penanganan yang cepat dan akurat dapat mengurangi timbulnya korban jiwa yang semakin banyak, maka ketersediaan dan pemberian logistik sangat diperlukan. Dari informan diperoleh penjelasan bahwa beberapa instansi yang tergabung dalam jaringan logistik antara lain Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, Tagana, Distrik/Kecamatan, dan Kelurahan. Masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri berdasarkan kompetensinya, antara lain Dinas Sosial Kota bertugas untuk: Penyediaan bantuan berupa sembako (beras, kecap, sarden, gula, dan telur), jatah hidup selama tiga hari (masa darurat), pakaian, Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang dapat berupa papan, seng, dan semen; Pendistribusian bantuan. Dinas Kesehatan Kota bertugas untuk: Penyediaan tenaga medis baik dokter maupun perawat; Penyediaan obat-obatan yang banyak dibutuhkan oleh para korban. Tagana bertugas untuk menyediakan segala

sesuatu yang dibutuhkan dalam penanganan sebuah bencana, baik bagi korban ataupun bagi kebutuhan petugas yang menangani bencana. Distrik bertugas untuk menyediakan tempat sebagai sekretariat posko yang dipandang paling strategis baik dalam penanganan korban maupun penyaluran bantuan. Kelurahan atau kampung bertugas untuk mendata bagi para korban yang akan memperoleh bantuan, serta melakukan pendistribusian bantuan. Logistik yang ada di dalam keadaan bencana diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari sumbangan masyarakat, swasta dan organisasi-organisasi sosial yang peduli terhadap bencana alam, Dinas Sosial Kota dan apabila tidak mencukupi akan meminta tambahan ke Dinas Sosial Propinsi/ Kementerian Sosial.

Penanganan bencana akan tercapai dengan baik apabila tersedianya alat transportasi dan dapat dipergunakan untuk menjangkau tempat bencana yang sulit. Instansi yang tergabung dalam jaringan transportasi memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensinya masing-masing, antara lain: Dinas Sosial Kota bertugas menyediakan alat transportasi baik darat maupun air yang dimiliki untuk penyaluran bantuan maupun kegiatan evakuasi bagi para korban. Dinas Perhubungan Kota bertugas untuk penyediaan alat transportasi darat maupun air serta memperbaiki infrastruktur perhubungan yang rusak. Tagana mempunyai tugas menyediakan kebutuhan alat transportasi baik roda empat maupun roda dua untuk keperluan penanganan korban bencana serta untuk keperluan pengangkutan logistik.

Komunikasi merupakan uratnadi untuk tercapainya penanganan bencana yang dapat berjalan dengan baik dan sukses. Komunikasi dari masing-masing instansi akan dapat memperingan dan lebih cepatnya penanganan korban bencana alam. Lembaga yang tergabung dalam jaringan komunikasi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing yang akan saling membantu agar tercapai tujuan dalam penanganan bencana alam. Lembaga tersebut antara lain, BMKG Pusat bertugas menginformasikan tentang peringatan dini terhadap potensi bencana (tsunami) kepada BPBD provinsi yang harus segera

ditindaklanjuti. BPBD Provinsi bertugas memberi informasi tentang peringatan dini terhadap potensi bencana berupa tsunami yang harus segera ditindaklanjuti oleh BPBD Kota. BPBD Kota Jayapura melalui media TV lokal (Top TV) maupun media elektronik lain seperti radio melakukan himbauan kepada masyarakat Kota Jayapura yang bermukim di sepanjang pesisir pantai untuk tidak panik dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya tsunami. Dengan adanya peringatan dini tersebut maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura langsung mengambil langkah dengan memerintahkan dan menempatkan personil pada wilayah rawan bencana serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang ada di wilayah Kota Jayapura. Orari setempat bertugas menyebarluaskan peringatan dini tsunami tersebut kepada warga yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana.

Posko atau pusat komando merupakan tempat sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah korban bencana alam yang paling bawah dan dekat dengan lokasi bencana. Dengan posko ini diharapkan penanganan akan terorganisir dan tertangani dengan baik. Instansi yang tergabung dalam jaringan posko yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan kompetensinya masing-masing, antara lain: Dinas Sosial Kota bersama BPBD Kota bertugas untuk menyediakan bantuan baik secara kuantitas maupun dalam menentukan jenis bantuan, penyediaan data calon penerima bantuan, dan pendistribusian bantuan. Tagana bertugas melaksanakan monitor atau pemantauan, dan menginformasikan data-data dengan mengkoordinir tim yang lain. Distrik bertugas untuk menyediakan tempat sebagai sekretariat posko yang dipandang paling strategis baik dalam penanganan korban maupun penyaluran bantuan. Kelurahan atau kampung bertugas untuk menginformasikan kepada warganya yang memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sukarelawan bertugas untuk membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan penanganan bencana baik yang berupa pra bencana, saat bencana, maupun pasca

bencana. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan dapat berupa kegiatan evakuasi korban maupun dalam kegiatan penyaluran bantuan.

E. Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Sosial

Prosedur dalam pemberian bantuan dilakukan terlebih dahulu melalui pendataan yang dilakukan oleh aparat kelurahan, dimana para korban didata oleh petugas dari kelurahan melalui perangkat RT atau RW yaitu siapa saja yang menjadi korban, selanjutnya data disampaikan ke kecamatan untuk dimintakan bantuan ke Dinas Sosial atau SKPD yang terkait. Dinas Sosial atau SKPD akan memberikan bantuan kepada korban sesuai dengan permintaan dan stok yang ada. Apabila persediaan bantuan tidak mencukupi, maka akan meminta ke instansi di provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Dalam pemberian bantuan kadang tidak sesuai dengan permintaan, sehingga para korban sedikit kecewa. Setelah bantuan datangpun pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah korban, melainkan mereka meminta dibagi keseluruh warga, walaupun mereka tidak menjadi korban bencana. Adapun jenis bantuan yang diberikan antara lain meliputi kebutuhan hidup sehari-hari (makanan, minuman, dan pakaian), sembako (walaupun tidak semua tercukupi), pelayanan kesehatan, rehabilitasi tempat tinggal, rehabilitasi lingkungan, dan rehabilitasi kerja ataupun usaha.

Bantuan yang berupa uang maupun barang dapat disalurkan langsung kepada korban bencana ataupun dapat dilakukan melalui posko, dinas sosial maupun BPBD. Sumbangan yang berupa uang disalurkan melalui posko, Dinas Sosial maupun BPBD wajib disetorkan ke rekening BPBD. Sedangkan sumbangan yang berupa barang dapat langsung didistribusikan oleh penerima (posko, Dinas Sosial maupun BPBD) kepada korban bencana baik yang ada di penampungan sementara maupun di daerah bencana.

F. Fakta dan Idealisasi Penyaluran Bantuan Sosial Kota Jayapura

Dalam proses penyaluran bantuan sosial bencana alam ada beberapa pihak yang secara langsung terlibat, antara lain: sebagian besar aparat/pegawai dinas sosial kabupaten, masyarakat setempat, dan para sukarelawan. Para sukarelawan ini perlu diberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena mereka bekerja tanpa pamrih, meninggalkan keluarga/saudara, dan bekerja tidak mengenal waktu, padahal mereka juga harus mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Dalam hal ini pihak SKPD setempat berinisiatif akan memberikan uang lumpsum kepada para sukarelawan yang bekerja sampai sore atau bahkan sampai malam hari. Selain itu bantuan yang datang dari pusat harus melalui BPBD provinsi terlebih dahulu yang dirasa masih bersifat birokratis, sehingga memperlambat proses penyaluran bantuan. Guna memudahkan penyaluran bantuan berjalan lebih efektif dan cepat sampai kepada sasaran (korban bencana) lebih baik apabila bantuan yang datang dari pusat langsung diberikan kepada BPBD kota atau daerah yang mendekati lokasi rawan bencana alam, sehingga korban yang sangat membutuhkan bantuan cepat dapat tertangani.

Dalam pemberian bantuan kepada korban bencana masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya bantuan yang diberikan belum semua mencukupi dari kebutuhan yang ada. Misalnya ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan peralatan yang kurang sesuai dengan kondisi mereka, bantuan peralatan rumah tangga yang belum semua menerima dan tepat. Disamping itu kondisi daerah yang sangat sulit memungkinkan bantuan yang diberikan tidak sampai ke semua korban bencana yang tepat waktu. Untuk mengatasi kekurangan pemenuhan kebutuhan bagi sasaran atau korban bencana. Beberapa SKPD melakukan koordinasi yang cukup baik.

G. Rangkuman

Dalam penyaluran bantuan bencana di Kota Jayapura dapat dikatakan cukup terpenuhi dan berjalan dengan lancar. Adapun penyaluran bantuan korban bencana alam tsunami di Kota Jayapura antara lain meliputi:

1. Bantuan kebutuhan kehidupan korban bencana yang berupa makanan, minuman, dan sandang. Di samping itu mereka juga memperoleh bantuan yang berupa sembako yang sangat mereka butuhkan untuk mempertahankan hidup seperti: beras, minyak, telur, sarden, garam, susu, kecap, mie, dan lauk. Agar mereka dapat mengolah makanan dan minuman tersebut, maka juga dibantu peralatan dapur seperti: ceret, wajan, panci, termos, dan lain sebagainya. Dalam penyaluran bantuan korban ini tidak hanya bagi para korban saja, namun diperuntukan bagi seluruh warga kampung korban yang bersangkutan secara merata, sehingga tanpa perkecualian baik bagi korban maupun bukan korban, karena kalau tidak dapat menimbulkan rasa irihati pada sesama warga kampung.
2. Diberi pelayanan kesehatan, seperti pemeriksaan kesehatan para korban bencana baik yang dilakukan oleh para dokter maupun tenaga medis lainnya (perawat), dan pemberian obat-obatan secara gratis.
3. Rehabilitasi tempat tinggal, yaitu diberi bantuan berupa Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang berupa papan atau kayu, seng, dan semen. Jenis bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan korban yang mengalami kerusakan baik berkategori berat maupun ringan.
4. Rehabilitasi lingkungan, yaitu melalui perbaikan sarana dan prasarana (infrastruktur) yang dapat mengurangi resiko bencana alam di kemudian hari. Bantuan yang diberikan berupa bahan untuk memperbaiki jalan antar kampung yang berupa papan atau kayu dan semen yang dikerjakan secara gotongroyong seluruh warga kampung.

5. Rehabilitasi kerja dan usaha, yaitu jenis bantuan yang diberikan berupa alat jaring dan keramba ikan yang dapat dipakai sebagai usaha untuk menghidupkan kembali matapencaharian mereka sebagai nelayan. Sedangkan bagi mereka yang kehilangan berupa perahu, sampai saat ini belum memperoleh gantinya karena minimnya bantuan yang ada, padahal perahu merupakan alat satu-satunya bagi para nelayan untuk mencari ikan sebagai penopang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Penyaluran bantuan korban bencana dapat berjalan dengan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah terjalin cukup solid, baik: pihak BPBD provinsi maupun kota, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan Kota, Kodim, Kepolisian, Tagana, Distrik, kelurahan maupun para sukarelawan. Sedangkan sebagai faktor penghambat dalam proses penyaluran bantuan korban bencana terutama mengenai kondisi medan bencana. Wilayah bencana tsunami di Kota Jayapura merupakan daerah yang sulit dijangkau, karena harus menggunakan sarana transportasi (darat dan air/laut) secara memadai, padahal sarana yang tersedia sangat terbatas sehingga penyaluran bantuan sosial bencana alam terlambat sampai kepada korban bencana.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka disarankan agar sarana transportasi (baik darat maupun laut/air) dapat tercukupi secara memadai. Beberapa daerah rawan bencana di Kota Jayapura sebagian besar merupakan daerah yang sulit dijangkau, baik melalui darat maupun air/laut karena banyak diliputi pegunungan, tebing yang suram, teluk, dan rawa-rawa. Di samping itu, disarankan pula mengenai pemenuhan kebutuhan kehidupan korban bencana alam tsunami yang berupa rehabilitasi kerja dan usaha dapat terealisasi. Mengingat bahwa peralatan untuk menopang kehidupan mereka seperti: alat jaring, keramba ikan, dan perahu sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghidupkan kembali matapencahariannya.

Pustaka Acuan

- Abdul Syahni. 1994. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alvin L Bertrand. 1980. *Sosiologi (Terjemahan Sanapiah S. F)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ankie M.M. Hoogvelt. 1985. *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang* (disadur oleh: Alimandan). Jakarta: Rajawali.
- Dasuki, 2008, *Upaya-upaya Ketahanan Sosial terhadap Bencana Alam Melalui Peningkatan Peran Organisasi Sosial Lokal, Media Informasi Tanggap*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. Departemen Sosial RI, Edisi April, 2008.
- Dwi Heru Sukoco. 2006. *Bencana dan Penanganannya*. Jakarta: Jurnal Pusdiklatkesos Vol. 1 No. 2 Juni 2006.
- Enok Maryani, Model Sosialisasi Mitigasi pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat, <http://www.google.co.id/search?q=Enok+maryani+dalam+model+mitigasi+bencana&hl=id&gbv=2&oq>
- Hadari Nawawi Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, 2010, *Manajemen Bencana Prespon dan Tindakan Terhadap Bencana*, Yogyakarta: Metpress.
- ISDR, 2004, Pengantar Manajemen penanggulangan Bencana. <http://www.google.co.id/search?q=Pengantar+Manajemen+penanggulangan+bencana&hl=id&gbv=2&gs>
- Keputusan Menteri Nomer 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP)
- Keputusan Menteri Sosial No. 80 Tahun 2010 *Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM). Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*
- Moleong, 2002. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Pustaka Karya.
- Peraturan Pemerintah Nomer 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- _____ Nomer 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Sunit Agus Tri Cahyono dan Abdul Hayat. 2011. *Penyebab dan Dampak Sosial Bencana Banjir Bandang di Wasior*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Suryopratomo. 2005. *Bencana Gempa dan Tsunami*. Jakarta: Kompas
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*
- Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Yean Paul Radrique. 2012. *Transportations Disaster*, New York: Hoftra University Department of Global Studies and Geografi

Peran Nurani Astra dalam Penanganan Korban Bencana Alam The Role of *Nurani Astra* on Natural Disaster Victims

Siti Aminatun*

*Peneliti Madya Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Badiklit Kesos, Kementerian Sosial RI, Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta.

Email: aminatunsiti57@yahoo.com.

Diterima 18 Maret 2013, disetujui 24 April 2013

Abstract

Astra International Limited social responsibility is corporation commitment through putting aside some of its profit for people-in-need social welfare professionally. This study is to describe on several efforts that have been done by Nurani Astra to give social service for natural disaster victims. The approach of the study is descriptive. Data are gathered through interviews and documentary analysis. The study finds that Astra International Limited, through Nurani Astra Program, has done a lot for corporate social responsibility (CSR) through fund distribution. The program reaches directly natural disaster victims through emergency funding, food, and beverage needed by the victims. CSR through Nurani Astra is continued in reconstruction and rehabilitation phases at the effected areas. The program is stated as a vision of Astra International Limited, as a will and philosophy, that the existence of Atra International limited is not just profit oriented but also giving benefit and added value for the nation through economy, social, an environment contribution. Based on the study is recommended that social corporate responsibility should be developed and spreaded out for the people in need, especially CSR from the financially capable.

Keywords: CSR-Disaster Victims-Social Commitment

Abstrak

Tanggung jawab sosial PT Astra International Tbk merupakan bentuk kepedulian perusahaan dengan menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan dengan cara yang tepat dan profesional. Pengkajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang berbagai upaya penanganan korban bencana alam yang dilaksanakan oleh Nurani Astra. Pengkajian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada PT Astra International Tbk serta dengan memanfaatkan dokumen terkait. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk melalui program Nurani Astra peduli bencana telah banyak berbuat dengan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Program Nurani Astra peduli bencana menjangkau langsung korban bencana alam mulai dari sumbangan tahap darurat begitu terjadi bencana dengan menyalurkan bantuan makanan minuman yang berhubungan erat dengan kebutuhan korban. Kegiatan peduli bencana melalui program Nurani Astra berlanjut pada tahap proses rehabilitasi dan rekonstruksi, tahap ini dilakukan dengan menjangkau langsung ke daerah-daerah yang terkena musibah bencana alam. Melalui program Nurani Astra peduli bencana perusahaan telah menetapkan visi mengenai tanggung jawab sosial dan hal ini sudah menjadi tekad dan filosofi perusahaan bahwa keberadaan Astra tidak hanya profit namun juga berkeinginan memberi manfaat dan bisa memberi nilai tambah bagi kesejahteraan bangsa melalui kontribusi positif pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut di atas direkomendasikan bahwa *Corporate Social Responsibility* dari dunia usaha melalui kepedulian sosial yang diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan perlu terus digalang dan dipupuk sebagai bentuk kontribusi secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat dari pihak yang berkemampuan secara financial.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-Korban Bencana-Kepedulian Sosial

A. Bencana Alam dan berbagai Permasalahannya

Bencana alam yang terjadi di dunia ini tidak bisa dielakkan, seperti bencana alam tsunami, kebakaran, tanah longsor, banjir, gempa bumi maupun angin puting beliung. Secara geografis letak Indonesia berada pada posisi antara benua Asia dan Australia, serta antara samudra Hindia (Indonesia) dan pasifik. Indonesia juga merupakan daerah tropik kedudukan Indonesia dilewati garis katulistiwa. Posisi ini mempunyai implikasi besar dan berpengaruh terhadap cuaca, iklim dan musim yang terdapat di sebagian besar wilayah Indonesia.

Bencana karena peristiwa alam sering kali datangnya secara tiba-tiba, namun bencana alam yang disebabkan karena manusia seperti kebakaran hutan, tanah longsor dan banjir dikarenakan hutan yang telah beralih fungsi pohon-pohon ditebangi dimanfaatkan kayunya tetapi tidak ditanami kembali sehingga hutan menjadi gundul. Bencana alam karena ulah manusia bisa dicegah dengan memperbaiki lingkungan hidup agar tetap terjaga dan tidak menimbulkan bencana. Bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung, kekeringan, dan banjir merupakan bencana alam karena kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan yang berhubungan dengan perkiraan cuaca. Di Indonesia terbagi menjadi dua jenis musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada musim hujan bencana alam yang terjadi berhubungan dengan air yaitu bencana tanah longsor dan bencana banjir. Beberapa wilayah di Indonesia merupakan daerah rawan bencana banjir seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, propinsi Jambi, Propinsi Riau dan lain-lain. Salah satu contoh yang terjadi akibat musim hujan ini adalah bencana banjir di Jakarta yang terjadi pada bulan Januari 2013. Kerugian akibat bencana banjir di Jakarta cukup besar Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Joko Widodo memperkirakan nilai kerugian banjir Jakarta sekitar Rp 20

triliun seperti yang diungkapkannya di Balai Kota Jakarta Selasa 22 Januari 2013 (citra Indonesia.com) dan tidak hanya materi juga menelan korban jiwa. Dari sejumlah analisis, penyebab terjadinya banjir tidak hanya semata dari tingginya curah hujan, faktor manusia juga berperan. Membuang sampah sembarangan hingga tata kelola pembangunan kota yang kurang baik dinilai memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir. Sejumlah tempat di Jakarta yang sudah menjadi langganan banjir kembali terendam, juga jalan-jalan kota juga terendam banjir akibat drainase yang buruk. Istana Negara yang menjadi tempat Presiden beraktifitas ikut terendam hingga sebetis orang dewasa. Bunderan Hotel Indonesia yang menjadi jantung lalu lintas Ibukota menjadi kubangan, tanggul yang berada di jalan Latuharhary jebol hingga air kian cepat menuju pusat kota, menurut sumber Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya / BNPB jumlah wilayah yang terendam banjir 32 Kecamatan dengan ketinggian air antara 10 cm hingga 200 cm, korban meninggal dunia 15 orang, jumlah warga yang terkena banjir 97.608 kepala-keluarga (248.864 jiwa) Republika 20 Januari 2013.

Relawan dan tim SAR memprioritaskan orang tua lanjut usia, anak-anak, perempuan dan orang sakit untuk dievakuasi. Akibat banjir ada beberapa korban banjir yang terserang penyakit, seperti gatal-gatal, pilek, diare, alergi dan lain-lainnya. Mereka sangat membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada korban bencana banjir namun sebaran pengungsi yang tidak terpusat menyebabkan sulitnya pendistribusian bantuan tersebut, juga keterbatasan aparat pemerintah dalam melayani begitu banyak korban. Melihat kenyataan ini berbagai elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam penanganan korban bencana alam banjir tersebut dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Warga yang menjadi korban bencana alam banjir tentu membutuhkan bantuan uluran tangan dari warga lain yang tidak terkena musibah. Semangat solidaritas sosial kemanusiaan telah menumbuhkan empati dan menyambung

silaturahmi baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat luas yang bergerak untuk meringankan beban korban bencana alam banjir tersebut.

Salah satu yang bergegas memberikan bantuandalam penanganan korban bencana alam yang terjadi di wilayah Republik Indonesia ini adalah PT Astra Internasional Tbk melalui program Nurani Astra peduli bencana yang telah memberikan kepedulian terhadap penanganan korban bencana alam diberbagai daerah dengan menyalurkan dana tanggung jawab sosial (corporate social responsibility). Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas dan mendalam tentang kegiatan yang dilakukan oleh Nurani Astra peduli bencana maka pengkajian ini dilakukan. Permasalahannya ialah upaya apa saja yang dilakukan Nurani Astra peduli bencana dalam penanganan korban bencana alam. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang berbagai upaya penanganan korban bencana alam yang dilaksanakan oleh Nurani Astra. Pengkajian ini bersifat deskriptif, pengumpulan data dimulai dari data sekunder melalui pencarian di situs internet, di lanjutkan dengan melakukan wawancara kepada PT Astra International Tbk serta dengan memanfaatkan dokumen terkait termasuk berbagai berita di koran yang memuat seputar permasalahan bencana alam untuk mendukung data hasil wawancara. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa dalam bentuk deskriptif tentang program Nurani Astra peduli bencana dan berbagai upaya penanganan terhadap korban bencana alam.

B. Kepedulian Sosial dan Bencana Alam

Kepedulian sosial dari dunia usaha yang diwujudkan melalui tanggung jawab sosial diberikan kepada masyarakat sekitar dimana dunia usaha tersebut berada. Program Nurani Astra yang memberikan perhatian terhadap penanganan korban bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meringankan beban korban bencana alam. Program Nurani Astra peduli bencana pihak

corporate melaksanakan program tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan berupa donasi dalam bentuk pemberian bantuan (charity, philanthropy). Dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tulus ikhlas berbagi dan melakukan kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan visi perusahaan. Dunia usaha dapat melakukan kegiatan dengan aman dan baik disuatu daerah, karenanya dunia usaha sebaiknya berpartisipasi secara aktif untuk berkontribusi secara langsung kepada masyarakat melalui CSR tersebut. Dunia usaha bisa menentukan sendiri bentuk CSR yang akan dilakukan sesuai dengan kemauan dan kemampuan corporate untuk melaksanakan penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang di pandang mendesak untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang di jalankan oleh dunia usaha merupakan ketulusan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Menurut Siti Jubaedah (2011:5) seiring dengan pesatnya perkembangan dunia usaha promosi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya mulai dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab sosial dunia usaha secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktek yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum penghargaan masyarakat dan lingkungan serta kemitraan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan

CSR yang berkelanjutan yang ditetapkan oleh dunia usaha merupakan bentuk nyata dalam usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat sehubungan dengan berbagai kejadian yang harus mendapatkan perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan yang menjadi korban bencana alam membutuhkan berbagai pelayanan dan bantuan untuk keberlangsungan kehidupannya. CSR adalah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya. CSR merupakan

kepedulian pengusaha yang didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom lines, yaitu profit (Keuntungan Perusahaan) people (kesejahteraan manusia/masyarakat) dan planet (keberlanjutan lingkungan hidup). Pengertian CSR tersebut mengandung arti kepedulian sosial dunia usaha terhadap pihak yang membutuhkan bantuan agar dapat memenuhi hajat hidup yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan turut mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Program Nurani Astra peduli bencana merupakan kepedulian terhadap korban bencana tidak terbatas pada pemberian sumbangan tahap darurat bencana sesaat setelah terjadi bencana namun berlanjut pada proses rehabilitasi dan pemulihan. Pelaksanaan penanganan terhadap korban bencana dilaksanakan secara langsung menjangkau masyarakat penerima manfaat. Wilayah Indonesia secara geografis terletak pada posisi silang antara daratan Asia dan benua Australia dan diantara Samudra Indonesia dan Pasifik membujur pada daerah tropik hal ini menyebabkan wilayah Indonesia rawan terhadap berbagai jenis bencana alam. Bencana alam yang terjadi bisa secara tiba-tiba maupun ada tanda-tanda sebelumnya. Bencana alam gunung meletus biasanya diawali oleh gejala mengeluarkan semburan awan panas. Bencana angin puting beliung disertai hujan, bencana tanah longsor diawali dari bergesernya tanah, bencana banjir diawali hujan. Bencana alam tsunami ditandai menyurutnya air laut, bencana kekeringan disebabkan karena musim kemarau yang begitu lama.

Bencana alam yang terjadi di dunia karena kehendak Allah Tuhan Yang Maha Kuasa namun manusia harus berusaha meminimalisasi berbagai kemungkinan kerugian yang akan menimpa. Apabila terjadi bencana alam diperlukan penanganan dengan segera, korban bencana membutuhkan pelayanan guna keberlangsungan kehidupannya. Bencana alam yang terjadi selalu membawa korban baik harta benda maupun korban jiwa. Penanggulangan bencana alam di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana nasional

dengan menempatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kementerian sosial telah mengarahkan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau Community Center Base Disaster Management (CCBDM), yang mendahulukan kepentingan dari, oleh dan untuk masyarakat, pranata sosial serta modal sosial (Social Capital). Bencana alam yang terjadi di suatu daerah bisa datang secara tiba-tiba atau terjadi dengan adanya gejala-gejala sebelumnya. Akibat dari bencana alam akan selalu membawa kerugian, baik materiil maupun moril bahkan tidak jarang membawa korban jiwa.

Menurut W.Nick Carter dalam Sumar Sulistiyo dkk 2011: 29-33 menyatakan bahwa manajemen penanggulangan bencana alam mencakup lima tahapan:

1. Persiapan menghadapi bencana: Pada dasarnya persiapan ini merupakan rangkaian kegiatan yang memungkinkan baik pemerintah, organisasi masyarakat maupun perseorangan untuk menghadapi datangnya bencana alam meliputi, peringatan apabila masa bencana telah ditengarai namun belum menimbulkan ancaman pada kawasan tertentu. Ancaman merupakan masa pada saat isyarat bencana mulai ditengarai akan melanda kawasan tertentu. Pencegahan terhadap bencana, dimaksudkan tindakan yang akan dilakukan setelah menerima isyarat ancaman selanjutnya berusaha menghindari akibat bencana. Keuntungan dari tindakan diatas adalah untuk menyiapkan berbagai kemungkinan yang diperlukan jika bencana benar-benar terjadi.
2. Penanganan saat terjadi bencana: Apabila bencana benar terjadi atau ketika bencana sedang terjadi, maka dilaksanakan pengelolaan kegiatan penanganan terhadap korban bencana. Kegiatan pada tahap ini utamanya ditujukan pada penyelamatan kehidupan dan perlindungan pada harta benda, serta membahas tentang bagaimana memperbaiki kerusakan dan dampak lainnya yang diakibatkan oleh bencana. Kegiatan ini meliputi, pelaksanaan rencana yang telah disusun sebelumnya, mengaktifkan system peralatan penanggulangan

bencana, penelitian (identifikasi masalah) dan penyelamatan, penyediaan makan / sandang/ bantuan kesehatan, perencanaan anggaran serta penggalan dan pengumpulan dana, pembuatan lokasi penampungan pengungsi. Bagian ini sering disebut tanggap darurat, karena kegiatannya hanya dengan waktu 2 sampai dengan 3 minggu, sesudah bencana terjadi. Keadaan darurat diumumkan oleh Pemerintah.

3. Rekonstruksi (perbaikan kembali): Perbaikan kembali merupakan proses pemberian bantuan bagi masyarakat penderita korban bencana. Proses ini dapat memakan waktu lebih panjang, bisa 5 sampai dengan 10 tahun. Terdapat tiga kegiatan utama dalam tahap perbaikan kembali yaitu pemulihan bentuk fisik seperti semula, kondisi fisik seperti sebelum terjadi bencana. Melakukan perbaikan agar semua infra struktur dapat berfungsi seperti semula. Pembangunan kembali berbagai hal yang mengalami kerusakan total. Kegiatan yang bersifat khas yaitu, perbaikan kembali semua fasilitas pelayanan utama, perbaikan kembali bangunan umum dan rumah penduduk, penyediaan rumah darurat, penanganan dan penyembuhan kembali kondisi fisik dan kejiwaan orang-orang yang menderita karena bencana, kegiatan untuk jangka panjang berupa membangun kembali bangunan umum dan sarana kelengkapannya. Dalam penanganan korban bencana alam, pada tahap rekonstruksi yang telah dilakukan oleh Nurani Astra antara lain adalah penanganan korban bencana alam gempa bumi di Sumatra Barat dan bencana alam gunung meletus yaitu gunung Merapi.
4. Rehabilitasi (memampukan kembali): Merupakan tahap meningkatkan kemampuan menghadapi bencana, pengalaman yang diperoleh selama menghadapi bencana dimaksudkan untuk meyakinkan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijaksanaan pada masa mendatang. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pengenalan program dengan teknologi tertentu yang tahan terhadap bencana. Pemanfaatan bantuan internasional

diusahakan dilakukan secara optimal. Menerapkan pengalaman menghadapi bencana untuk program penelitian lebih lanjut. Penggunaan berbagai peralatan dan sarana yang cocok untuk situasi tertentu dalam menghadapi bencana. Demikian pula yang telah dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah penanganan korban bencana alam di Sumatra Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.

5. Mitigasi (penjinakan): Kegiatan dalam mitigasi atau penjinakan ini biasanya dijadikan program khusus, untuk mengurangi kerusakan yang terjadi, yang mungkin menimpa sekelompok orang tertentu. Pada tahap mitigasi atau penjinakan dilakukan oleh pihak pemerintah namun program peduli bencana Nurani Astra segera bergerak bila terjadi bencana alam guna meringankan beban korban bencana alam. Beberapa negara menganggap apabila penerapan Undang-undang tentang tata bangunan dipatuhi masyarakatnya dapat mengurangi kerugian misalnya terjadinya bangunan roboh akibat gempa bumi. Tahap mitigasi dimaksudkan guna mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Kegiatan penjinakan meliputi, pemberlakuan Undang-undang tentang tata ruang bangunan, penerapan peraturan tata guna tanah, pemberlakuan peraturan tentang keselamatan penggunaan tanah, lautan dan udara, program perbaikan system pertanian untuk mengurangi gangguan musim panen, pengenalan suatu sistem perlindungan instalasi/ infrastruktur yang vital, membangun prasarana pelengkap, misalnya pembangunan infra struktur jalan keluar dari daerah rawan bencana. Kelima tahapan tersebut dapat dijadikan acuan agar masyarakat tanggap dan waspada terhadap kondisi bila terjadi bencana. Bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu apabila terjadi, masyarakat telah siap siaga menghadapinya dengan berbekal pada pemahaman tentang usaha-usaha penanggulangan bencana.

Management penanggulangan korban bencana alam tersebut membutuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat melalui solidaritas

masyarakat guna menanggulangi berbagai akibat yang di timbulkan oleh bencana alam. Solidaritas sosial terjadi karena rasa bersatu dalam kehendak, perbuatan dan empati pada penderitaan orang lain yang disertai dengan bantuan moril dan materiil karena ikut merasakan apa yang di rasa oleh orang lain. Sikap sosial ini sebetulnya sudah ada sejak nenek moyang terdahulu yaitu sifat gotong royong. Sifat gotong royong secara alamiah diturunkan dari generasi ke generasi dengan di landasi kesadaran dan tanggung jawab sosial baik secara perorangan, kelompok maupun lembaga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

Hal ini berhubungan erat dengan sikap social, menurut WA Gerungan, 1981, 151-152 disebutkan bahwa sikap social adalah suatu sikap seseorang atau kelompok orang yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap obyek social, menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap salah satu obyek sosial dan biasanya dinyatakan tidak hanya oleh seseorang saja, melainkan oleh sekelompok atau masyarakat di lingkungannya. Sikap memiliki peranan yang penting dalam menyikapi suatu peristiwa dalam kontek ini dalam menanggapi berbagai bencana alam yang terjadi dan bagaimana penanganan yang harus diberikan kepada korban bencana alam.

C. Program Nurani Astra Peduli Bencana

Program peduli bencana Nurani Astra merupakan kepedulian sosial PT Astra International Tbk terhadap berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Republik Indonesia ini. Program Nurani Astra ditujukan kepada penanganan korban bencana alam untuk kesejahteraan sosial masyarakat yang terkena dampak bencana alam merupakan kegiatan donasi dalam bentuk pemberian bantuan (charity, philanthropy). Program Nurani Astra peduli bencana merupakan keinginan tulus untuk berbagi dan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan baik yang berasal dari visi

perusahaan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak ada aturan dari pihak pemerintah, pihak dunia usaha diberi kebebasan untuk menentukan sendiri sesuai dengan kemampuannya. Dalam pelaksanaannya bisa melalui lembaga yang sudah bergerak dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial maupun menjangkau masyarakat secara langsung. Program Nurani Astra peduli bencana menurut bapak M. Riza Deliansyah Environment and Social Responsibility Division Head Astra merupakan implementasi dari salah satu Catur Dharma Astra yaitu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan Negara yang diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Seluruh cabang grup Astra dimanapun berada harus bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Mekanisme kerja program Nurani Astra peduli bencana adalah memberikan perhatian khusus bila terjadi bencana alam di wilayah Republik Indonesia. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bantuan dalam penanganan korban bencana alam tersebut Nurani Astra akan berkoordinasi dengan cabang grup Astra dimana perusahaan tersebut berada yang paling dekat dengan wilayah terjadinya bencana alam dan akan menjadi kepanjangan tangan dan langsung memberikan bantuan. Melalui Nurani Astra kepedulian sosial terhadap korban bencana alam tidak terbatas pada pemberian sumbangan tahap darurat bencana, namun berlanjut pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan para korban bencana alam pada tahap darurat bencana akan segera disalurkan bantuan yang berhubungan dengan kebutuhan yang mendesak seperti makanan. Pada saat terjadi bencana alam, para korban bencana alam sudah sangat sibuk dengan berbagai usaha penyelamatan diri dan keluarganya sehingga berbagai bantuan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akan sangat membantu. Berbagai penanganan pada tahap rehabilitasi maupun tahap rekonstruksi akan disesuaikan dengan kebutuhan korban bencana alam tersebut. Bila diperlukan untuk kegiatan yang

bersifat khusus yang membutuhkan acara protokoler seperti peresmian suatu bangunan yang dibiayai oleh Nurani Astra maka akan dihadiri oleh perwakilan dari Environment and Social Responsibility Division Head Astra atau dihadiri oleh perwakilan dari anak perusahaan yang wilayahnya terjadi bencana alam. Kegiatan kepedulian sosial program Nurani Astra peduli bencana yang telah dilaksanakan dalam penanganan korban bencana alam antara lain sebagai berikut:

1. Bencana gempa bumi yang terjadi di Sumatra Barat 30 September 2009 berkekuatan 7,6 SR grup Astra juga terpanggil untuk turut serta meringankan beban korban bencana alam tersebut. Sejak hari pertama grup Astra memberikan bantuan dengan menyediakan peralatan berat ke wilayah terparah yaitu Kotamadya Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Disamping menyediakan peralatan berat juga diberikan paket bantuan sumbangan tahap darurat bencana yang berupa makanan, pakaian, obat-obatan, tenda, ambulance dan air bersih. Penyaluran bantuan pakaian dan lain-lainnya tersebut disalurkan melalui 4 wilayah grup Astra yaitu Pekanbaru, Medan, Palembang dan Jambi yang dikirim melalui jalur darat. Grup Astra juga memberikan program bantuan dengan merenovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Patamuran, SDN 2 Padang Sago, SDN 17 Lubuk Alung dan SDN 25 Lubuk Lintah beserta sarana penunjangnya. Renovasi keempat Sekolah Dasar Negeri tersebut di biayai oleh grup Astra, disamping renovasi Sekolah Dasar juga pemberian bantuan berupa perbaikan fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Petamanan dan Puskesmas Pembantu Kuduganting. Perbaikan Puskesmas diperuntukkan bagi warga sekitar yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan mempermudah petugas dan warga dalam menunjang kesehatan. Dua buah surau juga di renovasi yaitu surau Rumbia dan surau Diara sebagai fasilitas ibadah masyarakat di sekitar surau tersebut. Kepedulian grup Astra dalam program korban bencana alam gempa bumi sangat besar artinya bagi korban.

Perhatian berbagai elemen masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun berbagai lembaga yang ada di masyarakat merupakan wujud nyata dari kepedulian sosial. Pasca gempa Sumatra Barat grup Astra telah peduli dan empati dengan memberikan bantuan dengan total nilai sejumlah Rp 11,332 miliar. Sudah menjadi komitmen grup Astra bahwa perusahaan ini dimanapun berada harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Bencana alam meletusnya gunung Merapi yang terjadi pada 26 Oktober 2010 juga telah mendapatkan perhatian dari Nurani Astra. Pasca bencana alam grup Astra melalui Nurani Astra telah memberikan paket bantuan berupa makanan, obat-obatan, peralatan mandi, perlengkapan dapur, emergency lamp (lampu darurat), genset, kasur lipat, selimut, perlengkapan sandang dan pembangunan sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) yang sangat dibutuhkan bagi para korban bencana alam meletusnya gunung Merapi di berbagai posko pengungsian. Fasilitas umum MCK berjumlah 30 unit (masing-masing unit terdiri dari 5 bilik sehingga total bilik 150). Sarana MCK tersebut dibangun dan tersebar di empat wilayah yaitu di Kabupaten Magelang, Sleman, Klaten dan Kotamadya Yogyakarta. Total biaya yang di alokasikan untuk pembangunan MCK tersebut senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Bantuan dari Nurani Astra pada bencana alam meletusnya Gunung Merapi ini dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum yaitu dengan dibangunnya sarana pendidikan dan kesehatan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan wisma pendidikan, Poliklinik Desa dan laboratorium praktek Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1, dusun Krapyak, Desa Seloboro, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Perletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah dilakukan pada hari senin 14 Maret 2011 yang dihadiri oleh unsur pemerintah dan pihak PT Astra Internasional Tbk sebagai penyandang dana. Program rehabilitasi

dan rekonstruksi fasilitas umum berupa wisma siswa, laboratorium SMKN 1 Salam dan Poliklinik desa Jumoyo, kecamatan Salam Kabupaten Magelang ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 6 Oktober 2011 oleh PT Astra Internasional Tbk. Nilai bantuan yang diberikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan dan kesehatan tersebut adalah Rp 1,985 miliar termasuk perlengkapan sekolah (kursi, loker siswa, meja komputer, lemari, papan tulis, AC portable, laptop, komputer, wireless portable dan gazebo, kipas angin, mesin tetas dan gerobak troli. Selain itu juga diserahkan tiga sepeda motor Honda Revo kepada Dinas Kesehatan yang selanjutnya digunakan sebagai pelayanan kesehatan keliling. Pada saat peresmian rehabilitasi dan rekonstruksi ini di kemukakan bahwa bantuan yang berkenaan dengan bencana alam meletusnya gunung Merapi PT Astra Internasional Tbk telah menyalurkan bantuan berjumlah 5,8 miliar rupiah.

3. Bencana alam banjir yang melanda ibukota Jakarta telah direspon oleh Nurani Astra peduli bencana yang selanjutnya segera bergerak pada hari rabu tanggal 23 Januari 2013 tim Relawan Nurani Astra memberikan bantuan kepada warga Teluk Gong, Jakarta Utara yang terkena musibah bencana alam banjir. Tim Relawan Nurani Astra mendatangi langsung para warga yang masih bertahan di tempat tinggal masing-masing untuk menyalurkan bantuan. Di samping warga Teluk Gong Jakarta Utara bantuan juga diberikan kepada warga di wilayah Gedong Panjang, kelurahan Sungai Bambu, Warakas, Papanggo, Kampung Bahari, serta tempat pengungsian Cometa Arena dan Tanah Pasir, Pluit. Bantuan yang di distribusikan berupa makanan siap santap, air mineral, bahan makanan siap masak, minyak goreng, beras, obat-obatan, pembalut wanita, popok bayi, makanan dan susu bayi, matras selimut, handuk MCK portable, mobil kesehatan Astra (MOKESA) dan tim dokter.

Astra bersama grup perusahaannya menyatakan keprihatinan terhadap musibah

yang terjadi di ibukota Jakarta ini, grup Astra dengan segera telah memberikan bantuan melalui Nurani Astra dan mendistribusikan berbagai bantuan sejak hari pertama bencana alam banjir. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kemampuan dunia usaha untuk melaksanakan kewajiban sosial terhadap lingkungan sosialnya sebagai kerangka menciptakan masyarakat peduli.

Dunia usaha tentunya memperoleh untung (profit) yang dicari, namun kepedulian, perhatian dan empati yang dimiliki dengan pemberian bantuan kepada korban bencana alam oleh dunia usaha merupakan bukti nyata kepada orang-orang yang mengalami musibah di lingkungan sekitar dunia usaha tersebut berada. Kepedulian, perhatian dan empati adalah amaliah nyata yang harus dibangun oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun amal kebaikan akan menjadi keteladanan bagi siapa saja yang mau mengambil hikmah. Dari berbagai kejadian bencana alam di wilayah Indonesia ini terbukti bahwa keterpanggilan kemanusiaan telah membangkitkan semangat untuk berbagi dengan para korban yang dilakukan oleh masyarakat luas.

Dibalik berbagai masalah musibah bencana alam yang terjadi di dunia ini, sesungguhnya Tuhan Allah Swt yang maha kuasa telah menunjukkan sebagian kecil dari kekuasaan Nya. Curah hujan yang cukup deras telah menimbulkan bencana alam banjir dan manusia tidak mampu mengatasinya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya diri manusia dan betapa sangat tergantungnya manusia kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Berbagai peristiwa alam yang terjadi telah membangkitkan semangat masyarakat dari berbagai kalangan untuk bersama-sama memberikan berbagai bantuan baik tenaga, pikiran, waktu dan harta benda guna ikut meringankan beban korban bencana alam. Hal ini juga yang telah dibuktikan oleh salah satu dunia usaha yaitu PT Astra International Tbk peduli bencana beserta seluruh anak perusahaannya melalui program Nurani Astra

peduli bencana melakukan berbagai tindakan langsung ke lokasi wilayah bencana alam.

D.Rangkuman

Dari hasil kajian yang sudah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Nurani Astra telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial peduli bencana di berbagai daerah. Korban bencana alam sangat membutuhkan bantuan dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan, namun berbagai keterbatasan yang dimiliki pemerintah telah membangkitkan kepedulian dari masyarakat luas. Berbagai elemen masyarakat turut berpartisipasi dalam penanganan korban bencana alam, sesuai dengan Undang Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penanganan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Semangat solidaritas kemanusiaan, empati dan kesetiakawanan sosial masyarakat luas bergerak untuk meringankan beban korban bencana alam tersebut. Salah satu elemen masyarakat yang bergegas memberikan bantuan dan penanganan korban bencana alam yang terjadi di wilayah Republik Indonesia ini adalah Nurani Astra yang mempunyai kepedulian sosial dalam penanganan korban bencana alam. Upaya yang telah dilakukan antara lain pada saat terjadi gempa bumi di Sumatra Barat tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7,6 SR sejak hari pertama telah memberikan bantuan berupa peralatan berat, makanan, pakaian, obat-obatan, tenda, ambulance dan air bersih yang merupakan tahap darurat bencana. Bantuan ini dilanjutkan pada tahap proses rehabilitasi dan pemulihan dengan merenovasi sekolah, fasilitas kesehatan (Puskesmas) dan surau. Total bantuan yang diberikan dalam penanganan korban bencana alam gempa bumi di Sumatra Barat ini berjumlah Rp 11,332 miliar.

Penanganan bencana alam meletusnya gunung Merapi yang terjadi pada 26 Oktober 2010 juga telah mendapatkan perhatian dari PT Astra International Tbk melalui Nurani Astra.

Pada tahap darurat bencana telah memberikan bantuan makanan, obat-obatan, peralatan mandi, perlengkapan dapur, emergency lamp, genset, kasur lipat, selimut, perlengkapan sandang dan pembangunan sarana mandi, cuci dan kakus (MCK). Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membangun fasilitas sekolah sarana pendidikan, poliklinik desa, tiga sepeda motor Honda Revo yang diserahkan kepada dinas kesehatan untuk di gunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan keliling. Total bantuan peduli bencana yang diberikan akibat bencana alam meletusnya gunung Merapi berjumlah Rp 5,8 miliar.

Penanganan korban bencana alam banjir yang melanda Ibu Kota Jakarta kegiatan yang dilakukan oleh Nurani Astra yaitu dengan memberikan bantuan secara langsung pada tahap darurat bencana sejak hari pertama musibah banjir terjadi. Bantuan yang di berikan berupa makanan siap santap, air mineral, bahan makanan siap masak, minyak goreng, beras, obat-obatan, pembalut wanita, popok bayi, makanan dan susu bayi, matras, selimut, handuk, MCK portable, mobil kesehatan Astra (MOKESA) dan tim dokter.

Pemberian bantuan yang diberikan tidak terlepas dari tujuan program Nurani Astra untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pemberian bantuan diberikan secara langsung ke berbagai wilayah yang mengalami musibah bencana alam, baik pada tahap darurat bencana maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang dilakukan oleh Nurani Astra peduli bencana merupakan kepedulian nyata dari pihak *corporate*. Tindakan ini berpengaruh secara langsung kepada pihak yang terkena musibah bencana alam dengan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan kesimpulan di atas direkomendasikan kepada pihak *corporate* untuk tetap menyisihkan kedermawanan sosial melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dipersiapkan sebagai dana yang dapat digunakan bila terjadi berbagai permasalahan sosial di masyarakat untuk turut

meringankan beban penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. CSR diadakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya tidak ada aturan baku. Pelaksanaan CSR diserahkan kepada pihak corporate untuk menentukan sendiri bentuk CSR yang akan di lakukan. Kepedulian corporate melalui CSR yang di berikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan perlu terus digalang dan dipupuk sebagai bentuk kontribusi secara langsung untuk kesejahteraan masyarakat dari pihak yang berkemampuan secara financial.

Pustaka Acuan

Chulaifah, 2009, *Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Penanggulangan*

Bencana Alam Kekeringan, Yogyakarta: Citra Media,

Edi Suharto, 2006, *Pekerjaan Sosial dan Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama.

Gerungan, W.A. 1981, *Psikologi Sosial*, PT. Erisco, Bandung.

Sumar Sulistyono, dkk, 2009, *Sikap Sosial Masyarakat dalam Penanggulangan Korban Banjir*, Yogyakarta: Citra Media,.

UU No. 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

W. Nick Carter, 1991, *Managemen Penanggulangan Bencana*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Data CIP,

**Adaptasi Masyarakat terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air
di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta**
***Community Adaptation on The Limitations of Water Resources
in Pramuka Island, Seribu Islands, DKI Jakarta***

Ahmad Cahyadi¹, Wahyu Hidayat, dan Wulandari

Dosen Jurusan Geografi Lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Jalan Kaliurang km 4,5, Bulaksumur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 589595 Email: ¹ahmadcahyadi@geo.ugm.ac.id.
Diterima 17 Mei 2013, Disetujui 30 Mei 2013.

Abstract

The Development of small islands is often constrained by the limitations of water resources. This condition is caused by a wide catchment is limited, and the influence of sea water on the groundwater which causes the amount of groundwater is limited. This paper aims to determine the form of adaptation to limited water resources in Pramuka Island, Seribu Islands regency, DKI Jakarta. The results showed that the shape adaptation to limited water resources such as rain water harvesting, bring bottled water from outside the island, as well as using technology osmosi reverse to get clean water. The community adaptation is threatened not sustainable because the poor condition of the groundwater in Pramuka Island. Therefore, it is necessary to the management of water resources by maximizing the infiltration of rain water, solid dan water waste management, as well as set the maximum extraction of groundwater.

Keywords: Community Adaptation, Water Resources Limitations, Pramuka Island

Abstrak

Pembangunan pulau kecil seringkali terkendala dengan kondisi keterbatasan sumberdaya air. Kondisi ini disebabkan oleh luas tangkapan air yang terbatas, serta pengaruh air laut pada air tanah yang menyebabkan jumlah air tanah terbatas. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumberdaya air di Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumberdaya air berupa pemanfaatan air hujan, mendatangkan air kemasan dari luar pulau, serta menggunakan teknologi *reverse osmosi* untuk mendapatkan air bersih. Bentuk adaptasi ini terancam tidak berkelanjutan mengingat semakin buruknya kondisi air tanah di Pulau Pramuka. Oleh karena itu, maka diperlukan pengelolaan sumberdaya air dengan memaksimalkan resapan air hujan, pengelolaan sampah dan limbah, serta mengatur jumlah maksimum ekstraksi air tanah.

Kata Kunci: Adaptasi, Keterbatasan Sumberdaya Air, Pulau Pramuka

A. Keterbatasan Sumberdaya Air di Pulau Kecil

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak kedua di dunia setelah Kanada (Supriharyono, 2009). Jumlah pulau di Indonesia sekitar 17.508 (Christanto, 2010), dan sebagian besarnya (99,8%) merupakan pulau kecil (Kodoatie, 2012). Pulau kecil adalah pulau dengan ukuran kurang dari 2.000 km² (Falkland, 1991; Hehanusa dan Bakti, 2004).

Pengembangan wilayah pulau kecil merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Meskipun demikian, dengan luasnya yang terbatas, seringkali pulau kecil memiliki sumberdaya yang terbatas untuk dapat mendukung pembangunan di atasnya (Cahyadi, 2012). Salah satu sumberdaya yang ketersediaannya terbatas dan dapat menghambat proses pembangunan dan pengembangan ekonomi di pulau kecil adalah keterbatasan sumberdaya air (Sumawidjaja dan Suherman, 2005a; 2005b).

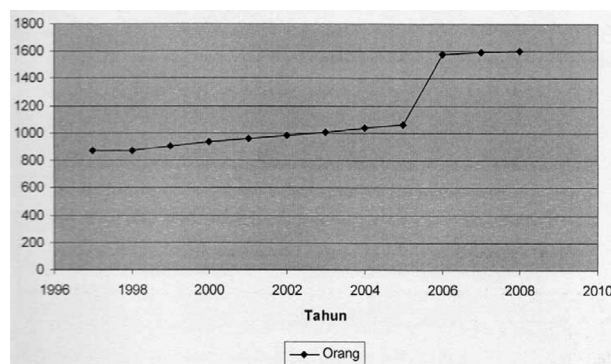
Falkland (1991) menyebutkan bahwa keterbatasan sumberdaya air di pulau kecil disebabkan karena luas wilayah tangkapan hujan yang sempit serta wilayah simpanan airtanah yang terbatas pula. Lebih lanjut Falkland (2003) menyebutkan bahwa ketersediaan air di pulau kecil sangat dipengaruhi oleh pertukaran air tanah dengan air laut. Simpanan air tanah di pulau kecil berupa lensa airtanah yang besarnya tergantung pada jumlah air yang meresap, luas pulau, material penyusun serta arus dan gelombang laut di sekitarnya.

B. Pulau Pramuka yang Terus Berkembang

Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Pulau dengan luas 16,54 hektar ini ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Seribu pada Tahun 2003. Seiring dengan penetapan tersebut, banyak fasilitas yang dibangun untuk mendukung fungsinya sebagai ibukota. Pembangunan tersebut tampak dari pembangunan pelabuhan, rumah sakit

umum daerah serta berkembangnya fasilitas wisata seperti hotel dan wahana permainan.

Perkembangan pembangunan di Pulau Pramuka tidak hanya menyebabkan berkembangnya aktivitas ekonomi dan jasa, tetapi juga diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang pesat (Gambar 1). Pertumbuhan penduduk di Pulau Pramuka adalah 2,54% per tahun (Cahyadi, 2012). Jumlah penduduk Pulau Pramuka sampai dengan Tahun 2008 sebanyak 1.039 jiwa. Hal ini berarti bahwa kepadatan penduduk di Pulau Pramuka sebesar 6.882 jiwa/km².



Gambar 1.

Grafik Pertumbuhan Penduduk di Pulau Koral Pramuka (Afadlal dkk, 2011)

C. Kondisi Sumberdaya Air di Pulau Pramuka

Kondisi sumberdaya air sangat terbatas. Kondisi ini dipengaruhi oleh luas yang kecil sehingga jumlah tangkapan air hujan sangat terbatas. Selain itu, Pulau Pramuka yang dikelilingi oleh lautan yang cukup dalam menyebabkan jumlah air yang tersimpan dalam lensa air tanah menjadi sedikit.

Secara geologi, Pulau Pramuka terbentuk dari rombakan karang yang berumur kuartar (Ongkosongo, 2011). Material yang membentuk Pulau Pramuka menyebabkan air hujan yang jatuh dapat meresap dengan cepat, tetapi demikian penerobosan air laut (intrusi) menjadi lebih mudah. Selain itu, material berupa rombakan karang menyebabkan airtanah di Pulau Pramuka mudah tercemar (Cahyadi, 2012). Kondisi di atas ditunjukkan oleh hasil penelitian Marfai dkk. (2012) dan Cahyadi

(2012) yang menunjukkan bahwa air tanah di sebagian besar Pulau Pramuka telah tercemar air laut (telah terjadi intrusi).

D. Adaptasi Masyarakat terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Interaksi keduanya kemudian menghasilkan hubungan timbal balik yang seringkali terwujud dalam bentuk budaya unik yang hidup di dalam masyarakat (Twigg, 2004; 2007). Budaya yang berkembang di masyarakat ini terus mengalami perubahan menyesuaikan kondisi lingkungan, tetapi seringkali perubahan ini tidak ditulis dalam suatu manuskrip sehingga penelusuran jejaknya sulit untuk dilakukan (Adger dkk, 2004; Aryadi, 2012). Interaksi manusia dan lingkungan yang menghasilkan budaya yang unik ini juga muncul di kawasan rawan bencana (Cahyadi dan Kusumaningrum, 2013). Hal ini karena manusia yang tinggal di kawasan rawan bencana secara naluriah akan merespons kondisi lingkungannya dengan bentuk adaptasi tertentu (Sudarmadji dkk, 2012).

Adaptasi diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh suatu populasi ataupun individu sehingga berdampak suatu individu ataupun populasi dapat bertahan atau tersingkir (Howard, 1986). Pendapat lain tentang adaptasi disampaikan oleh Smit dkk. (1999) yang menyatakan bahwa adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap sistem ekologi-sosial-ekonomi. Respons tersebut dapat muncul terhadap berbagai perubahan, tekanan, bahaya, risiko yang mungkin muncul, serta kesempatan yang dianggap sangat menguntungkan (Smit dan Wandel, 2006).

Adaptasi masyarakat Pulau Pramuka terhadap keterbatasan sumberdaya air pada awalnya berupa pemanenan air hujan. Pemanenan air hujan dilakukan dengan menampung air hujan yang jatuh pada atap rumah. Pemanenan air hujan dahulu digunakan oleh setiap rumah di Pulau Pramuka. Namun demikian, saat ini hanya tinggal beberapa rumah yang melakukan hal tersebut. Kondisi ini terjadi sejak dikenalkannya teknologi

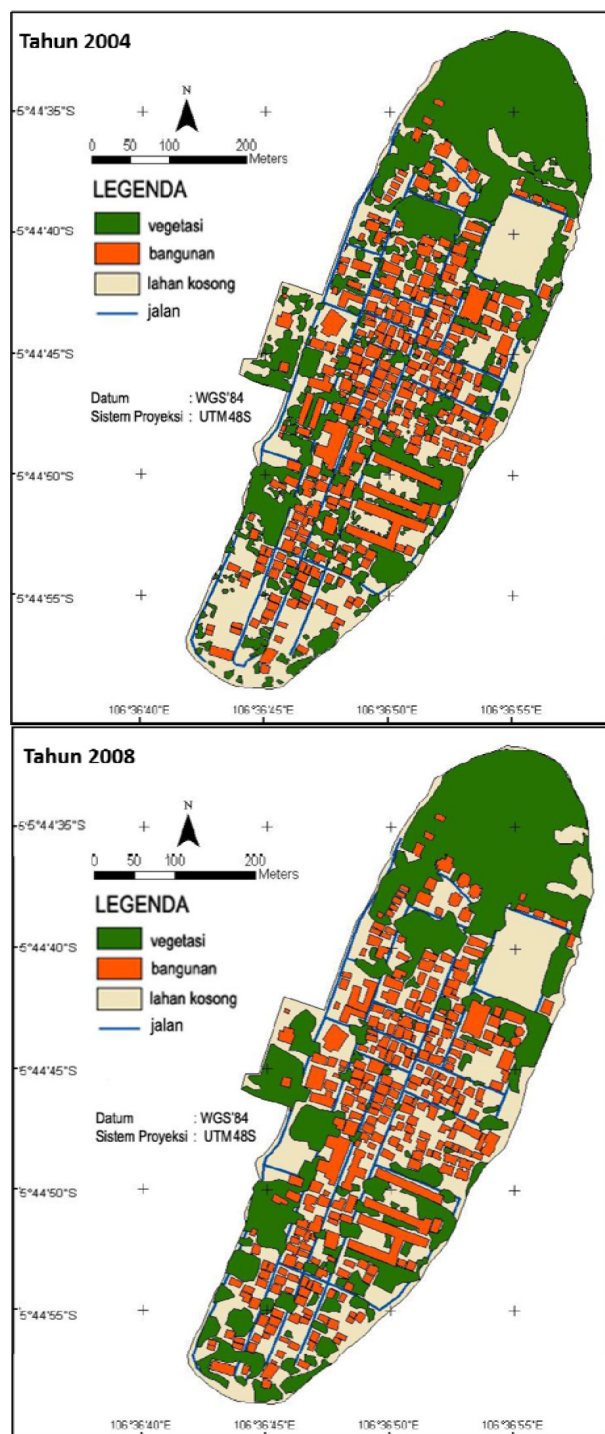
reverse osmosis yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, pemanenan air hujan mulai hilang sejak banyaknya air kemasan yang diangkut menggunakan kapal dari Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, masyarakat menganggap kondisi kualitas air tanah yang ada di Pulau Pramuka saat ini sudah tidak lagi sebaik dahulu. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa kualitas air dari hasil teknologi *reverse osmosis* dan air kemasan lebih baik serta mudah untuk mendapatkannya. Hal ini terjadi sejak pembangunan instalasi oleh pemerintah, serta semakin banyaknya sarana transportasi menuju Jakarta.

Saat ini instalasi pengolahan air dengan teknologi *reverse osmosis* yang ada di Pulau Pramuka sejumlah dua buah, satu milik pemerintah daerah dan satu lagi milik swasta. Namun demikian, saat ini instalasi yang beroperasi setiap saat hanya instalasi milik swasta. Kondisi ini disebabkan mahalnya operasional teknologi pada wilayah pulau kecil yang memiliki salinitas yang tinggi, menyebabkan umur guna dari alat menjadi lebih singkat. Kondisi demikian menjadi kendala bagi instalasi pemerintah saat birokrasi untuk mengajukan dana perbaikan peralatan yang rusak seringkali begitu sulit, sehingga instalasi teknologi *reverse osmosis* di Pulau Pramuka milik pemerintah seringkali tutup dalam waktu yang lama akibat kerusakan alat.

E. Pembangunan Tidak Berkelanjutan di Pulau Pramuka

Pertambahan jumlah penduduk, berkembangnya fasilitas wisata serta fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah dan asrama telah menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan kosong dan lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun. Gambar 2 menunjukkan terjadinya penambahan lahan terbangun dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2008. Pertambahan luas lahan terbangun pada kurun waktu tersebut mencapai 2,6% (Wibowo, 2010). Kondisi demikian akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah resapan air akibat lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan berubah menjadi lahan terbangun yang kedap air.



Gambar 2.
Peta Penggunaan Lahan di Pulau Pramuka
Tahun 2004 dan Tahun 2008
(Wibowo, 2010)

Pembangunan lahan terbangun yang berdampak pada kuantitas sumberdaya air

di Pulau Pramuka bukan hanya permukiman dan bangunan, tetapi juga pembangunan drainase dan jalan yang tidak ramah lingkungan. Pembangunan drainase di Pulau Pramuka menyebabkan air hujan yang jatuh di atap bangunan langsung mengalir ke laut. Hal ini artinya hujan yang merupakan satu-satunya sumber air yang mensuplai airtanah justru dibuang dengan percuma. Selain itu, pembangunan jalan menggunakan beton dan diikuti dengan drainase di sekitarnya menyebabkan luas daerah resapan air berkurang, serta air yang jatuh pada daerah tersebut langsung mengalir ke laut melalui drainase di sekitarnya.

Kegiatan pembangunan lain yang berpengaruh terhadap kuantitas sumberdaya air di Pulau Pramuka adalah pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan di sebelah Barat Pulau Pramuka dilakukan dengan mengeruk wilayah pantai agar memiliki kedalaman yang cukup sehingga kapal dengan ukuran cukup besar dapat bersandar. Kondisi demikian menyebabkan bagian Barat Pulau langsung berhadapan dengan laut yang dalam sehingga intrusi air laut berlangsung dengan lebih intensif dibandingkan dengan wilayah Timur pulau yang berbatasan dengan *reef flat* yang dangkal (Marfai dkk, 2012; Cahyadi, 2012).

Kerusakan kualitas sumberdaya air di Pulau Pramuka saat banyak disebabkan oleh limbah dan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dahulu pembangunan instalasi pengolahan sampah beserta petugas pengelola sampah pernah dibuat. Namun demikian, saat ini infrastruktur dan lembaga tersebut sudah tidak berfungsi. Kondisi ini menyebabkan penumpukkan sampah di bagian timur pantai Pulau Pramuka. Kondisi demikian menyebabkan terjadinya pencemaran air tanah, mengingat wilayah tersebut memiliki material penyusun tanah yang sangat rawan terhadap pencemaran (Cahyadi, 2012).

F. Pengelolaan Sumberdaya Air Pulau Pramuka di Masa Mendatang

Kondisi sumberdaya air di Pulau Pramuka membutuhkan upaya pengelolaan yang lebih

baik di masa mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar keberlanjutan pembangunan di Pulau Pramuka dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan sumberdaya air Pulau Pramuka di antaranya: Memaksimalkan jumlah air hujan yang meresap dengan membuat sumur-sumur resapan serta menggunakan bahan untuk jalan yang tidak kedap air; Tidak menggunakan drainase untuk mengalirkan air langsung ke laut, tetapi dialirkan ke sumur resapan; Melakukan pemanenan air hujan melalui atap bangunan; Membangun gudang logistik untuk air minum kemasan; Membangun sarana pengolahan limbah cair dan sampah; Membuat regulasi tentang jumlah penurapan air tanah yang boleh dilakukan.

Pengelolaan Lingkungan Sosial, meliputi: Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air. Hal ini sangat penting mengingat program pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat di Pulau Pramuka seperti pengelolaan sampah dan pembangkit listrik telah gagal dalam keberlanjutannya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air sangat penting. Keterlibatan masyarakat yang tinggi akan menyebabkan perasaan memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan suatu program akan meningkat.

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kondisi sumberdaya air di Pulau Pramuka yang jumlahnya sedikit dan rawan pencemaran; Langkah ini penting untuk dilakukan mengingat pengetahuan akan kondisi hidrologis pulau kecil secara konsep masih sangat kurang. Hasil wawancara menunjukkan meskipun masyarakat di Pulau Pramuka telah memiliki pengetahuan tentang terjadinya intrusi air laut, namun masyarakat belum mengetahui sebab-sebab terjadinya intrusi air laut. Kondisi ini juga tampak dari perilaku masyarakat yang membuat drainase yang membuang air hujan menuju laut, sehingga imbuhan air tanah menjadi berkurang dan memicu terjadinya intrusi air laut.

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dan limbah. Langkah ini tidak kalah penting, mengingat air tanah di Pulau Pramuka rawan

mengalami pencemaran (Cahyadi, 2012). Instalasi pengolahan sampah pulau pernah di buat di sisi timur laut Pulau Pramuka, namun demikian kegiatan pengelolaan sampah tersebut tidak berlangsung lama. Hal ini terjadi akibat tidak adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan tersebut, di mana proses pengelolaan sampah sepenuhnya dilakukan oleh petugas dari pemerintah.

G. Rangkuman

Bentuk adaptasi masyarakat terhadap keterbatasan sumberdaya air di Pulau Pramuka berupa pemanfaatan air hujan, mendatangkan air kemasan dari luar pulau, serta menggunakan teknologi *reverse osmosis* untuk mendapatkan air bersih. Bentuk adaptasi yang demikian terancam tidak berkelanjutan mengingat kondisi sumberdaya air yang semakin buruk. Kondisi tersebut disebabkan oleh semakin sedikitnya jumlah resapan air akibat semakin sedikitnya daerah resapan air serta sistem drainase yang tidak ramah lingkungan. Selain itu buruknya kondisi sumberdaya air disebabkan karena penurapan airtanah yang berlebihan sehingga menyebabkan intrusi air laut menjadi semakin jauh serta pengelolaan limbah dan sampah yang tidak tersedia.

Pustaka Acuan

- Adger, W. N.; Brooks, N.; Bentham, G.; Agnew, M.; dan Eriksen, S. 2004. *New Indicators of Vulnerability and Adaptive Capacity*. Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research.
- Afadlal; Wijonarko, S.; Meifina; Septi, A.; Ongkosongo, A.E. dan Ongkosongo, O.S.R. 2011. Tanggapan Penduduk Terhadap Rencana Revitalisasi Pulau Pramuka, dalam Ongkosongo, O.S.R.; Wijonarko, S. dan Afadlal. 2011. *Rona Lingkungan Pulau Pramuka*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Oseanografi, Balai Dinamika Laut, Kolompok Penelitian Geologi Laut.
- Aryadi, M. 2012. *Hutan Rakyat: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Cahyadi, A. 2012. Permasalahan Sumberdaya Air Pulau Kecil. *Prosiding Seminar Lingkungan Hidup 2012*. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Cahyadi, A. 2013. *Menyelamatkan Masa Depan Pulau Kecil di Indonesia: Sebuah Pembelajaran dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu*. Makalah dalam lomba karya tulis "Potert Indonesia 2014". Moskow: Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Rusia.
- Cahyadi, A. dan Kusumaningrum, A. 2013. Peranan Modal Sosial (*Social Capital*) dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Domestik di Kawasan Karst Gunungsewu: Studi Kasus di Dusun Gemulung, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Sudarmadji, Haryono, E.; Adji, T.N.; Widyastuti, M.; Harini, R.; Nurjani, E.; Cahyadi, A. dan Nugraha, H. 2013. *Ekologi Lingkungan Kawasan Karst Indonesia: Menjaga Kelestarian Kawasan Karst Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Christanto, Joko. 2010. *Pengantar Pengelolaan Berkelanjutan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Yogyakarta: Deepublish.
- Falkland, C. Anthony. 1991. *Hydrology and Water Resources of Small Island: A Practical Guide*. Paris: UNESCO.
- Hehanusa, P.E. dan Bakti, Hendra. 2005. *Sumber Daya Air di Pulau Kecil*. Bandung: LIPI Press.
- Howard, M.C. 1986. *Contemporary Cultural Anthropology*. Toronto: The University of South Pasific.
- Kodoatie, Robert J. 2012. *Tata Ruang Air Tanah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Marfai, M.A.; Cahyadi, A. dan Poerbandono, R., 2012, Identifikasi Bencana Pesisir dan Kerusakan Lingkungan Di Pulau Pramuka, Provinsi Dki Jakarta. *Laporan Penelitian*. Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir dan daerah Aliran Sungai Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ongkosongo, O.S.R. 2011. Lingkungan Fisik Pulau Pramuka. dalam Ongkosongo, O.S.R.; Wijonarko, S. dan Afadlal. 2011. *Rona Lingkungan Pulau Pramuka*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian Oseanografi, Balai Dinamika Laut, Kolompok Penelitian Geologi Laut.
- Smit, B.; Burton, I.; Klein, R.J.T. dan Street, R. 1999. *The Science Of Adaptation: A Framework for Assessment. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, Vol. 4. Hal: 199–213.
- Smit, B. dan Wandel, J. 2006. *Adaptation, Adaptive Capacity and Vulnerability*. Global Environmental Change, Vol. 16. Hal: 282–292.
- Sudarmadji; Suprayogi, S. dan Setiadi. 2012. *Konservasi Mata Air Berbasis Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Supriharyono. 2009. *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumawidjaja, N. dan Suherman, D. 2005a. Ketersediaan Air sebagai Faktor Pembatas Pengembangan Pulau Mangole, Maluku Utara. dalam Hehanusa, P.E. dan Bhakti, Hendra. 2005. (eds) *Sumber Daya Air di Pulau Kecil*. Bandung: LIPI Press.
- Sumawidjaja, N. dan Suherman, D. 2005b. Potensi Sumberdaya Air Sebagai Kendala Pembangunan di Pulau Sulabesi, Maluku Utara. dalam Hehanusa, P.E. dan Bhakti, Hendra. 2005. (eds) *Sumber Daya Air di Pulau Kecil*. Bandung: LIPI Press.
- Sunil, S. 2011. Community-Based Adaptation to Coastal Hazards: A Scoping Study Among Traditional Fishing Communities in Kerala, India. *Makalah dalam Disaster, Risk and Vulnerablity Conference 2011*. Mahatma Gandhi University, India.
- Twigg, J. 2004. *Disaster Risk Reduction, Mitigation and Preparedness in Development and Emergency Programming, Good Practice Review 9*. London: Humanitarian Practice Network.
- Twigg, J. 2007. *Characteristics of a Disaster-Resilient Community : A Guidance Note*. DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Wibowo, P.E. 2010. Identifikasi Perubahan Tutupan Lahan Pulau Panggang, Pulau

Pramuka dan Pulau Karya Antara Tahun 2004 dan Tahun 2008. *Tugas Akhir*. Program Studi Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, Institut Teknologi Bandung.

